PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL DISTRESS* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

SHERLY ANGGIYA PRATIWI

175020401111031

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)"

Yang disusun oleh :

Nama	: Sherly Anggiya Pratiwi
NIM	: 175020401111031
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Program Studi	: S-1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **21 Juli 2021** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Ghozali Maski, SE., MS
   195809271986011002
   (Dosen Pembimbing)
   .....

2. Dr. Susilo, SE.,MS.
   196010301986011001
   (Dosen Penguji I)
   .....

3. Moh. Athoillah, S.E., M.E
   198411212019031004
   (Dosen Penguji II)
   .....

Malang, 21 Juli 2021

Ketua Program Studi

S-1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D.

NIP. 198107022005011002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: **Sherly Anggiya Pratiwi**
Tempat, tanggal lahir	: **Malang, 15 Desember 1999**
NIM	: **175020401111031**
Jurusan	: **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi	: **Ekonomi, Keuangan dan Perbankan**
Alamat	: **Jl. Atletik No. 118 RT:04 RW:03 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru, Kota Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

Yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ghozali Maski SE., MS.
NIP. 195809271986011002

Malang, 09 Juli 2021
Yang membuat pernyataan

Sherly Anggiya Pratiwi
NIM. 175020401111031

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D.
NIP. 198107022005011002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Sherly Anggiya Pratiwi
NIM	: 175020401111031
Jenis Kelamin / Status	: Perempuan / Belum Menikah
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Asal	: Jl. Atletik No. 118, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang.
Alamat di Malang	: Jl. Atletik No. 118, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang.
Telepon / No. HP	: 085755023686 / 085816044880
Email	: sherlyanggiya12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Kel. Tasikmadu (2004 – 2006)
2. SD Negeri Tasikmadu II (2006 – 2011)
3. SMP Negeri 18 Kota Malang (2011 – 2014)
4. SMA Negeri 9 Kota Malang (2014 – 2017)
5. Strata S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang

Riwayat Organisasi

1. Anggota Traditional Dance SMA Negeri 9 Malang (2014 – 2017)
2. Staff Magang Biro Medkrei (Media Kreasi dan Informasi) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (2017 – 2018)
3. Staff Tetap Biro Medkrei (Media Kreasi dan Informasi) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (2018 – 2019)

Riwayat Kepanitiaan

1. Makrab IE (Makin Rekat Makin Akrab) Jurusan Ilmu Ekonomi – Staff Divisi PDD (2017)
2. Coffee Share Staff – Staff Divisi PDD (2018)
3. Economics Care (Ecocare) FEB UB – Staff Divisi PDD (2018)
4. Transformer 2018 (Ospek Jurusan Ilmu Ekonomi) – Staff Divisi SPV (2018)
5. Olimpiade Ekonomi FEB UB – Asisten Koordinator Divisi PDD (2018)
6. Pemilwa (Pemilihan Wakil) Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB 2018 – Asisten Koordinator Divisi PDD (2018)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Tetaplah menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah, berdamailah dengan keadaan, dan jangan marah. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi jangan menyerah. Karena pelan-pelan akan kembali menjadi indah, percayalah."

TaubinopalIE

"... akhir dari ceritaku adalah aku berkata dengan bangga pada diriku sendiri. "Tuh kan.. kamu tuh bisa. Yang perlu kamu lakuin cukup melangkah maju. Selesaikan satu per satu."

Author Gantengsumpah

Sebuah persembahan kecil untuk :

Ibu. Terima kasih atas segala sayang dan do'anya.

Bapak. Terima kasih untuk segala lelah dan guraunya.

Keluarga. Terima kasih untuk segala semangat dan motivasinya.

Teman-teman. Terima kasih telah menjadi *support system*.

Diriku sendiri. Terima kasih telah berjuang sampai saat ini.

Aku menyayangi kalian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
ABSTRAK xviii
ABSTRACK xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11
BAB II 13
TINJAUAN PUSTAKA 13
2.1 Tinjauan Teori 13
2.1.1 Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa 20
2.1.2 Partisipasi Masyarakat 25
2.1.3 *Financial Distress* 29
2.1.4 Hubungan Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa . 34
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 37
2.3 Kerangka Pikir Penelitian 40
2.4 Hipotesis Penelitian 41
BAB III 42
METODE PENELITIAN 42
3.1 Jenis Dan Metode Penelitian 42
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 43
3.2.1 Populasi 43

3.2.2 Sampel 43
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 45
3.3.1. Variabel 45
3.3.2. Definisi Operasional 46
3.4 Pengukuran Variabel : Skala Likert 55
3.5 Sumber Data 57
3.5.1 Data Primer 58
3.5.2 Kuesioner 58
3.6 Teknik Analisis Data 58
BAB IV 71
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 71
4.1 Hasil Penelitian 71
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Karangploso 71
4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Karangploso 72
4.1.3 Profil Desa 72
4.1.4 Penelitian Kuantitatif 81
4.2 Pembahasan 123
4.2.1 Teknik Keabsahan Data 123
4.2.2 Uji PCA (Principal Component Analysis) 127
4.2.3 Regresi PCA 134
4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi 136
4.2.5 Uji Asumsi Klasik 137
4.2.6 Uji Penarikan Kesimpulan 140
BAB V 150
PENUTUP 150
5. 1 Kesimpulan 150
5. 2 Saran 151
DAFTAR PUSTAKA 153
LAMPIRAN 159

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa tahun 2015-2020 4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 43
Tabel 3. 1 Indikator dan Pernyataan Terkait Dengan Kuesioner Untuk Variabel Penelitian 51
Tabel 3. 2 Pilihan Jawaban 56
Tabel 3. 3 Skor Jawaban 56
Tabel 3. 4 Pedoman Klasifikasi Nilai d 66
Tabel 4. 1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 82
Tabel 4. 2 Profil Responden Berdasarkan Usia 83
Tabel 4. 3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 85
Tabel 4. 4 Profil Responden Berdasarkan Jabatan 86
Tabel 4. 5 Item Pertanyaan 1 Saya Mengetahui dan Memahami Peraturan yang ada di Desa 87
Tabel 4. 6 Item Pertanyaan 2 Sebagai perangkat pengelola Dana Desa saya sangat mengetahui dan memahami bagaimana arah Dana Desa akan direalisasikan 88
Tabel 4. 7 Item Pertanyaan 3 Sebagai perangkat pengelola dana desa saya perlu mengikuti pelatihan untuk mengelola dana desa dengan baik 89
Tabel 4.8 Item Pertanyaan 4 Saya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani 89
Tabel 4.9 Item Pertanyaan 5 Saya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani 90
Tabel 4.10 Item Pertanyaan 6 Pendidikan terakhir yang saya tempuh membantu saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari 91
Tabel 4.11 Item Pertanyaan 7 Saya berlaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ditempat saya bekerja. 92
Tabel 4.12 Item Pertanyaan 8 Saya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat dan perangkat desa yang lainnya. 93
Tabel 4.13 Item Pertanyaan 9 Saya tidak senang menerima kritik saran dari masyakarat 93

Tabel 4.14 Item Pertanyaan 10 Kompetensi yang saya miliki sebagai perangkata pengelola Dana Desa dapat meningkatkan efektivitas saya dalam menyelesaikan tugas. 94
Tabel 4.15 Item Pertanyaan 11 Kompetensi yang saya miliki dapat meningkatkan kualitas saya sebagai perangkat desa yang mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu. 95
Tabel 4.16 Item Pertanyaan 12 Secara keseluruhan, kompetensi yang saya miliki berguna untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada saya. 96
Tabel 4.17 Item Pertanyaan 13 Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa. 99
Tabel 4.18 Item Pertanyaan 14 Setiap keputusan yang akan dilakukan selalu dirundingkan dahulu dengan perwakilan masyarakat. 99
Tabel 4.19 Item Pertanyaan 15 Selama pengambilan keputusan suasana berlangsung tenang. 100
Tabel 4.20 Item Pertanyaan 16 Saya selalu menghargai perwakilan masyarakat (BPD) yang mengusulkan rencana anggaran. 101
Tabel 4.21 Item Pertanyaan 17 Saya merasa perlu adanya perwakilan masyarakat (BPD) dalam rapat penyusunan anggaran. 102
Tabel 4.22 Item Pertanyaan 18 Tanpa adanya campur tangan perwakilan masyarakat (BPD) di dalam rapat kita akan kesusahan dalam melihat apa yang sedang dibutuhkan untuk pembangunan program desa. 102
Tabel4. 23 item Pertanyaan 19 Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam mengawasi dana desa. 104
Tabel 4.24 Item Pertanyaan 20 Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam melaporkan dana desa. 104
Tabel 4.25 Item Pertanyaan 21 Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) sangat diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. 105
Tabel 4.26 Item Pertanyaan 22 Saya percaya tentang segala informasi terkait anggaran Dana Desa, reliabel dan dapat dipertanggung jawabkan. 106
Tabel 4.27 Item Pertanyaan 23 Saya percaya bahwa pengalokasian Dana Desa dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang baik. 107
Tabel 4.28 Item Pertanyaan 24 Saya percaya pengalokasian Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, karena pihak yang menanganinya kompeten, terpercaya, dan berintegritas. 108

Tabel 4.29 item Pertanyaan 25 Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat 111
Tabel 4.30 Item Pertanyaan 26 Saya melakukan pelaporan relaisasi penggunaan dana desa sesuai dengan PP No 60 Tahun 2014 112
Tabel 4.31 Item Pertanyaan 27 Laporan realisasi penggunaaan dana desa disampaikan tepat waktu.....113
Tabel 4.32 Item Pertanyaan 28 Berdasarkan PP No 60 tahun 2014, saya harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.....114
Tabel 4.33 Item Pertanyaan 29 Berdasarkan PP NO 60 tahun 2014, laporan realisasi dana desa dilaporankan dua (2) kali dalam satu tahun. 115
Tabel 4.34 Item Pertanyaan 30 Laporan realisasi dana desa yang saya berikan telah sesuai dengan realisasinya. 116
Tabel 4.35 Item Pertanyaan 31 Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat telah dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.....117
Tabel 4.36 Item Pertanyaan 32 Dana desa telah dimanfaatkan secara optimal dan tidak pernah terjadi financial distress (kesulitan keuangan). 117
Tabel 4.37 Item Pertanyaan 33 Masyarakat setempat sangat puas dengan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat pengelola Dana Desa. 118
Tabel 4.38 Item Pertanyaan 34 Selama pelaksanaan program Dana Desa tidak pernah terjadi masalah selama pengerjaannya. 119
Tabel 4.39 Item Pertanyaan 35 Masalah dalam pengelolaan keuangan Desa perlu didiskusikan dengan perwakilan masyarakat (transparansi) 120
Tabel 4.40 Item Pertanyaan 36 Perwakilan masyarakat dan perangkat desa adalah satu kesatuan yang penting dalam kemajuan sebuah desa. 121
Tabel 4.41 Hasil Uji Validitas Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) 123
Tabel 4.42 Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X2) 123
Tabel 4.43 Hasil Uji Validitas Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) 125
Tabel 4.44 Hasil Uji Reliabilitas 126
Tabel 4. 45 Hasil Uji PCA (Principal Component Analysis) 127
Tabel 4. 46 Hasil Uji KMO *and Barlett's Test* (X1) 130

Tabel 4. 47 Hasil Uji KMO *and Barlett's Test* (X2) 131
Tabel 4. 48 Hasil Uji KMO *and Barlett's Test* (Y) 131
Tabel 4. 49 Hasil *Component Matrix* (X1,X2 dan Y) 132
Tabel 4. 50 Hasil Uji Realibilitas (X1,X2 dan Y) 133
Tabel 4. 51 Hasil Analisis Regresi PCA 134
Tabel 4. 52 Analisis Koefisien Determinasi 136
Tabel 4. 53 Hasil Uji *Skewness-Kurtosis* 137
Tabel 4. 54 Hasil Uji Glejser 138
Tabel 4. 55 Hasil Uji *Durbin-Watson* 139
Tabel 4. 56 Pedoman Klasifikasi Nilai *d* 139
Tabel 4. 57 Hasil Analisis Uji Statistik Parsial (Uji t) 141
Tabel 4. 58 Model Summary 145
Tabel 4. 59 Anova 146
Tabel 4. 60 Kesimpulan Hasil Secara Keseluruhan 146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Nilai Korupsi Dana Desa 6
Gambar 1. 2 Nilai Korupsi Berdasarkan Sektor selama Semester I/2020 .. 8
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran 40
Gambar 4. 1 Kantor Desa Tawangargo 73
Gambar 4. 2 Lokasi Kantor Desa Tawangargo 73
Gambar 4. 3 Kantor Desa Donowarih 74
Gambar 4. 4 Lokasi Desa Donowarih 74
Gambar 4. 5 Kantor Desa Bocek 75
Gambar 4. 6 Lokasi Kantor Desa Bocek 75
Gambar 4. 7 Kantor Desa Girimoyo 76
Gambar 4. 8 Lokasi Kantor Desa Girimoyo 76
Gambar 4. 9 Kantor Desa Ngijo 77
Gambar 4. 10 Lokasi Kantor Desa Ngijo 77
Gambar 4. 11 Kantor Desa Ngenep 78
Gambar 4. 12 Lokasi Kantor Desa Ngenep 78
Gambar 4. 13 Kantor Desa Kepuharjo 79
Gambar 4. 14 Lokasi Kantor Desa Kepuharjo 79
Gambar 4. 15 Kantor Desa Ampeldento 80
Gambar 4. 16 Lokasi Kantor Desa Ampeldento 80
Gambar 4. 17 Kantor Desa Tegalgondo 81
Gambar 4. 18 Lokasi Kantor Desa Tegalgondo 81
Gambar 4. 20 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 83
Gambar 4. 21 Profil Responden Berdasarkan Usia 84
Gambar 4. 22 Profil Responden Berdasakan Pendidikan 85
Gambar 4. 23 Profil Responden Berdasarkan Jabatan 86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Perizinan Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) 159
Lampiran 2 Lembar Perizinan Dari Desa Kepuharjo 160
Lampiran 3 Lembar Perizinan Dari Desa Donowarih 161
Lampiran 4 Lembar Perizinan Dari Desa Bocek 162
Lampiran 5 Lembar Perizinan Dari Desa Ngijo 163
Lampiran 6 Lembar Perizinan Dari Desa Ngenep 164
Lampiran 7 Lembar Perizinan Dari Desa Tawangargo 165
Lampiran 8 Lembar Perizinan Dari Desa Ampeldento 166
Lampiran 9 Lembar Perizinan Dari Desa Tegalgondo 167
Lampiran 10 Lembar Perizinan Dari Desa Girimoyo 168
Lampiran 11 Kuesioner Penelitian 169
Lampiran 12 Data Respoonden 175
Lampiran 13 Tabulasi Data 178
Lampiran 14 Hasil Pengolahan SPSS 185
Lampiran 15 r tabel 192
Lampiran 16 DW tabel 193
Lampiran 17 *Chi-Square* tabel 194
Lampiran 18 t tabel 195
Lampiran 19 f tabel 196

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL DISTRESS* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

ABSTRAK

Pemerintah desa sebagai satuan hukum terkecil di masyarakat Indonesia tidak lepas dari indikasi kebangkrutan. Bentuk ketidakmampuan pihak pemerintah dalam mengadakan ketersediaan modal (kesulitan keuangan) yang mengakibatkan ketidaksanggupan dari pihak pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada khalayak ramai sebagaimana aturan yang telah ditetapkan terkait standar minimal pemberian pelayanan mutu yang sesuai merupakan salah satu indikasi terjadinya *financial distress* dalam sektor publik (Desa). Meningkatkan pemberian pelayanan yang tidak memuaskan pada desa salah satu faktor utamanya adalah banyaknya penyelewengan terhadap pengalokasian dana desa namun, penyebab lain dana desa rawan diselewengkan karena kompetensi perangkat desa yang kurang memuaskan, kurang adanya transparansi antara pihak desa kepada masyarakat, lemahnya sistem pengawasan dari pihak masyarakat, desa dan pemerintah serta ketidaksesuaian dalam hal perencanaan dan eksekusi pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaruh kompetensi perangkat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan *financial distress* aalam pengelolaan dana desa pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner untuk mendapatkan data primerdari responden. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kompetensi perangkat pengelola dana desa (X1), partisipasi masyarakat (X2), dan pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa (Y). Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi *principal component analysis* (PCA) dengan tingkat kesalahan sebesar 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi perangkat pengelola dan desa (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya variabel kompetensi perangkat pengelola dan desa (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada variabel pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa (Y) sebesar 65,9% sedangkan 34,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain selain pada penelitian ini.

Kata kunci : Dana Desa, Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, *Financial Distress* Sektor Publik

THE EFFECT OF VILLAGE FUND MANAGEMENT APPARATUS' COMPETENCE AND PUBLIC PARTICIPATION ON FINANCIAL DISTRESS PREVENTION IN VILLAGE FUND ADMINISTRATION

(A Case Study of Village Offices in Karangploso Sub-District, Malang Regency)

ABSTRACK

The village government as the smallest legal unit in Indonesian society cannot be separated from indications of bankruptcy. The inability of the government to provide financial capital (financial difficulties) cause the inability of the government to provide satisfactory services to the general public as mentioned in the rules related to the minimum standard of providing appropriate quality services is one indication of the occurrence of financial distress of public sector (village). One of the main factors in increasing the provision of unsatisfactory services to villages is the deviation in the allocation of village funds, however, the other causes are the unsatisfactory competence of the village apparatus, the lack of transparency between the village and the community, the weak supervision system from the community, village and government, and also the discrepancies in planning and executing activities.

The aim of this research is to understand and to the effect of village fund management apparatus' competence and public participation on financial distress prevention in village fund administration at Village Offices in Karangploso Sub-District, Malang Regency. This research was conducted by distributing questionnaires to obtain primary data from respondents. In this study, the variables used are village fund management apparatus' competence (X1), public participation (X2), financial distress prevention in village fund administration (Y). The data analysis method used in this study is regression analysis, principal component analysis (PCA) with an error rate of 5%.

The result of the study shows that partially variable village fund management apparatus' competence (X1) and public participation (X2) give positive significant effect to prevent financial distress in village fund public. Furthermore, variable competency of village fund manager (X1) and public participation (X2) together give effect to the variable financial distress prevention in village fund public (Y) of 65.9% while the remaining 34.1% is explained by other variables except this study.

***Key words** : Village Fund, Village Apparatus' Competence, Public Participation, Financial Distress of Public Sector.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan permintaan untuk mempersiapkan dan memperkuat kapasitas, termasuk perangkat pemerintah desa dan masyarakat sebagai salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan nasional. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan agar pembangunan tersebut dapat terwujud adalah dengan memberikan subsidi dana kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dikelola dan dijalankan sesuai sistem pemerintahannya sendiri.

Desa menjadi bentuk representasi kesatuan hukum terkecil dari masyarakat yang lambat laun tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah hidup rakyat Indonesia oleh karenanya desa yang menjadi bagian terkecil namun, sebuah sistem pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Jika dilihat, saat ini desa menuntut adanya regenerasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar tidak larut dalam kemiskinan. Desa memiliki fungsi dan kewenangan dalam membangun, mengatur, mengurus, mengelola terselenggaranya pemerintah, melakukan pelatihan kemasyarakatan dan pemberdayaan potensi desa. Sejalan dengan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014, tentang upaya untuk memajukan perekonomian rakyat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat peran dari rakyat desa yang tidak hanya bertindak sebagai objek namun juga memiliki dwifungsi yang mampu bertindak sebagai subjek dalam menciptakan

pembangunan nasional Republik Indonesia yang merupakan tujuan dari pengadaan dana desa.

Pemberian mandat pada pemerintah yang ditujukan guna pengalokasian dana desa terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagai bentuk peran serta terhadap tercapainya pengalokasian dana desa yang sesuai dengan arahan pemerintah, pelaksanaan kewajiban desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa jika dilihat dari segala sisinya harus sebanding dengan kewenangan yang dimiliki. Pendapatan yang didapatkankan oleh desa berasal dari anggaran tahunan APBN yang setiap bulannya akan disalurkan ke desa yang berupa dana desa dan akan dikelola oleh masing-masing desa sesuai kebutuhannya. Meskipun pemerintah kabupaten memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah desa, pemerintah pusat meyakini bahwa pemerintah desa bisa lebih mampu dalam mengutamakan kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan harus menunggu dari pemerintah kabupaten yang ruang lingkup persoalannya jauh lebih luas dan rumit.

Salah satu tujuan yang dibawa oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam strategi pembangunan Nawacita, yaitu menciptakan Indonesia dari pinggiran yang sudah dimulai dengan meningkatnya pembangunan di desa melalui alokasi dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah. Sesuai UU Nomor 6 Pasal 72 Tahun 2014, secara bertahap dari dana transfer daerah penganggaran dana desa dalam APBN diberikan sebesar 10%. Pemberian dana desa dihitung menurut total desa dan diberikan pada desa berdasarkan :

1. Total penduduk,
2. Tingkat kemiskinan,
3. Luas wilayah, dan

4. Angka kesulitan geografis.

Salah satu sumber pendapatan desa berasal dari dana desa, yang tata cara pengelolaannya telah dijelaskan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa (Buku Saku Dana Desa: 2017) . Tata cara dalam pengurusan keuangan desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelola dana desa harus memegang keempat asas tersebut, agar penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah desa dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat sesuai dengan ketentuan asas-asas tersebut yang dapat berupa laporan bulanan atau tahunan yang telah dipublikasikan. Dalam pengelolaannya, dana desa memerlukan proses perencanaan yang matang untuk melakukan berbagai urusan desa yang mana hal tersebut diselenggarakan oleh petinggi dalam desa yang berkaitan seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang secara aktif turut serta dalam memaksimalkan utilitas dan pengalokasian sumber daya desa secara optimal untuk memenuhi tujuan bersama yaitu pembangunan desa. Rencana keuangan dana desa berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sementara alokasi dana desa bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi dan Kabupaten sebanyak 10% dari jumlah minimumnya yang didapat dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (Buku Saku Desa:2017).

Tabel 1. 1

Anggaran Dana Desa tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi

2015	20,76 Triliun	82,00%
2016	46,98 Triliun	97,65%
2017	60 Triliun	98,54%
2018	62 Triliun	99,00%
2019	70 Triliun	99,73%
2020	72 Triliun	-

Sumber : Kementrian Keuangan (Lokadata)

Berdasarkan tahun ke tahun, jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Dana Desa mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak sepenuhmya berhasil untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tingginya persentase penyerapan itu tidak sebanding dengan menurunnya angka kemiskinan pada warga desa yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) di tahun 2019, tingkat kemiskinan masih belum bisa turun secara signifikan dan program dana desa belum bisa mengatasinya. Penurunan rata-rata kemiskinan sebesar 2,7% dalam empat tahun terakhir masih dinilai belum memuaskan, dan faktanya sebelum tahun 2015 saat program dana desa diluncurkan angka penurunan kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan setelah program tersebut diberlakukan. Jumlah penduduk miskin perdesaan memiliki penurunan sepanjang 2010-2014 dengan rata-rata 3,1% per tahun. Selain itu, dengan adanya penyaluran dana desa oleh pemerintah rasio gini yang digunakan sebagai alat pengukur ketimpangan hanya menurun sebesar 0,01 yang sebelumnya 0,23 menjadi 0,22 yang dinilai masih belum efisien. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa masih belum cukup kuat untuk mampu membenahi masalah ketimpangan di pedesaan.

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi hal utama yang paling penting dalam peran serta masyarakat untuk membantu proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang mencakup kebutuhan

warga desa. Tidak hanya itu, tetapi kolaborasi yang cukup baik oleh pihak perangkat desa dan warga desa dalam tiap tahap pengelolaan alokasi dana desa juga sangat membantu kelancaran pelaksanaannya, sehingga pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menjadi tempat untuk menampung aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa dapat tersalurkan sehingga scara tidak langsung mampu mendukung proses alokasi dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pemberadayaan masyarakat desa, apabila hal tersebut tidak dilakukan besar kemungkinan akan terjadi kebangkrutan dalam pemerintah Desa. Memprediksi potensi kebangkrutan desa sangat berguna untuk meninjau bagaimana kinerja perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, dengan adanya prediksi tentang potensi kebangkrutan pemerintah desa risiko yang akan terjadi dapat diminimalisir yang bisa jadi dapat dikurangi ataupun dihindari.

Kebangkrutan bukan hanya bisa terjadi dalam suatu perusahaan saja, namun suatu desa bisa saja mengalami hal yang serupa apabila tidak mampu mengelola sumber dana yang tersedia. Keadaan dimana perusahaan telah tidak sanggup untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksiapan untuk membayar pinjaman hutang, ketidaksiapan dalam membayar laba perusahaan pada para pemegang saham (atau bahkan penurunan nominal pembayaran laba pemegang saham), penurunan tingkat aset kerja dan bahkan ketidakmampuan modal untuk melunasi sejumlah penegluaran perusahaan, merupakan salah satu definisi dari prediksi kebangkrutan (*financial distress*) pada sektor swasta (Foster, 1986). Sedangkan ketidakmampuan pihak pemerintah dalam mengadakan ketersediaan modal (kesulitan keuangan) yang mengakibatkan ketidaksanggupan dari pihak pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada khalayak ramai

sebagaimana aturan yang telah ditetapkan terkait standar minimal pemberian pelayanan mutu yang sesuai, penejalasan tersebut merupakan salah satu definisi *financial distress* dalam sektor publik (Jones and Walker, 2007).

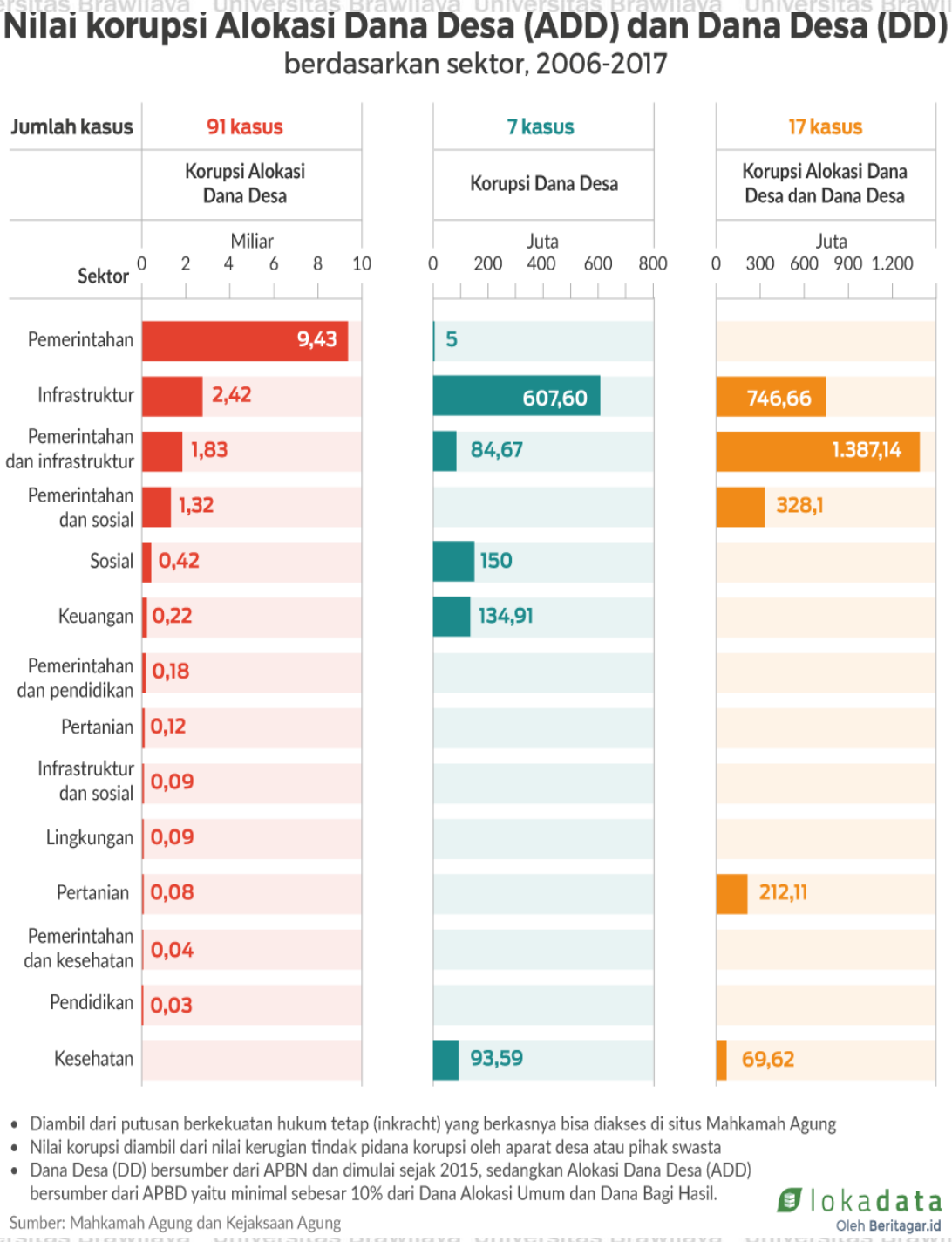

Gambar 1.1 Data Korupsi Dana Desa

Sumber : Mahkamah Agung

Dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, seluruh pihak percaya bahwa pemerintah desa di seluruh tanah air mampu mengelola dana desa secara baik, namun pada pelaksanaannya ternyata desa masih belum bisa mengelolanya secara maksimal terbukti masih ada kasus penyelewengan dana desa. Terdapat pemberitahuan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada publik, bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2017 terdapat 115 kasus dengan 122 dakwaan melakukan korupsi pada dana desa yang mengakibatkan kemrosotan dana mencapai Rp. 20,16M. Selain itu, perangat desa dan swasta melakukan korupsi sebanyak Rp. 4,3M, nominal tersebut berasal dari penyalahgunaan rencana keuangan yang seharusnya dipakai untuk pembangunan prasarana yang bersifat umum yang terdiri dari jalan, jembatan, penerangan jalan atau proyek pembangunan prasarana lainnya. Pelaku yang paling banyak melakukan korupsi terkait dana desa tersebut adalah Kepala Desa sebanyak 78,7%, disusul oleh Bendahara Desa 8,2%, Staf Desa 4,9%, dan lainnya 8,2%.

Salah satu contoh kasus penyelewengan terhadap dana desa terjadi pada akhir bulan September 2020, oleh Kepala Desa di Kabupaten Malang. Penyelewengan dalam bentuk korupsi pemberian alokasi dana desa dan dana desa untuk kepentingan pribadi yang telah menimpa mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sebesar 109 juta. Selain itu muncul kasus serupa di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kepala Desa Ngenep dinyatakan sebagai terdakwa dalam dugaan masalah perzinahan pada awal Bulan Januari 2021. Warga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngenep bukanlah sebuah contoh tindakan terpuji, mengingat Kepala Desa Ngenep merupakan orang nomor satu di Desa Ngenep. Selain kasus tersebut Kepala Desa Ngenep juga diduga melakukan *mark up* anggaran dana desa yang

digunakan untuk pengadaan mobil siaga dan biaya perataan tanah lapangan. Dalam laporannya, BPD menyatakan bahwa rencana anggaran untuk belanja pembelian mobil siaga yang dinilai faktur pembelian sejumlah Rp 145 juta, namun dalam laporan pertanggung jawaban Desa Ngenep menjadi Rp 185 juta, selain itu untuk biaya perataan tanah lapang telah mendapat bantuan dari pihak investor namun dimasukkan ke anggaran dalam dana desa dengan nilai kurang lebih mencapai Rp 75 juta. Dari kasus penyelewengan dana desa terindikasi bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin tidak bisa mengemban amanah dari Bupati / Camat yang memberikan tanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan desanya. Kasus penyelewengan dana desa tentu memberikan dampak bagi Kantor Desa seperti terkendalanya pemberian sarana dan prasarana secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kantor Desa.

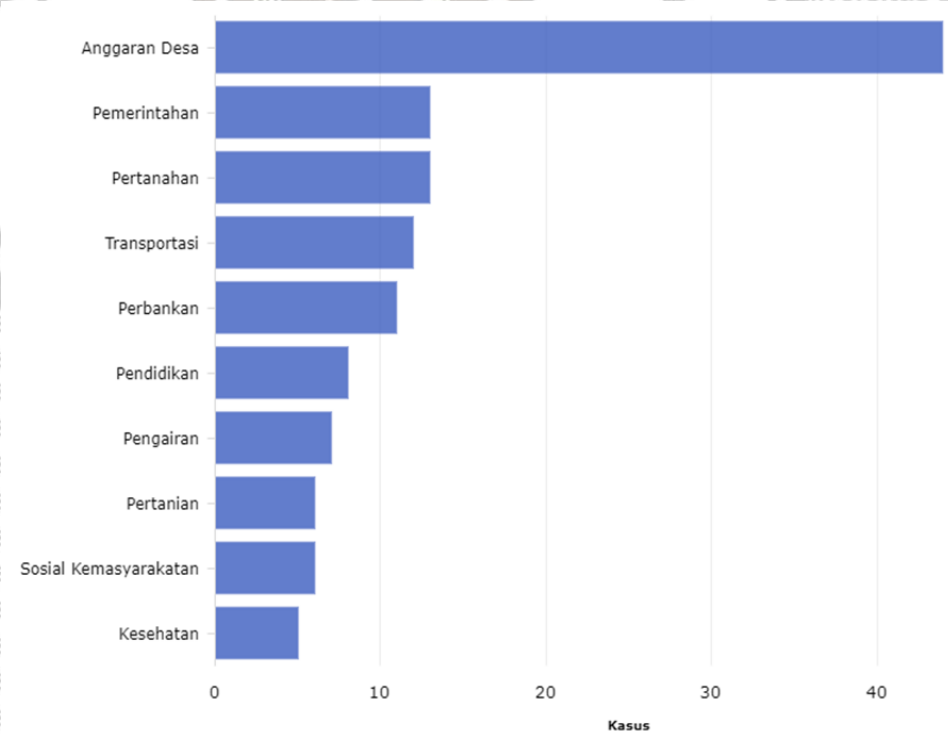

Gambar 2.1 Korupsi Berdasarkan Sektor selama Semester I/2020

Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), 29 September 2020

Sepanjang 6 bulan pertama di tahun 2020 pada angka yang tercatat pada tabel yang dikemukakan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus tentang penggelapan pada bagian anggaran dana desa memiliki garis diagram yang paling panjang yang menunjukkan kasus paling sering dijumpai yaitu sejumlah 44 kasus. Pada bagian pemerintahan dan pertanahan menempati posisi di bawahnya dengan masing-masing sejumlah 13 kasus penggelapan. Ketidaksanggupan desa untuk melaksanakan tanggungjawab dari pemerintah pusat yang berkenaan tentang dana desa menjadi salah satu aspek timbulnya penyelewengan dana. Selain itu, memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi juga menjadi salah aspek kesengajaan yang memicu banyaknya kasus terkait dana desa yang korupsi atau diselewengkan. Penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi sehingga tidak terwujudnya pengalokasian dana merupakan salah satu indikasi kebangkrutan desa, karena jika dana tidak tidak terpenuhi jalan yang diambil oleh desa dengan meminjam dana baik berasal dari internal desa maupun eksternalnya. Oleh karenanya, pengawasan secara ketat harus dilakukan dalam proses mekanisme pengaliran dana desa untuk meminimalisir kerugian yang besar bagi Negara.

Selain ketidaksiapan desa dalam menerima dana dari pemerintah pusat penyebab lain dana desa rawan dikorupsi antara lain karena kompetensi perangkat desa yang kurang memuaskan, kurang adanya transparansi antara pihak desa kepada masyarakat, lemahnya sistem pengawasan dari pihak masyarakat, desa dan pemerintah serta ketidaksesuaian dalam hal perencanaan dan eksekusi pelaksanaan kegiatan (Rifai Darus, 2019). Faktor tersebut menjadi pemicu marak terjadinya kejahatan oleh perangkat desa atas penyelewengan pengguanaan dana desa ketika dana desa yang tujuan utamanya sebagai jalan untuk membangun desa kearah yang lebih maju tetapi

malah terus menerus dijadikan ladang untuk melakukan korupsi, maka tujuan dari pemberian dana desa tersebut tidak akan tercapai.

Jika dillihat dari penyelewengan terkait dana desa yang terjadi di Desa Ngenep, hal ini dapat berakibat pada kurangnya rasa kepercayaan dari masyrakat kepada Kantor Desa yang merupakan salah satu indikasi adanya kebangkrutan pada desa karena faktor non keuangan dari *financial distress* terkait kualitas pemberian layanan tidak berjalan dengan optimal karena dana yang semestinya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat desa tetapi justru diselewengkan menjadi dikorupsi, maka keputusan yang diambil oleh peneliti adalah melakukan penelitian lebih lanjut tentang apakah hasil dari skema alur dana desa yang dijalankan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan konsisten atau belum. Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan uraian di atas penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang berjudul sebagai berikut : **"PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL DISTTRESS* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)"**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini tentang Bagaimana Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian terkait penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, oleh karenanya tujuan dilakukannya penelitian ini agar mampu memahami dan menganalisis bagaimana Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari banyak sisi baik itu secara langsung maupun tak langsung sehubungan dengan upaya untuk memahami seberapa besar pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak yang turut serta di dalamnya, antara lain :

a. Untuk Penulis

Untuk penulis penelitian ini menjadi satu dari sekian banyak persyaratan yang harus ditempuh agar dapat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan teori yang telah diperoleh dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahun dan pengalaman mengenai apa yang dikerjakan selama proses pelaksanaan penelitian ini.

b. Untuk Instansi Pemerintah Desa.

Untuk Instansi Pemerintah Desa, penelitian ini dibuat dengan maksud agar bisa dijadikan masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan khususnya berkenaan tentang Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa.

c. Untuk Pihak Lain.

Untuk pihak lain, penelitian ini dibuat dengan maksud dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai bahan riset yang dapat dikembangkan pada hasil penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan pustaka merupakan keseluruhan dari bacaan yang mungkin telah dibaca maupun dianalisis, baik sebagai koleksi pribadi ataupun yang sudah dipublikasikan. Tinjauan pustaka acap kali dihubungkan dengan landasan teori atau kerangka teori. Landasan teori merupakan proses menganalisis objek penelitian dengan menggunakan teori-teori. Berikut merupakan beberapa teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini :

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

   Suatu pemikiran terkait hubungan yang terbentuk sesuai dengan kontrak (perjanjian) yang terjalin antara pihak *principals* dan pihak *agents* merupakan pengertian dari teori keagenan. Pihak yang menyampaikan suatu keharusan yang harus dipertanggungjawabkan oleh sisi yang lain yaitu *principals,* sedangkan sisi yang wajib mengerjakan keseluruhan keharusan yang diberikan atas nama *principals* dalam kapailitasnya sebagai pengambil keputusan adalah *agents*. (Jensen dan Smith, 1984)

   Teori keagenan dapat terjadi apabila terjadi hubungan antara satu orang atau lebih yaitu pihak *principa*l bersama seorang yang lain selaku *agents* pada sebuah perjanjian, yang mana *principal* memiliki kewenangan kepada *agents* untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan mewakili pihak *principal.* (Jensen dan Meckling, 1976).

   Jansen dan Meckling mengembangkan teori keagenan (1976) yang menjelaskan antara *agent* dan *principals* terdapat konflik kepentingan. Untuk penelitian ini, pihak *agents* diwakili oleh pemerintah desa sedangkan

pihak *principal* diwakili oleh Walikota/Bupati. Dalam proses pelaksanaannya pihak *principal* memiliki keinginan untuk dapat mengetahui keseluruhan kabar (informasi) yang terjadi, termasuk segala bentuk kegiatan *agent* (desa), yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Salah satu yang bisa dilakukan oleh *agent* (desa) dengan memberikan laporan pertanggungjawaban. Pihak *principal* dapat menilai kinerja dari *agent* berdasarkan laporan tersebut. Laporan tersebut hendaknya disusun dengan baik dan berkualitas agar dapat dipertanggungjawabkan atas pembuatanan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Salah satu elemen utama yang menjadi faktor produksi atau kekuatan pada suatu organisasi sebagai pengubah *input* menjadi *output* adalah manusia atau sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu alat manajerial yang terbagi menjadi proses perencanaan, pengelolaan dan pengendaliaan atas sumber daya manusia.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Schuler, Dowling, Smart dan Huber yang diterjemahkan oleh Priyanto (2010:4), menyatakan Manajemen Sumber Daya Manusia / MSDM menyatakan pentingnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja organisasi yang berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi, serta sebagai pelaksana beberapa aspek dan aktivitas agar mampu meyakinkan bahwa sumber daya manusia telah dipergunakan dengan adil, efektif dan efisien bagi kepentingan banyak pihak baik secara individu, organisasi maupun masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengoperasikan Sumber Daya Manusia (SDM) ke dalam suatu kepercayaan interaksi yang terjalin antara jajaran

penguasa dalam organisasi dengan para tenaga kerja yang kerap mempunyai perbedaan keinginan merupakan salah satu fokus dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang harus dikendalikan. Menurut Stoner, dalam Priyanto (2010:5) pemanfaat sumber daya manusia secara profitable tanpa mengurangi perhatian pada para pekerja baik itu individual maupun kelompok dalam mewujudkan harapan organisasi merupakan cakupan dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).

Selaku kebijakan MSDM diperuntukan menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan dengan memaksimalkan efektifitas organisasi. Menurut Guest dalam Priyanto (2010:5), pengarahan pada penyatuan dasar-dasar yang mendasari keterikatan pekerja, organisasional, kefleksibelan organisasi dalam berproses dan perolehan kualitas dampak kerja yang setinggi-tingginya sehingga membentuk kebijakan yang dapat dipilih oleh organisasi untuk mengelola SDM-nya.

Merujuk pada pengertian dari beberapa ahli, berbagai macam kebijakan MSDM yang dibuat dapat diukur efektifitasnya pada bagaiamana gerak seluruh unit organisasi, sudah seberapa jauh organisasi mencapai kesatuannya, bagaimana komitmen yang terjalin oleh para pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya sudah seberapa besar, bagaimana perwujudan toleransi dengan beberapa modifikasi yang dapat mengahasilkan suatu putusan dengan cepat dan tepat tanpa berisiko, sudah sampai sejauh mana organisasi bergerak, serta bagaimana tingkat kualitas *output* yang dihasilkan organisasi sudah seberapa bagus perkembangannya.

3. Manajemen Humas

Menurut *British Institute of Public Relations,* dalam Morrisan (2008:7), menyatakan hubungan masyarakat merupakan ikatan yang

terjalin antara organisasi dengan publik-publiknya yang secara tidak langsung dan berkelanjutan dalam upaya membangun dan memelihara ikatan tersebut.

Sedangkan menurut Dominick, dalam Morrisan (2008:8) menyebutkan bahwa hal hal yang harus dimiliki oleh praktisi humas dalam melakukan pekerjaannya antara lain :

1. Opini publik memiliki kaitan erat dengan humas

   Secara paktisi memberikan opini yang positif tentang organisasi atau perusahaan merupakan salah satu upaya humas untuk mempengaruhi publik, namun disisi yang lain pihak dari humas wajib menerima baik itu kabar/cerita/sanggahan dari masyarakat di sekitarnya serta dapat menafsirkan hal tersebut yang selanjutnya dilaporkan pada manajemen apabila kabar/cerita/sanggahan yang diterima mempunyai dampak yang dapat merubah segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang menjadai putusan manajemen.

2. komunikasi memiliki kaitan erat dengan humas

   Organisasi/khalayak yang berkepentingan memeiliki hak dari praktisi humas yang mana mereka bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan/organisasi. Tak jarang penjelasan dari praktisi humas tentang perusahaan/organisasi mendorong ketertarikan khalayak. Oleh sebab itu, pikiran dan perasaan (emosi) yang tercipta dari khalayak terhadap organisasi harus menjadi perhatian yang utama dari praktisi humas.

3. Manajemen memiliki kaitan erat dengan humas

   Menentukan apa yang telah menjadi harapan serta berkeinginan untuk meraih hal tersebut dan memiliki upaya agar dapat menempatkan diri (organisasi/perusahaan) pada sebuah

lingkungan yang memiliki sifat dinamis menjadi fungsi humas dalam membantu manajemen. Saran yang membangun harus rutin diberikan kepada manajemen oleh humas, karena bagian humas memiliki kewajiban untuk mampu mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan cara dapat mengorganisir dan mengarahkan dirinya sendiri.

Merujuk pada beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mendukung dan menjaga keberlanjutan hubungan bersama baik itu yang berkenaan dengan kerjasama, komunikasi, penerimaan, dan rasa pengertian yang harus dimiliki antara organisasi dengan publiknya merupakan fungsi terbentuknya manajemen humas. Meningkatkan pembinaan kerjasama dan memenuhi kepentingan bersama dengan cara menerciptakan komunikasi dua arah yang berbalas antara kedua belah pihak (organisasi dan publik) sebagai bentuk atas dukungan akan kewajiban dan tujuan manajemen menjadi definisi dari hubungan masyarakat. Kegiatan komunikasi antara organisasi dengan masyarakat tak lain dan tak bukan merupakan prinsip dari hubungan masyarakat.

4. Keuangan Daerah

Baik pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, maupun desa dapat melaksanakan sendiri pembelanjaan dan pertanggungjawaban atas keuangan yang mereka kelola secara pribadi sendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan dari asas desentralisasi, merupakan pernyataan yang sejalan dengan penjelasan kemandirian keuangan daerah yang tercantum pada UU Nomor 32 tahun 2004. Dari penjelasan tersebut dapat diambil keismpulan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah bentuk kapabilitas suatu daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten maupun desa) sebagai upaya untuk mengelola potensi dan sumber daya dalam daerah tersebut

secara efektif dan efisien sebagai sumber eksternal selain dari pendapatan asli daerah seperti dari retribusi pemerintah dan pajak yang merupakan sumber utama yang dimanfataatkan guna membiayai kegiatan sehubung dengan pemerintah daerah.

5. Akuntabilitas Keuangan Negara

Menurut BPKP, akuntabilitas acap kali ditafsirkan sebagai komitmen untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu apabila terjadi keberhasilan / ketidakberhsailan dari pihak pemangku kepentingan negara sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dari anggaran yang telah diberikan sebagai bentuk pengelolaan dari keuangan desa yang sejalan dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk dari pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 yang telah mengatur tentang siklus untuk pengurusan pada keuangan desa, disebutkan bahwa pengurusan pada keuangan desa meliputi :

1. Perencanaan, memiliki rencana yang matang penting dipersiapkan agar dalam pengaplikasiannya dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu secara efektif, efisien, ekonomis dan tidak salah sasaran.
2. Pelaksanaan, dalam pelaksanaannya desa harus memiliki dasar umum yang menjadi pedoman yang mewajibkan siapapun wajib mentaatinya pedoman tersebut mencakup bagaimana alur pemasukan dan pengeluaran keuangan
3. Penatausahaan, yaitu kegiatan mencatat yang dikhususkan untuk dikerjakan oleh bendahara desa yang bertugas atas keuangan (transaksi pemasukan dan pengeluaran).
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Kartika, dkk (2016) akuntabilitas merupakan sebuah keharusan dari seluruh institusi-institusi di sektor publik supaya lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Dalam akuntabilitas vertikal menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjwaban pada sisi yang lebih besar atau pada pemerintah yang memiliki satu tingkatana ataupun lebih di atasnya. Sedangkan akuntabilitas horizontal menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban oleh sisi pemerintah yang berhubungan pada masyarakat tak hanya semata diberikan penjelasan berupa laporan anggaran, melainkan juga tetap perlu diberikan informasi terkait segala aktivitas yang telah dikerjakan dalam pengambilan putusan baik itu yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, maupun politik.

Selain itu pengertian akuntabilitas publik juga menyatakan bahwa seseorang/kelompok yang memberikan tanggungjawab (*principa*l) mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas apa segala sesuatu yang menjadi menjadi keharusan dari seorang/kelompok lain sebagai penerima pertanggungjawaban (*agent)* untuk menerahkan segala pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kearusannya baik itu mempertunjukkan, memberikan laporan ataupun mengungkapkan segala bentuk kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada sang pemberi tanggungjawab. Menurut Koppell (2005) dalam Nahruddin (2014) menjelaskan bhawa terdapat 5 dimensi dalam akuntabilitas. 5 dimensi tersebut terdiri dari kontrol, responsibilitas, responsivitas, liabilitas, dan transparansi. Dari beberapa dimensi yang tersirat dalam akuntabillitas terdapat 3 asas pengelolaan keuangan daerah

yang telah terpenuhi yaitu, transparansi, reabilitas dan akuntabilitas itu sendiri.

Menurut Mahmudi didalam Mada *et all* (2017) indikator akuntabilitas, yaitu :

1. Kejujuran dan Hukum, yang berisi :
   a. Kejujuran dan Keterbukaan Informasi, suatu laporan dikatakan akuntabilitas jika dalam penyusunannya dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan informasi kepada pengguna laporan tersebut.
   b. Kepatuhan dalam Pelaporan, laporan akan akuntabel jika dalam penyusunannya harus mematuhi pada aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah maupun aturan suatu organisasi tersebut.
2. Proses, yang terdiri dari :
   a. Kesesuaian Prosedur, prosedur dalam penyusunan laporannya harus sudah benar, input, proses dan outputnya.
   b. Kecukupan Informasi, informasi yang akan digunakan untuk menyusun laporan tersebut harus cukup agar laporan bisa tersusun lengkap.
   c. Ketepatan penyampaian pelaporan, laporan yang telah disusun hendaknya disampaikan dengan tepat.

2.1.1 Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dalam Edison, dkk (2016:140), menyatakan kompetensi kerja merupakan suatu kemahiran dalam bekerja yang dimiliki oleh tiap individu dan meliputi berbagai segi seperti perilaku saat bekerja, keterampilan serta ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keriteria yang diberlakukan.

Menurut Spencer dan Spencer di dalam Edison,dkk (2016:140), kompetensi merupakan sebuah perbedaan karakter yang menjadi dasar bagi tiap individu yang berkaitan dengan hubungan kausalitas atau prinsip sebab-akibat dimana dalam proses pelaksanaannya akan menciptakan pekerjaan atau keadaan efektif atau unggul.

Sedangkan menurut George di dalam Edison,dkk (2016:141), menyatakan kompetensi merupakan perbedan karakter yang menjadi dasar individ seseorang untuk memberikan hasil dari apa yang telah dikerjakan dengan efektif atau kinerja yang unggul.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kompetensi menjelaskan tentang suatu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan cara bersikap yang mendukung untuk mendasari karakteristik individu menjalanan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

2.1.1.2 Tipe Karakteristik Kompetensi

Menurut Wibowo (2017:273) terdapat lima jenis karaketristik kompetensi, yaitu :

1. Motif adalah segala sesuatu yang terus-menenrus ada dipikiran atau diinginkan seseorang secara konsisten yang dapat menimbulkan terjadinya aksi (respon). Motif mampu membimbing, mendorong serta memmberikan pilihan untuk berperilaku hingga mencapai tujuan atau aksi yang mendasarinya.
2. Sifat adalah ketika terdapat situasi atau informasi tertuntu seseorang menghasilkan karateristik fisik dan respons yang konsisten akan hal tersebut. Terdapat istilah terkait perbedaan pada fisik kompetensi seorang pilot pada peswat tempur, hal itu digambarkan bahwa

seseorang yang berada dalam kondisi tersebut (terdesak/keadaan gawat) mempunyai kecepatan reaksi dan ketajaman mata.

3. Konsep diri adalah kepemilikan yang bebrbeda antara tiap individu yang berakiatan dengan sikap, nilai-nilai, atau citra diri. Salah satu bagian dari konsep diri adalah sifat percaya diri yang berarti pada hampir setiap situasi individu tersebut berkeyakinan bahwa mereka dapat bertindak secara efektif dan efisien.
4. Pengetahuan adalah spesifikasi informasi terhadap suatu bidang tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Suatu kompetensi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pengetahuan. Prediksi akan prestasi kerja sering gagal atau kurang memuaskan apabila diukur oleh nilai/skor pada tes penegetahuan, karena dengan indikasi tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam mengukur keterampilan dan pengetahuan sesuai upaya yang seharusnya dipakai dalam pekerjaan.
5. Keterampilan adalah penyelesaian dalam menangani pekerjaan yang diterima baik secara jasmani maupun rohani yang mana tiap perorangan memiliki keterampilan yang berbeda dan didasarki pada kemampuan individu. Mampu berpikir secara analitis dan konseptual termasuk keterampilan kognitif atau kompetensi mental.

2.1.1.3 Kategori Kompetensi

Menurut Zwell (2005:25) didalam Wibowo (2017:277) menjelaskan 5 kategori kompetensi, yang mencakup :

1. *Task achievement* merupakan golongan kompetensi yang berhubungan dengan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. *Task achievement* berkaitan dengan kompetensi yang ditunjukkan

oleh : keahlian teknis, memengaruhi, inisiatif, orientasi pada hasil, efesiensi produksi, perbaikkan berkelanjutan, mengelola kinerja, peduli pada kualitas, fleksibilitas, dan inovasi.

2. *Relationship* merupakan golongan kompetensi yang berkaitan dengan bekerja dan komunikasi untuk memuaskan kebutuhan orang/individu yang lain dengan baik dan benar. Kompetensi yang berhubungan dengan *relationship* meliputi perhatian pada komunikasi, membangun hubungan, orientasi pada pelayanan, kerja sama, kepedulian antarpribadi, sensitivitas lintas budaya, kecerdasan organisasional, dan penyelesaian konflik.
3. *Personal attribute* merupakan bagaimana cara seseorang dalam menghubungkan pola belajar, merasa, berpikir, dan berkembang serta termasuk pada kompetensi intrinsik individu. *Personal attribute* meliputi kualitas keputusan, perkembangan diri, integritas dan kejujuran, berpikir konseptual, ketegasan, berpikir analitis dan manajemen stress.
4. *Managerial* merupakan kompetensi ini digolongkan dengan khusus karena berhubungan dengan pengembangaan, penyusunan, dan menagwai seseorang. Kompetensi *managerial* meliputi pemberdayaan, pengembangan, dan pemberian motivasi pada orang lain.
5. *Leadership* merupakan kompetensi yang berkaitan untuk mencapai visi, misi, maksud, dan tujuan organisas diperlukan seseorang dengan sifat dan sikap pemimpin dalam organisasi. Kompetensi *leadership* meliputi membangun fokus dan maksud, kepemimpinan visioner, membangun komitmen organisasional, manajemen

perubahan, berpikir strategis, mnegedepankan dasar-dasar dan nilai-nilai, dan orientasi kewirausahaan.

2.1.1.4 Tingkat Kompetensi

Tiap kompetensi yang terlihat pada perseorangan memiliki berbagai tingkatan. Ada beberapa tingkat kompetensi dijelaskan oleh Spencer dan Spencer di dalam Wibowo (2017:278), yang dikemukakan menjadi tiga tingkatan kompetensi :

1. *Behavioral Tool*
   a. *Knowledge* merupakan spesifikasi terhadap informasi pada suatu bidang tertentu yang dimiliki oleh seseorang.
   b. *Skill* merupakan suatu pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan baik karena kemampuan yang dimiliki.
2. *Image Attribute*
   a. *Social Role* merupakan pengaruh dari kelompok sosial atau organisasi yang mampu membentuk pola perilaku seseorang.
   b. *Self Image* merupakan harga diri, kepribadian, dan identitas yang menjadi pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri,.
3. *Personal Characteristic*
   a. *Traits* merupakan tipikal aspek dalam berperilaku.
   b. *Motive* merupakan sebuah hal/perkataan yang mampu mendorong individu untuk melakukan sesuatu dibidang tertentu.

Syarat mutlak untuk dapat dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan benar, baik dan sesuai adalah memperbaharui diri kita menjadi pribadi yang unggul adalah kompetensi. Penyetaraan penerapan atas

pemahaman terhadap visi, misi suatu organisasi merupakan salah satu pengertian kompetensi. (Wibowo, 2017:279).

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

2.1.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:679), partisipasi merupakan sejumlah individu yang secara aktif ikut serta pada suatu aktivitas, turut berperan serta. Penjelasan tentang partisipasi ini mencakup keterlibatan, peran aktif, maupun keikutsertaan individu maupun berkelompok pada suatu aktivitas tertentu.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi menjelaskan tentang keterlibatan seseorang atau lebih pada suatu aktivitas tertentu. Perlibatan yang ingin dijelaskan di sini bisa berkenaan dengan keterlibatan pemikiran, emosi yang dikeluarkan ataupun fisik yang dikerjakan dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dengan menyalurkan seluruh kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) untuk mendorong tercapainya sebuah tujuan dan tanggungjawab atas keseluruhan yang diperbuat.

H.A.R Tilaar (2009: 287) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan hasil nyata dari sebuah agan-angan yang ingin dikembangkan secara demokrasi melewati suatu cara yaitu dengan asas desentralisasi yang mana hal tersebut diupayakan jika terdapat perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengajak warga masyarakat turut aktif ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

2.1.2.2 Pengertian Masyarakat

Menurut Shadily (1993: 47) menjelaskan bahwa masyarakat menjadi kelompok besar maupun kecil yang berisikan beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya terikat secara berkelompok dan memberikan pengaruh satu sama lain.

Koentjaraningrat (1990: 147) menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi sesuai sistem adat-istiadat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain dan terjadi secara berulang-ulang atau terus menerus yang menimbulkan keterikatan pada suatu emosi identitas bersama.

Menurut Soerjono Soekanto dalam H. Gunawan Ari (1990: 4-5) terdapat 4 (empat) unsur yang ada pada masyarakat, yaitu:

a. Terdapat dua atau lebih manusia yang hidup bersama.
b. Mereka berbaur atau menjadi satu dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan tata cara pergaulan, cara berkomunikasi dan lainnya.
c. Dengan sadar telah membentuk satu kesatuan.
d. Menciptakan kebudayaan karena sistem kehidupan bersama yang terjalin.

2.1.2.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Utami dan Sofyan di dalam Hamsinar (2017), partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan peran sertanya pada aktivitas di lingkungan pemerintahan, yang memberikan dampak pada cara evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah serta peminimalisirana tindak terjadinya penyelewengan kewenangan. Partisipasi masyarakat dalam

mengusulkan sebuah ide sehubungan dengan penyusunan arah dan kebijakan rencana keuangan sangat diperlukan untuk mewujudkan anggaran yang efektif.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27), merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian permasalahan dan kejadian yang terdapat di lingkup masyarakat, pemilihan dan pengambilan putusan yang alternatif dan solutif untuk mennyelesaikan permasalahan, perwujudan gagasan sebagai upaya agar meredam permasalahan, serta keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu :

1. Partisipasi adalah masyarakat yang terlibat secara sukarela atas sebuah proyek tanpa ikut serta pada proses pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) atas meningkatnya kemauan dalam memperoleh keterampilan untuk menanggapi rencana-rencana pembangunan dari pihak masyarakat;
3. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat tanpa adanya paksaan atas perubahan dengan dasar tertentu yang mereka lakukan sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang berarti perorangan atau kelompok yang terkait menggunakan kebebasannya untuk berinisiatif mengerjakan hal tersebut;
5. Partisipasi adalah konsolidasi antara staf proyek dengan penduduk setempat dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring*

terhadap apa yang mereka sepakati, supaya mendapatkan informasi berkenaan tentang konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;

6. Partisipasi dalam pembangunan diri, lingkungan, dan kehidupan disekitar mereka yang mana ada masyarakat ikut terlibat secara aktif.

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi masyarakat di atas, bisa disimpulkan bahwa partisipasi adalah seorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang dengan akal sadar ikut aktif terlibat berkontribusi dalam program pembangunan dan juga ikut serta didalamnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* sampai pada tahap evaluasi dengan sukarela tanpa ada paksaan.

2.1.2.4 Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan dan proyek-proyek bisa gagal apabila telah berjalan tanpa adanya keikutsertaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan segala informasi berkenaan tentang kebutuhan, kedaan, dan karakter dari masyarakat setempat.
2. Apabila diikutsertakan pada proses persiapan dan perencanaan, masyarakat dapat memiliki pemikiran untuk lebih mempercayai proyek atau rencana pembangunan yang akan direalisasikan tersebut, karena mereka (masyarakat) dan pihak proyek sama-sama memiliki informasi yang sama tentang seluk-beluk proyek tersebut sehingga akan timbul rasa memiliki terhadap proyek

tersebut sebab terdapata peran masyarakat yang telah ikut campur terlibat di dalamnya;

3. Saat masyarakat diikutsertakan pada pembangunan lingkungan mereka juga secara tidak langsung merupakan bentuk dari penerapan hak demokrasi.

2.1.3 *Financial Distress*

2.1.3.1 Pengertian *Financial Distress*

Menurut Jones and Walker (2007), *Financial Distress* merupakan ketidakmampuan pihak pemerintah dalam mengadakan ketersediaan modal (kesulitan keuangan) yang mengakibatkan ketidaksanggupan dari pihak pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada khalayak ramai sebagaimana aturan yang telah ditetapkan terkait standar minimal pemberian pelayanan mutu yang sesuai.

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang bermanfaat untuk mensejahterahkan masyarakatnya adalah salah satu tujuan utama pembangunan di Indonesia, apabila terjadi ketidakmampuan pembangunan salah satu faktor penyebabnya dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana. Apabila terjadi situasi dimana tidak dapat dikenadilkannya total pengeluaran yang dilakukan pada anggaran belanja secara rutin, mampu berakibat pada pihak pemerintah daerah yang harus mengerem pengeluaran pada belanja modal ataupun investasi, penjelasan tersebut menjadi salah satu gejala *financial distress* pada pemerintah daerah. Apabila pemerintah mengalami kesulitan finansial beberapa ahli mampu mendeskripsikan bahwa pada kondisi tersebut terjadi kekurangan atau ketidaktersediaan

dana. Pemerintah pusat telah meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pinjaman Daerah sebagai jalan keluar bagi pemerintah daerah yang berada dalam situasi kesusahan dalam mengatur keuangan daerah, yaitu PP Nomor 54 Tahun 2005. Peraturan tersebut dapat diakses atau digunakan oleh pemerintah daerah apabila dalam menjalankan pemerintahannya kesulitan finansial.

Sebagai solusi kekurangan dana untuk pembiayaan pembangunan pada daerah, aturan tersebut diresmikan dengan harapan saat terjadi situasi kesulitan finansial, pemerintah daerah diperbolehkan untuk meminta pinjaman dana. Dalam aturan tersebut memuat bahwa pemerintah daerah wajib melengkapi persyaratan yang diminta sesuai pada PP Nomor 54 Tahun 2005 pasal 11 dan 12 apabila ingin melakukan pinjaman. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud, yaitu :

1. Untuk melakukan pinjaman jangka pendek, syarat yang harus dipenuhi antara lain :
   a. Pada anggaran APBD pada tahun yang bersangkutan, seluruh aktivitas yang ingin dibiayai atas pinjaman jangka pendek harus dicantumkan.
   b. Diharuskan aktivitas yang tertera memiliki sifat yang harus disegerakan/tak bisa ditunda/mendesak.
   c. Beberapa syarat lain yang diberikan oleh pemberi pinjaman.
2. Untuk melakukan pinjaman jangka menengah ataupun jangka panjang, syarat yang harus dipenuhi antara lain :
   a. Batas maksimum sebesar 75% dari total penerimaan umum APBD tahun lalu terhadap total sisa pinjaman daerah ditambah total pinjaman yang akan diambil.

b. Paling minimal sebesar 2.5 (dua koma lima) yang menjadi rasio proyeksi dari kesanggupan finansial daerah agar dapat melunasi pinjamannya.

c. Pinjaman yang telah dipinjam pada pemerintah tidak pernah dibayar lebih dari tanggal yang ditentukan (menunggak).

d. DPRD telah menyetujui atas pinjaman yang dilakukan pemerintah daerahnya.

Daerah yang tak diberikan izin untuk melakukan pinjaman daerah apabila memiliki alasan yang tak sesuai dengan syarat yang telah diberlakukan dalam peraturan pemerintah, seperti alasan mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu untuk mengembalikan hutang pokok maupun bunga atas hutangnya. Dalam situasi tersebut peneliti akan menetapkan daerah tersebut dengan status mangalami situasi kesulitan keuangan atau *financial distress* dikarenakan pada pemerintah daerah tersebut memiliki situasi dimana pengelolaan keuangan tidak sesuai sebagiamana mestinya. Situasi tersebut dapat terjadi apabila amanah yang disampaikan oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu dilaksanakan secara optimal akibat ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya sebagaimana mestinya sesuai apa yang telah diamanahkan.

2.1.3.2 Dana Desa

PP RI No. 8 Thn 2016 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikhusukan bagi desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta

diperuntukkan untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran APBN untuk dana desa terjadi atas perintah dari pemerintah Kab/Kota untuk menyalurkan dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225 Tahun 2017 pasal 99 menyatakan bahwa, penyaluran dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan, dengan aturan sebagai berikut :

a. Tahap I sejumlah 20% (dua puluh persen), penyaluran tercepat terjadi di bulan Januari dan terlambat pada minggu ketiga bulan Juni;
b. Tahap II sejumlah 40% (empat puluh persen), penyaluran tercepat terjadi di bulan Maret dan terlambat pada minggu keempat bulan Juni; dan
c. Tahap III sejumlah 40% (empat puluh persen) penyaluran tercepat terjadi di bulan Juli.

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilaksanakan selama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD. Syarat penyaluran dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225 Tahun 2017 pasal 100, yaitu:

a. Tahap I berupa:
   1. Terdapat surat pemberitahuan yang berisi bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan sudah menyampaikan Peraturan Daerah berkenaan dengan APBD tahun anggaran berjalan; dan

2. Peraturan Bupati/Wali kota terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada tiap desa;

b. Tahap II berupa:

1. Pemberian laporan realisasi penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Pemberian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dari Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya; dan

c. Tahap III berupa:

1. Pemberian laporan realisasi penyaluran Dana Desa hingga tahap II; dan
2. Pemberian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dari Dana Desa hingga tahap II.

Laporan realisasi penyaluran menunjukan nilai minimum sejumlah 75% dari Dana Desa yang didapatkan di RKUD yang telah disalurkan ke RKD. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan bentuk penerimaan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan:

a. Aturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa, yang menjadi *output* dari Tahap I;
b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, yang menjadi *output* Tahap II; dan
c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian penegluaran Dana Desa hingga tahap II dari Kepala Desa, yang menjadi *output* Tahap III.

Apabila Bupati ataupun Walikota tak mampu menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa hingga tidak tersalurkan dan

tersebut akan menjadi sisa Dana Desa di RKUN, lalu sisa dana tersebut tak dapat ditransferkan ulang untuk dikirimkan di tahun selanjutnya.

2.1.4 Hubungan Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa

Sebaik-baiknya keberhasilan pengelolaan dana baik itu sektor publik atau sektor perusahaan adalah yang mentaati asas atau aturan yang berlaku, dalam keuangan desa untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran harus terpenuhi. Salah satunya dapat didukung oleh kompetensi seorang perangkat desa dengan akuntabilitas pengelola dana desa yang baik agar penyaluran alokasi dana desa sesuai kebutuhaan masyarakat dan melakukan transparansi tentang penggunaan dana tersebut pada masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ekasari (2017), dengan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan pada akuntabilitas pegelolaan Dana Desa serta penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017), mengungkapkan bahwa kompetensi aparat pengelola Dana Desa memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian tersebut memiliki arti bahwa, kompetensi perangkat desa yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mampu memberikan pengaruh pada pengelolaan dana desa dan apabila pengelolaan dana tersebut dilaksanakan secara optimal dengan meninjau secara langsung apa yang diperlukan, hal itu bisa mencegah pembelanjaan pada kebutuhan yang

tidak perlu sehingga risiko *financial distress* dapat terhindar karena perangkat desa telah meninjau kebutuhan mana yang tergolong *urgent* untuk dibenahi saat ini. Selain itu

2.1.5 Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa

Pada pengelolaannnya penggunaan dana desa harus diawasi untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan, oleh sebab itu dalam pengambilan tiap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa pihak perangkat desa harus melibatkan beberapa perwakilan masyarakat agar dapat iikut berpasrtisipasi di dalamnya. Selain itu perlibatan masyarakat juga berguna agar dalam proses pengalokasiaan dana desa terasa lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan segala arah kegiatannya Mada, et all (2017). Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Julianto dan Dewi (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Kesuksesan (berhasil) dalam pengelolaan dana desa ini tercermin dari keberhasilan pemberian layanan yang berkualitas dalam segala kondisi yang mana hal tersebut tidak bisa terwujud oleh pihak perangkat desa perlu didukung juga oleh masyarakat.

2.1.6 Hubungan Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Mayarakat terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa

Menurut Jones dan Walker (2007), indikator non keuangan pertama yang mampu menimbulkan terjadinya *financial distress* di sektor publik adalah karakteristik anggota dewan pemerintah. Karakteristik dewan dapat diartikan sebagai sifat atau sikap dewan pemerintah itu senidiri apakah

dengan karakteristik yang beragam dan diikuti dengan kontrol yang baik dapat mencegah terjadinya *financial distress*. Karena keberagaman karakteristik yang dimiliki diperlukan adanya kontrol atas anggota dewan yang mampu tercermin dalam penilaian kompetensi anggota dewan yang dalam skripsi ini diwakilkan oleh kompetensi perangkat pengelola dana desa. Apabila kompetensi atas keberagaman karakteristik ini dapat berjalan dengan baik hal itu akan membawa dampak pada keberhasilan perangkat desa dalam pencegahan terjadinya *financial distress*. Setelah keberagaman karakteristik ini menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan hal tersebut akan diikuti dengan pemberian layanan kepada masyarakat yang baik pula sehingga secara tidak langsung terjadi proses umpan balik dari masyarakat yang merasa puas atas layanan yang diberikan. Penjelasan tersebut termasuk dalam indikator non keuangan kedua terjadinya *financial distress* di sektor publik yaitu pemberian layanan publik. Pemberian pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat akan memberikan loyalitas kepada masyarakat, seperti apabila layanan publik sehubungan dengan anggran dana desa yang diberikan oleh perangkat desa sejalan dengan apa yang dikehendaki masyarakat hal tersebut akan menarik simpati masyarakat untuk mempertahankannya. Oleh karenanya, kompetensi dalam pemberian pelayanan sehubungan dengan dana desa akan menarik masyarakat untuk ikut serta mewujudkn pelayanan yang berjalan secara semestinya, sehingga pencegahan *financial distress* dapat terwujud dari kompetensi perangkat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat.

Dalam *financial distress* apabila terdapat indikator non keuangan tentu terdapat indikator keuangan yang meliputi besaran dana yang telah dialokasikan dan rasio kinerja keuangan. Agar indikasi *financial distress*

dalam sektor keuangan tidak terjadi perlu diperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Teori *agency* menggambarkan hubungan *agent* (Perangkat Pengelola Dana Desa) dan *principal* (Bupati). Agen memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada prinsipal. Denga memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut maka agen telah menjalankan asas akuntabilitas. Jadi pencegahan *financial distress* dapat diperngaruhi oleh kompetensi perangkat pengelola Dana Desa dan partipasi masyarakat sebagai tangan kanan Bupati yang telah memberikan mandat untuk mengelola Dana Desa yang diberikan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi fokus utamanya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel Universitas Sam Ratulangi (2015)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Hasil riset ini melaporkan bahwa: 1. Kompetensi petugas pengelola anggaran dusun mempunyai akibat dengan cara positif serta penting pada akuntabilitas pengurusan anggaran dusun. 2. Komitmen badan penguasa dusun mempunyai akibat dengan cara positif serta penting pada akuntabilitas pengurusan anggaran dusun. 3. Kesertaan warga mempunyai akibat dengan cara positif serta penting pada akuntabilitas pengurusan anggaran dusun.
I Putu Julianto, Gusti Ayu Ketut	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rencana Sari Dewi Universitas Pendidikan Ganesha (2019)	Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	1. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada keberhasilan pengelolaan dana desa, 2. Penggunaan Siskeudes memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada keberhasilan pengelolaan dana desa, 3. Kompetensi pendamping desa memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada keberhasilan pengelolaan dana desa, dan 4. Komitmen pemerintah daerah memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada keberhasilan pengelolaan dana desa.
Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto. Universitas Padjajaran (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Partisipasi penganggaran memiliki pengaruh secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Mirna Indriani, Nadirsyah, Heru Pahlevi, Safrida Putri. Universitas Syiah Kuala (2019)	Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar	Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan desa.
Novica Indriaty. Universitas Sebelas Maret (2016)	Prediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Rasio *Short Term Liabilities / Own Revenue* (STL/R) memiliki pengaruh secara positif dalam memprediksi *Financial Distress* 2. *Profit Margin* (PM) memiliki pengaruh secara positif dalam

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		memprediksi *Financial Distress.* 3. Opini audit BPK. memiliki pengaruh secara positif dalam memprediksi *Financial Distress.* Sedangkan keenam variabel lainnya yaitu rasio Total *liabilities* / total assets (L/A), Debt to revenue ratio (DEBTREV), *Operating revenues to operating expenses* (OR/OE), *Inter-governmental revenue ratio* (IGR), *Operating expenses to own revenues ratio* (OE/R) dan populasi penduduk (POP) tidak mampu memprediksi *financial distress*.
Stewart Jones and R. G. Walker (2007)	Explanators of Local Government Distress	Dalam penelitian ini menyatakan bahwa *the explanatory variables* yang terdiri dari *council characteristics, infrastructure variables*, dan *financial variables* berpengaruh secara signifikan terhadap *local service delivery.*
Mutiara Sari dan Fefri Indra Arza. Universitas Negeri Padang (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Hanya 231 pemerintah daerah yang tidak mengalami *Financial Distress* sedangkan sisanya 441 mengalami *Financial Distress.* 2. Kemandirian keuangan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada *Financial Distress.* 3. Jumlah penduduk memiliki pengaruh secara secara positif dan signifikan pada *Financial Distress.* 4. Luas wilayah memiliki pengaruh secara positif dan signifikan pada *Financial Distress.* Sedangkan derajat desentralisasi memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan pada *Financial Distress.*

Sumber : Data Diolah Peneliti

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, landasan teori dan serta permasalahan yang telah dikemukakan, penentuan hipotesis, penulis membuat model penelitian yang disajikan dengan kerangka pemikiran yang tertuang dalam gambar berikut :

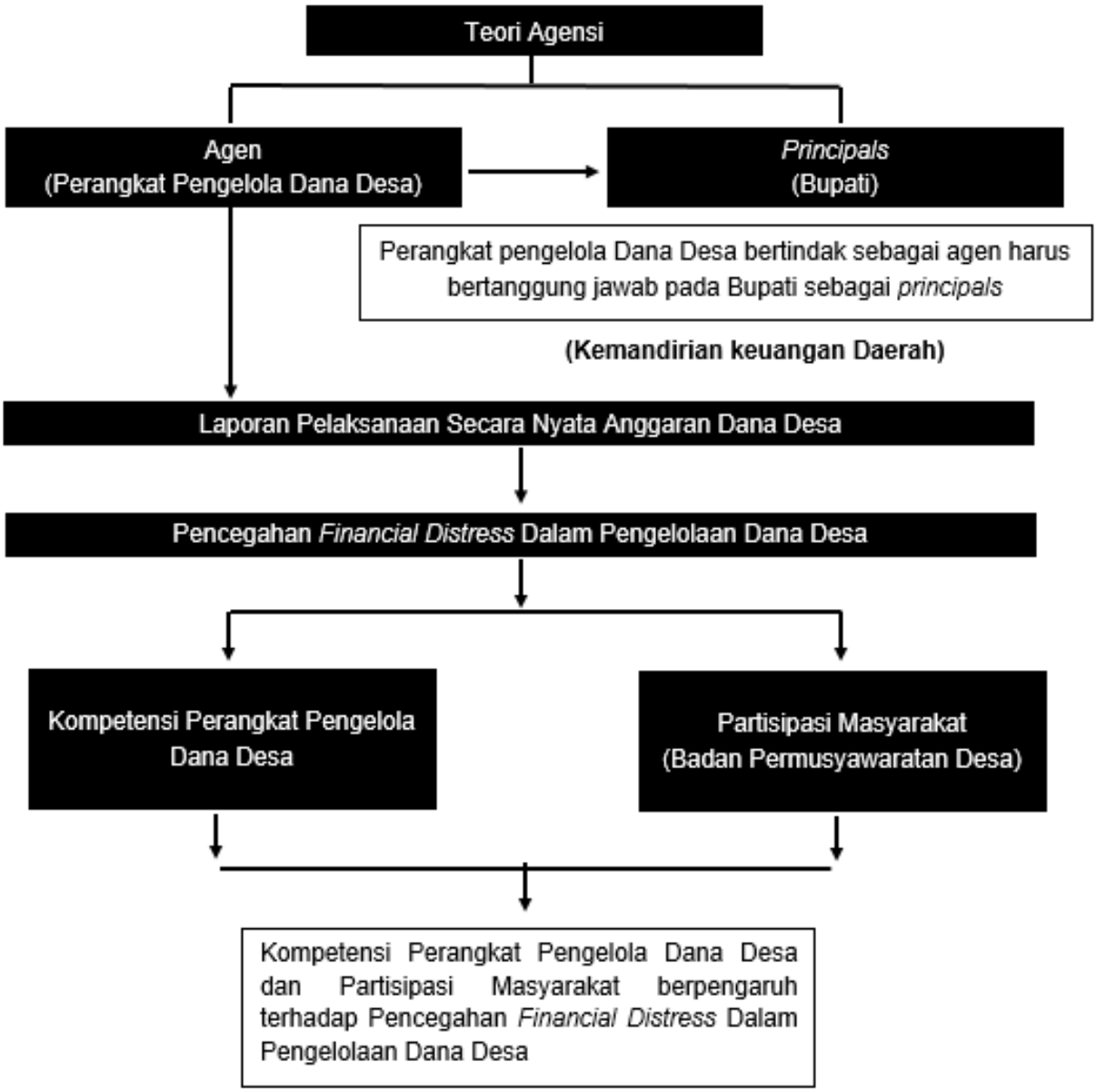

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan sementara atas rumusan masalah yang dibuat pada suatu penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban tepatnya dapat diajwab stelah menganalisisnya dengan menggunakan teori. Adapun pengertian hipotesisi menurut Sugiyono (2017:63), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dibuat berbentuk sebuah kalimat pertanyaan. Pada penelitian ini rancangan hipotesisnya, yaitu :

H1 : Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa.

H2 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa.

H3 : Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian asosiatif-deskriptif adalah jenis penelitian yang dipergunakan untuk melakukan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017:35), pendekatan penelitian deskrptif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan agar peneliti dapat memahami dimana letak variabel, berlaku untuk seluruh variabel baik pada satu atau lebih variabel bebas serta mencari hubungan antar variabel bebasnya.

Untuk memahami bagaimana sifat dan hubungan yang lebih kompleks antara dua atau lebih variabel untuk suatu penelitian dengan cara melakukan studi pada objek-objek tertentu secara mendalam agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ada, penjelasan tersebut menjadi tujuan dari pendekatan penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melihat hubungan antar dua atau lebih variabel. Kemudian, hubungan antar dua variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan standar-standar nilai statistika yang relevan yang selanjutnya akan digunakan untuk pengujian hipotesis pada penelitian dan diproses untuk mengahasilkan kesimpulan berkenaan tentang permasalahan yang menjadi inti dari penelitian.

Metode penelitian kuantitatif, menjadi metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasari pada filsafat positivisme, yang mana jenis metode penelitian ini digunakan untuk meneliti sampel pada populasi tertentu, mengumpulkan data dengan instrumen penelitian,

melakukan analisis data yag bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk melakukan pembenaran atas uji hipotesis yang telah peneliti buat. Jenis penelitian deskriptif-asosiatif dan metode penelitian kuantitatif digunakan peneliti untuk penelitian ini, karena peneliti ingin melihat, menganalis dan mengartikan bagaimana hubungan yang terjadi antar variabel independen (Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat) dengan variabel dependen (Pencegahan *Financial Distress* Perangkat Pengelolaan Dana Desa) apakah sudah sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi merupakan generalisasi dari suatu tempat yang terdiri atas : objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakter berbeda yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh perangkat desa yang mengelola dana desa pada Kantor Desa yang masuk di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel merupakan persentase dari nilai dan karakter yang dipunyai oleh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dipergunakan merupakan *Non-Probability Sampling. Non-Probability Sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sampel dengan tidak memperkenankan adanya peluang/kesempatan yang sama pada tiap unsur yang menjadi anggota populasi untuk bisa dipilih sebagai anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah *sampling purposive*.

Sugiyono (2017:85) menjelaskan tentang sampling *purposive* sebagai suatu teknik untuk menentukan anggota sampel dengan perimbangan tertentu.

Berdasarkan populasi yang terdapat pada penelitian ini, sampel yang diambil juga akan dipilih menjadi siapa saja yang akan lolos dan berhak menjadi responden. Adapun pengertian responden menurut Arikunto (2013:10), merupakan beberapa individu/kelompok yang mampu memeberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan peneliti (tertulis ataupun lisan). Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria dalam *purposive sampling,* yaitu :

A. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Thn 2018. Pengelola Keuangan Desa terdiri dari :
   a. Kepala Desa.
   b. Sekretaris Desa
   c. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)
B. Partisipasi Masyarakat yang dipergunakan dalam penelitian ini diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada penelitian ini yang menjadi sampel ini adalah perangkat desa yang terdiri 9 Kepala Desa, 9 Sekertaris Desa, 9 Kaur Umum, 9 Kaur Keuangan, 9 Kaur Perencanaan, 9 Kasi Kesejahteraan, 9 Kasi Pelayanan, 9 Kasi Pemerintahan, dan 63 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berasal dari sembilan Desa tersebut terdiri dari Desa Ngijo, Desa Tawangargo, Desa Girimoyo, Desa Ampeldento, Desa Bocek, Desa Tegalgondo, Desa Kepuharjo, Desa Donowarih, dan Desa Ngenep.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Variabel

Variabel yang dipergunakan pada penelitian ini terbagi menjadi variabel independen dan variabel dependen. Pada dasarnya variabel independen akan memberikan pengaruh pada variabel dependen, baik negatif ataupun positif. Sugiyono (2017:39), menjelaskan variabel penelitian menjadi suatu karakter/penilaian dari individu, objek, ataupun aktivitas memiliki jenis-jenis tertentu yang ditunjuk oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada suatu penelitian, operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala pada sejumlah variabel yang terlibat dalam penelitian. Tujuan dari operasional variabel untuk mempemudah dan memberikan arahan pada perangkaian alat ukur data yang dibutuhkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian. Melihat dari judul yang akan diteliti, bisa diketahui bahwa variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas dua variabel independen dan satu variabel dependen.

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel independen biasa dikatakan sebagai varibel *stimulus, prediktor, antecedent.* Yang jika di bahasa Indonesia menjadi variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh atau yang menjadi sebab adanya perubahan atau terjadinya reaksi pada variabel dependen (terikat).

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah :

a. Variabel independen kesatu (X_1) yaitu Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa

b. Variabel independen kedua (X_2) yaitu Partisipasi Masyarakat

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel dependen biasa dikatakan sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Yang jika di bahasa Indonesia menjadi variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mendapat/menerima pengaruh atau yang menjadi akibat, dikarenakan interaksi dengan variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa.

3.3.2. Definisi Operasional

3.3.2.1 Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi adalah kemampuan seseorang agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dan dilandasi oleh tuntutan atas sikap kerja yang terjadi pada perseorangan tersebut (Wibowo, 2017). Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, Desa sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai wewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahannya dalam batas wilayah tertentu, berdasarkan dengan kepentingan masyarakat setempat, ataupun hak-hak yang diyakini dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia

Perangkat Pengelola Dana Desa adalah bagian dari Perangkat Desa. Perangkat Desa memiliki tugas untuk meringankan beban Kepala Desa pada saat menjalankan tugas dan kewewenangnya. Salah satunya yaitu mengelola dana desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50, persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa yaitu :

1. Pendidikan terendah SMA/SMK/Sederajat;

2. Memiliki usia minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Tercatat sebagai penduduk desa dan tinggal di desa tersebut minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Persyaratan lain yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Edison,dkk (2017:143) seorang pegawai wajib melengkapi indikator agar mampu menguasi unsur kompetensi tersebut. Indikator tersebut, yaitu :

a. Pengetahuan (*Knowledge*), ilmu pengetahuan yang dimiliki dari pembelajaran secara resmi (sekolah/lembaga pendidikan) ataupun dari pelatihan-pelatihan atau kursus yang terkait pada bidang pekerjaan yang dikuasainya.
b. Keahlian (*Skill*), keahlian atau yang biasa disebut keterampilan adalah apabaila individu sedang melayani bidang pekerjaan yang dikuasainya dan dapat menyelesaikannya tanpa ada celah (detail). Meskipun demikian, selain ahli ia diwajibkan mempuyai kemampuan (*Ability*) dalam menyelesiakan seumber permasalahan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien.
c. Sikap (*Attitude*), memuliakan tindakan seseorang/kelompok yang memperhatikan etika organisasi serta selalu bersikap positif (ramah dan sopan) dalam bertindak. Sikap ini tak dapat dibagi kepada orang lain, karena agar dapat melaksanakan tugas dan melaksanakan pekerjaan dengan benar maka sikap ini tergolong penting bagi usaha jasa/pelayanan, atau mengakibatkan dampak yang buruk pada citra organisasi.

Berdasarkan indikator tersebut, pengetahuan, keahlian, dan sikap merupakan salah satu tolak ukur yang menunjukan bahwa seseorang itu kompeten dalam bidangnya.

3.3.2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan hak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dalam pengambilan keputusan proses kepemerintahan agar dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dimana masyarakat dapat memberikan kritikan ataupun masukan terhadap pemerintah (Utami dan Sofyan, 2013).

Pembangunan desa tidak bisa berjalan dengan baik (berhasil) apabila yang mendukung hanya satu elemen saja. Pernyataan tersebut berarti, pada proses pembangunan desa tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab atau keharusan dari pemerintah desa saja, akan tetapi juga menginginkan dukungan/campur tangan atau partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat pada proses pembangunan sangat penting, secara general partisipasi masyarakat adalah bentuk atas kepedulian, kepekaan, kesadaran ataupun tanggung jawabdari masyarakat atas pentingnya pembangunan dengan harapan agar tujuan bersama dapat terwujud. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga diperlukan agar pengembangan sinergi dalam hubungan antar pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya sinergi antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tiap pembangunan di desa diwajibkan untuk mengikutsertakan masyarakat pada proses pembahasan, program pembangunan, hingga evaluasi. sebab yang harus menerima manfaat dari tiap pembangunan di desa adalah semua masyarakat yang tinggal dalam desa tersebut.

Menurut Sujarweni didalam Mada et all (2017) terdapat indikator bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, antara lain :

1. Pengambilan Keputusan , yang terdiri dari :
   a. Keterlibatan dalam pemungutan putusan sehubungan dengan strategi pembangunan
2. Penyusunan Anggaran, yang terdiri dari :
   a. Memberikan usulan sehubungan dengan rancangan anggaran
   b. Ikut serta pada sidang paripurna
3. Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari :
   a. Turut serta dalam melakukan pengawasan dan pelaporan
   b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran
   c. Memberi sebuah *reward* / hadiah

Partisipasi masyarakat menjadi sebuah poin utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, faktanya hanya beberapa dari masyarakat yang ikut terlibat secara aktif pada proses terselenggaranya pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD) serta pelaksanaan kebijakan. Seharusnya masyarakat ikut aktif dalam melakukan evaluasi terlebih lagi yang berhubungan dengan pembangunan desa dan alokasi keuangan dana desa karena yang menikmati dana desa bukan hanya salah satu pihak tetapi juga seluruhnya masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini diwakilkan oleh BPD (Badan Permusyaratan Desa) yang mana bertindak sebagai badan legislatif dalam pemerintahan desa yang

bertugas untuk menyepakati/menyeujui peraturan perudang-undangan yang nantinya akan ditetapkan oleh Kepala Desa. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9 tentang Badan Permusyaratan Desa, persyaratan untuk menjadi calon anggota BPD, yaitu :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengerjakan aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Minimal berusia 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Pendidikan terakhir minimal SMP/Sederajat;
5. Bukan merupakan anggota perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia menjadi anggota BPD;
7. Tidak sedang menerima hukuman atau dakwaan;
8. Perwakilan dari warga desa setempat yang dipilih secara demokratis;
9. Sehat jasmani, rohani dan terbebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;

3.3.2.3 Financial Distress

Menurut Jones and Walker (2007), *Financial Distress* merupakan ketidakmampuan pihak pemerintah dalam mengadakan ketersediaan modal (kesulitan keuangan) yang mengakibatkan ketidaksanggupan dari pihak pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada khalayak ramai sebagaimana aturan yang telah ditetapkan terkait standar minimal pemberian

pelayanan mutu yang sesuai. Ketidasanggupan pemerintah ini bisa dikarenakan pemerintah kekurangan ketersediaan dana yang digunakan untuk investasi pada infrastruktur yang mana nantinya juga bermanfaat sebagai upaya pelayanan pada publik. Jones dan Walker (2007) memakai dua indikator untuk mengindikasi terjadinya *financial distress* pada negara bagian Australia. Indikator tersebut mencakup indikator keuangan dan indikator non keuangan. Indikator keuangan, terdiri dari :

1. Banyaknya dana yang dapat dialokasikan udengan tujuan pembangunan infrastruktur pelayanan publik,
2. Rasio-rasio kinerja keuangan.

Sedangkan indikator non keuangan, terdiri dari :

1. Karakter dari pejabat anggota pemerintahan,
2. Kualitas pemberian layanan pada publik.

Tabel 3.1

Indikator dan Pernyataan Terkait Dengan Kuesioner Untuk Variabel Penelitian.

Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Kode
Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1)	Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 didalam Edison, dkk (2017:140), menyatakan: Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Pengetahuan	Saya mengetahui dan memahami peraturan yang ada di Desa.	X 1.1
			Sebagai perangkat pengelola Dana Desa saya sangat mengetahui dan memahami bagaimana arah Dana Desa akan direalisasikan.	X 1.2
			Sebagai perangkat pengelola Dana Desa saya perlu mengikuti pelatihan untuk mengelola Dana Desa dengan baik.	X 1.3
		Keterampilan	Saya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang	X 1.4

			timbul dalam pekerjaan yang saya tangani.	
			Saya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani	X 1.5
			Pendidikan terakhir yang saya tempuh membantu saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari	X 1.6
		Sikap	Saya berlaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di tempat saya bekerja.	X 1.7
			Saya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat dan perangkat desa yang lainnya.	X 1.8
			Saya tidak senang menerima kritik saran dari masyakarat.	X 1.9
		Efektivitas	Kompetensi yang saya miliki sebagai perangkata pengelola Dana Desa dapat meningkatkan efektivitas saya dalam menyelesaikan tugas.	X 1.10
			Kompetensi yang saya miliki dapat meningkatkan kualitas saya sebagai perangkat desa yang mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu	X 1.11
			Secara keseluruhan, kompetensi yang saya miliki berguna untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada saya.	X 1.12

Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Kode
Partisipasi Perwakilan Masyarakat (X2)	Menurut Utami dan Efrizal (2013) didalam Hamsinar, 2017 partisipasi masyarakat adalah : keterlibatan peran sertanya masyarakat	Pengambilan Keputusan	Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa	X 2.1
			Setiap keputusan yang akan dilakukan selalu dirundingkan	X 2.2

	dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.		dahulu dengan perwakilan masyarakat.	
			Selama pengambilan keputusan suasana berlangsung tenang.	X 2.3
		Penyusunan Anggaran	Saya selalu menghargai perwakilan masyarakat (BPD) yang mengusulkan rencana anggaran.	X 2.4
			Saya merasa perlu adanya perwakilan masyarakat (BPD) dalam rapat penyusunan anggaran.	X 2.5
			Tanpa adanya campur tangan perwakilan masyarakat (BPD) di dalam rapat kita akan kesusahan dalam melihat apa yang sedang dibutuhkan untuk pembangunan program desa.	X 2.6
		Pelaksanaan Anggaran	Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam mengawasi dana desa.	X 2.7
			Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam melaporkan dana desa.	X 2.8
			Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) sangat diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.	X 2.9
		Kepercayaan	Saya percaya tentang segala informasi terkait anggaran Dana Desa, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.	X 2.10
			Saya percaya bahwa pengalokasian Dana Desa dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang baik.	X 2.11

			Saya percaya pengalokasian Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, karena pihak yang menanganinya kompeten, terpercaya, dan berintegritas.	X 2.12

Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Kode
Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Y)	Menurut Jones dan Walker (2007) *financial distress* pemerintah didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.	Kejujuran dan Hukum	Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat.	Y 1.1
			Saya melakukan pelaporan relaisasi penggunaan dana desa sesuai dengan PP No 60 Tahun 2014	Y 1.2
			Laporan Realisasi penggunaaan dana desa disampaikan tepat waktu.	Y 1.3
		Proses Pelaksanaan	Berdasarkan PP No 60 tahun 2014, saya harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.	Y 1.4
			Berdasarkan PP NO 60 tahun 2014, laporan realisasi dana desa dilaporankan dua (2) kali dalam satu tahun.	Y 1.5
			Laporan realisasi dana desa yang saya berikan telah sesuai dengan realisasinya.	Y 1.6
		Kondisi Keuangan	Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat telah dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.	Y 1.7
			Dana desa telah dimanfaatkan secara optimal dan tidak pernah terjadi *financial distress* (kesulitan keuangan).	Y 1.8

			Masyarakat setempat sangat puas dengan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat pengelola Dana Desa	Y 1.9
		Penyelesaian Masalah	Selama pelaksanaan program Dana Desa tidak pernah terjadi masalah selama pengerjaannya.	Y 1.10
			Masalah dalam pengelolaan keuangan Desa perlu didiskusikan dengan perwakilan masyarakat (transparansi).	Y 1.11
			Perwakilan masyarakat dan perangkat desa adalah satu kesatuan yang penting dalam kemajuan sebuah desa.	Y 1.12

Sumber : Data Diolah

3.4 Pengukuran Variabel : Skala Likert

Alat ukur yang dipergunakan pada penelitian ini memakai skala ordinal. Skala ordinal ialah salah satu jenis perhitungan yang bisa digunakan untuk menjelaskan tingkatan antar peringkat, namun memiliki kelemahan di jarak atau interval antar peringkat sebab hasil yang didapat belum bisa diperhitungkan atau masih belum jelas. Untuk mendapatkan nilai pengukuran atas sikap dalam penyebaran kuesioner, peneliti memakai skala likert. Sugiyono (2017:93), skala likert dapat dipakai sebagai alat untuk menghitung persepsi, asumsi, ataupun sikap individu bahkan kelompok masyarakat terkait kejadian yang terjadi di lapangan.

Penilaian ini difokuskan pada pertanyaan yang tertera dalam kuesioner, yang mana peneliti telah memberikan opsi jawaban atas sejumlah pertanyaan yang akan diajukan pada responden. Menurut Sugiyono (2017:93) penilaian skala likert terdiri dari :

Tabel 3.2
Pilihan Jawaban

Jawaban Atas Pertanyaan	Keterangan Jawaban
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
KS	Kurang Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber : Data Diolah

Selanjutnya jawaban atas kuesioner yang telah dikembalikan akan diberikan skor/nilai masing-masing ditiap alternatif jawaban pada daftar pertanyaan yang diberikan pada responden sesuai dengan bobot masing-masing. Berdasarkan Sugiyono (2017:94), yaitu :

Tabel 3.3
Skor Jawaban

Jawaban Pertanyaan	Keterangan Jawaban	Skor Pertanyaan Positif	Skor Pertanyaan Negatif
SS	Sangat Setuju	5	1
S	Setuju	4	2
KS	Kurang Setuju	3	3
TS	Tidak Setuju	2	4
STS	Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber : Sugiyono (2017:94)

Setelah diberi skor/nilai pada jawaban tiap responden, kemudian akan dilanjutkan dengan akumulasi jawaban kuesioner dan dibandingkan dengan

akumulasi jawaban yang diinginkann, lalu akan dikalikan 100%. Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto dalam Riska (2018) :

$$\frac{\Sigma\, Jawaban\ Kuesioner}{\Sigma\, Jawaban\, Yang\ Diharapkan}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka akan diperoleh patokan pada penetapan keputusan dengan memakai presentase yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto (2013:44) sebagai berikut :

1. Jika memiliki kesesuaian nilai dari 81% - 100% : Sangat Baik
2. Jika memiliki kesesuaian nilai dari 61% - 81% : Baik
3. Jika memiliki kesesuaian nilai dari 41% - 60% : Cukup
4. Jika memiliki kesesuaian nilai dari 21% - 41% : Kurang
5. Jika memiliki kesesuaian nilai dari 0% - 21% : Sangat Kurang

3.5 Sumber Data

Ada dua perihal yang bisa memberikan pengaruh pada kualitas data hasil penelitian, ialah kualitas instrumen penelitian serta kualitas pengumpulan data. kualitas instrumen penelitian berhubungan dengan validitas serta reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berhubungan terhadap kepastian teknik-teknik yang dipergunakan pada proses pengumpulan data. Sebelum diproses menjadi penjelasan informatif dan menjawab hipotesis penelitian, data wajib dimiliki oleh seorang peniliti karena data menjadi hal pokok yang dipergunakan pada penelitian. Data penelitian boleh bersumber dari berbagai macam subjek/objek yang didapatkan dengan memakai beberapa teknik pengumpulan data saat proses penelitian berjalan. sumber data dalam penelitian merupakan data primer dan teknik pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan kuesioner.

3.5.1 Data Primer

Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data bersumber primer. Sugiyono(2017:137), sumber primer merupakan sumber data yang nyata diberikan pada pegumpul data. Data primer yang digunakan pada penelitian, diperoleh langsung dari responden yaitu Perangkat Pengolala Dana Desa dan BPD di Desa yang terdapat diKecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3.5.2 Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuisioner. Sugiyono (2017:142) menyatakan kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang dipakai dengan menanyakan sejumlah pertanyaan/pernyataan secara tertulis pada responden yang nantinya harus diisi.

Kuesioner pada penelitian ini, menyajikan format pernyataan tertutup yang berarti peneliti mengarahkan responden untuk menjawab atau memberikan pendapat sesuai dengan pilihan jawaban yang disediakan pada lembar kuesioner. Adapun, penyebaran kuesioner akan dilakukan secara *offline* dengan mendatangi responden yang merupakan Perangkat Pengelola Dana Desa dan BPD dari sembilan desa yang terdapat di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang terdiri dari Desa Tegalgondo, Desa Ngijo, Desa Ampeldento, Desa Tawangargo, Desa Girimoyo, Desa Bocek, Desa Kepuharjo, Desa Ngenep serta Desa Donowarih.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini terbentuk menggunakan dua variabel bebas yaitu Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat

(X2) dengan satu variabel terikat yaitu Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Y). Berdasarkan variabel tersebut untuk melakukan analisis atas pengujian data yang akan dilakukan, terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan antara lain :

1) Memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner terkait variabel X dan variabel Y kepada responden yaitu perangkat pengelola dana desa yang mengelola dana desa pada kantor desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Karangploso dan masyarakat yang diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada tiap desa di Kecamatan Karangploso.
2) Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan tabulasi data berdasarkan variabel.
3) Lalu tahap selanjutnya melakukan analisis statistik yang pertama dengan uji keabsahan data menggunakan uji validitas dan uji reliabilities. Kedua melakukan metode PCA untuk membentuk kelompok variabel baru yang intensitasnya lebih kecil. Ketiga dilakukan uji analisis data untuk melihat hasil regresi dan koefisien determinasi. Keempat malakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data tidak mengalami masalah normalitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Dan yang terakhir mealkukan pengujian hipotesis untuk menarik kesimpulan akhir pada penelitian ini dengan uji pasrsial (uji T) dan uji simultan (uji F) dengan menggunakan bantuan laptop dan *Software Microsoft Excel* 2013 serta *Program SPSS statistics* V. 25.0

3.6.1 Pengujian Keabsahan Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Data yang valid dapat diartikan sebagai alat ukur yang dipakai guna memperoleh data (ukuran) adalah valid. Data yang valid diartikan

sebagai data yang didapatkan mampu dipergunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur (Sugiyono, 2017:121). Sedangkan pendapat Ghozali (2016:152) uji validitas dipakai untuk mengukur kevalidan ataupun kesahan pertanyaan dalam kuesioner sehingga bisa menjelaskan sesuatu yang akan diukur menggunakan kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen bisa digunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*. Sugiyono (2017:183) dengan rumus, yaitu :

$$r = \frac{n\Sigma_{x_y} - (\Sigma_x)(\Sigma_y)}{\sqrt{\{n\Sigma_{x^2} - (\Sigma_x)^2\}\{n\Sigma_{y^2} - (\Sigma_y)^2\}}}$$

Keterangan :

r : Nilai Koefisien Korelasi

Σx : Jumlah pengamatan variabel x

Σy : Jumlah pengamatan variabel y

Σxy : Jumlah hasil perkalian variabel x dan y

Σx^2 : Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel x

Σy^2 : Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel y

n : Jumlah responden

Ghozali (2016:54) menjelaskan jika uji validitas bisa dikerjakan melalu penggunaan korelasi bivariate antar tiap-tiap poin di tiap indikator di total nilai yang konstruk, lalu dibandingkan pada nilai yang dihasilkan r_{tabel}. Cara pengambilan keputusannya, yaitu :

1. Jika r hitung ≥ r tabel, maka butir pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid.
2. Jika r hitung ≤ r tabel, maka butir pertanyaan pada kuesioner dikatakan tak valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017:130) menjelaskan jika pengujian reliabilitas dapat dikerjakan dengan internal/ekternal. Apabila dengan eksternal pengujian yang dikerjakan dengan melihat hasil dari *test-retest (stability), equivalent*, ataupun penggabungan dari keduanya. Sedangkan apabila ingin dengan internal pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konsistensi pada tiap macam pertanyaan yang disajikan dan menggunakan teknik tertentu. Pada penelitian, pengujian reliabilitas instrumen menggunakan *internal consistency*, yang mana pada intrumen pengujian hanya akan dilakukan sekali coba. Pelaksanaannya dengan menggunakan data yang telah didapatkan kemudian dianalisis, dengan menggunakan teknik belah dua pada *Spearman Brown (Split half).* Menurut Sugiyono (2017:131), menggunakan rumus, yaitu:

$$r_i = \frac{2 \quad r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_i : Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b : Korelasi *product moment* antara belahan pertama dengan belahan kedua

Keputusan pada uji reliabilitas dilihat pada penggunaan beberapa ketentuan : apabila reliabilitas internal seluruh item (r_i) ≥ r tabel (tingkat kesalahan 5%) jadi item instrumen dikatakan reliabel. Tapi, apabila reliabilitas internal seluruh item (r_i) ≤ r tabel (taraf kesalahan 5%) jadi instrumen dikatakan tidak reliabel.

3.6.2 Analisis Data : *Principal Component Analysis*

Menurut Dunteman dalam Hermita Bus Umar (2009:97), menyatakan bahwa *Principal Component Analysis* (PCA) atau Analisis

Komponen Utama ialah sebuah teknik statistik secara linear yang dapat merubah bentuk sekelompok variabel pembentuknya menjadi kelompok variabel baru dengan intensitas yang lebih kecil, akan tetapi variabel baru tersebut mampu mewakili penjelasan yang termuat pada kelompok variabel pembentuknya. Sedangkan menurut Tabachnick (2001 : 582) PCA (*Principal Component Analysis*) dan FA (*Factor Analysis*) ialah sebuah teknik statistik yang dipakai untuk sekelompok variabel disaat peneliti tertarik untuk mencari variabel mana yang ada kelompok tersebut yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Variabel yang telah menggunakan metode PCA/FA memiliki korelasi diantara satu dengan lain tapi independen variabel dengan subset lain merupakan percampuran antara variabel-variabel lain dalam suatu faktor. Faktor di sini diartikan sebagai cerminan pada suatu proses yang menjadi dasar terjadinya korelasi antar variabel. Keunggulan metode PCA diantaranya bisa menghapus korelasi sampai habis tidak dengan membuang beberapa variable pembentuknya. Karena keunggulan yang dimiliki oleh metode PCA seperti mampu mengubah variabel awal menjadi variabel yang lebih kecil tanpa menghilangkan nilai variabel aslinya membuat peneliti tertarik menggunakan metode ini, selain itu metode PCA ini juga mampu memenuhi uji asumsi klasik multikolinieritas sehingga saat data sudah menggunakan metode PCA dapat dipastikan bahwa data tersebut tidak memiliki masalah multikolinieritas.

3.6.3 Analisis Statitistik Inferensial

3.6.3.1 Regresi

Pada penelitian ini faktor yang terbentuk saat diuji dengan pengujian PCA diregresi dengan model regresi linier berganda. Regresi linier berganda menjelaskan terkait studi tentang

ketergantungan variabel dependen pada satu atau beberapa variabel independennya, yang mana tujuan dari regresi linier berganda untuk menebak rata- rata nilai variabel dependen dengan nilai variable yang ada. Serta menjadi inti perhatian di sini ialah upaya menerangkan serta mengevaluasi variabel independen.

Persamaan regresi dilakukan agar dapat melihat kelastisitasan variable independent dengan variable dependentnya. Persamaan regresi dilakukan supaya mengetahui sebesar apa perubahan yang terjadi pada variable independen yang bisa memberikan pengaruh ke variabel dependennya.Model persamaan regresinya menurut Sugiyono (2017:192), yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Nilai variabel dependen

a = Konstanta, nilai Y apabila variabel X adalah nol

b_1 b_2 = Koefisien regresi multiple antara masing-masing variabel independen terhadap variable dependen.

X_1, X_2 = Nilai masing-masing variabel independen (X)

Apabila koefisien b menujukkan nilai positif (+), maka erdapat kaitan yang searah antara variable bebas dan variabel terikat. Atau apabila terjadi kenaikan pada variabel bebas akan diikuti dengan kenaikan variabel terikatnya. Sebaliknya apabila nilai b negatif (-), maka terdapat kaitan berbeda antara variabel bebas dan variable terikat. Atau apabila terjadi penurunan pada variabel bebas akan diikuti dengan penurunan terhadap variabel terikatnya.

3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016:95) koefisien determinasi (R^2) dapat menilai seberapa sejauh mana kemampuan model untuk menjelaskan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1. Apabila memiliki R^2 yang kecil dapat dilihat bahwa variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Apabila R^2 mendekati 1 dapat diartikan bahwa pada penelitian riabel independennya mampu menjelaskan hampir keseluruhan data yang diperlukan saat memprediksi variabel dependennya. Menurut Sugiyono (2013:215) rumus koefisien determinasi :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd : Koefisien determinasi

r : Nilai koefisien korelasi

3.6.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas oleh Ghozali (2016:154), menjelaskan bahwa uji normalitas memiliki tujuan supaya mendeteksi apakah pada model regresi, variable pengganggu/residual berdstribusi normal. Uji normalitas dibutuhkan untuk melihat apakah keseluruhan dari perhitungan statistik parametris dengan asumsi normalitas sebaran datanya berdistribusi normal. Dalam penelitian ini variabelnya memakai statistik parametris, oleh karenanya data di tiap variable wajib teruji terlebih dahulu normalitasnya. Menurut Ghozali (2016:160) terdapat beberap cara yang dapat dipakai agar melihat normalitas pada data penelitian, salah satunya Uji Normalitas *Jarque-Bera Test.*

Rumusan pengujian normalitas yang akan dilakukan dengan menggunakan rumus chi-kuadrat yaitu:

$$JB = n\left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24}\right]$$

Keterangan :

S = Koefisien Skewness

K = Koefisien kurtosis

Pada jumlah statistik nilai JB mengikuti distribusi *chi squares.* Dalam uji *Jarque Bera* melakukan perbandingan antara nilai JB dan nilai *chi squares* pada tabel dengan tingkat kesalah sebesar sejumlah 5%. Dengan dasar pengambilan keputusan keputusan sebagai berikut.

- Nilai Jarque Bera < dari nilai tabel *chi square*, data berdistribusi normal
- Nilai Jarque Bera > dari nilai tabel *chi square*, data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bagi Ghozali (2016:134), menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah pada model regresi terdapat pertidaksamaan *variance* dan residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila dalam model regresi *variance* dan residual pada suatu pengamatan kepengamatan lainnya ada kesamaan dikenal sebagai homoskedastisitas, namun jika terdapat perbedaan dikenal sebagai heteroskedastisitas. Peneliti harus berupaya agar datanya tidak terjadi masalah heterokedastisitas atau harus homokedastisitas sebagai ciri bahwa model regresi yang dilakukan peneliti sudah baik.

Menurut Ghozali (2016:136) cara yang bisa digunakan untuk dapat mengetahui ada atau tidak masalah heterokedastisitas dapat

menggnakan Uji Glejser. Uji Glejser ini mampu memberikan usulan berkenaan denga nilai mutlak residual pada variabel bebas pada hasil regresi. Apabila nilai signifikansi diatas tingkat kesalahan 5% (α = 5%) dengan tingkat kepercayaan 95% maka hasilnya dinyatakan tidak ada masalah heterokedastisitas.

3. Uji Auto Korelasi

Menurut Ghozali (2016:107), pengujian autokorelasi dijelaskan sebagai teknik pengujian asumsi klasik yang mempunyai tujuan untuk melihat apakah pada model regresi terdapat hubungan antara variabel residual di periode t dan variabel residual pada periode t-1 (sebelumnya). apabila terdapat hubungan korelasi, sehingga terjadi autokorelasi.

Menurut Ghozali (2016:108), cara menguji autokolerasi dapat dilakukan dengan melihat nilai uji Durbin Waston (DW test) saat dipergunakan pada autokorelasi ditingkat pertama serta memiliki syarat adanya *intercept* (konstanta) pada model regresi serta tidak ada variabel lain diantara variabel bebasnya. Untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi dapat menggunakan pedoman di bawah :

Tabel 3. 4

Pedoman Klasifikasi Nilai *d*

Range	Keputusan
0<dw<dL	Terdapat autokorelasi yang butuh perbaikan.
dL<dw<dU	Terdapat autokorelasi positif tapi lemah, bila diperbaiki akan lebih baik.
dU<dw<4-dU	Tak ada autokorelasi.
4-dU<dw<4-dL	Terdapat autokorelasi lemah, bila diperbai akan lebih baik.

4-dL<dw	Terdapat autokorelasi serius

Sumber : Ghozali (2016:108)

Keterangan :

dU = Batas Atas

dw = Hasil tes Durbin Watson

dL = Batas Bawah

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji Signifikasi Parameter Individual/Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statsitik T dilakukan supaya melihat sejauh mana akibat variabel independen perindividu mampu menjelaskan variasi variabel dependennya. Menurut hasil analisis serta uji hipotesis yang sudah dilakukan sebagai pokok untuk menarik kesimpulan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis, dilihat berdasarkan nilai T hitung banding nilai T tabel terhadap derajat kebebasan (df) sebesar n-2. Penarikan kesimpulan menggunakan uji T menurut Sugiyono (2017:194), yaitu :

$$t = \frac{r_{p\sqrt{n-2}}}{\sqrt{1 - r_p^2}}$$

Keterangan :

r_p = Korelasi parsial yang temukan

n = Jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel

Tingkat signiflkansi yang dipakai pada penelitian ialah sebanyak 5%. Tingkat kesalahan sebanyak 0,05 dapat diartikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau toleransi kesalahan 5%. Dasar pengambilan keputusan oleh peneliti, yaitu :

a. Jika T hitung ≤ T tabel, keputusan menerima H_0 serta menolak H_a berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa atau Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

b. Jika T hitng ≥ T tabel, keputusan menolak H_0 serta menerima H_a berarti ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa atau Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

Atau dapat menggunakan cara lain dengan menggunakan uji satu sisi kanan dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dan daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya α. Dengan dasar pengambilan keputusan :

a. Bila probabilitas t-statistik(sig.)> 0,05, maka Ho diterima , artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa atau Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

b. Bila probabilitas t-statistik (sig.)< 0,05, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa atau Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3.6.4.2 Uji Signifikasi Parameter Gabungan/Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:96) uji F dipergunakan untuk mengetahui bagaimana hasil yang didapatkan apabila keseluruhan variabel independen yang diuji secara bersama-sama pada model regresi mampu atau tidak untuk mempengaruhi variabel dependennya.

Menurut Sugiyono (2017:192) uji F dijelaskan sebagai bagaimana seluruh varaibel bebas dapat memberikan pengaruh pada variabel terikatnya. Keputusan menerima atau menolak hipotesis, menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R : Koefisien korelasi ganda

K : Jumlah variabel independen

N : Jumlah anggota sampel

Untuk melakukan uji F harus dilakukan perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel pada daftar tabel distribusi f dan derajat kebebasan sebesar (df) = n – k – 1 dan tingkat kesalhannya sebesar 5% artinya peluang terjadinya kesalahan pada pengujian hanya sebesar 0,05. Pengambilan keputusan yang dilakukan peneliti dengan hipotesis :

a. Jika F hitung ≥ F tabel, menolak H_0 serta menerima H_a artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

b. Jika F hitung ≤ F tabel ,menerima H_0 serta menolak H_a artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Atau dapat menggunakan cara lain dengan menggunakan uji satu sisi kanan dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dan daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya α. Dengan dasar pengambilan keputusan :

a. Bila probabilitas F-statistik(sig.)> 0,05, maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
b. Bila probabilitas F-statistik (sig.)< 0,05, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Karangploso

Kecamatan Karangploso memiliki 58,74 km^2 keluasan wilayahnya atau perkiraan 1,97% dari keseluruhan daerah Kabupaten Malang. Kecamatan Karangploso menjadi satu diantara banyak wilayah kecamatan yaitu sebanyak 33 kecamatan terdapat di daerah Kabupaten Malang. Apabila ditinjau secara secara geografis hampir keseluruhan desa di wilayah Kecamatan Karangploso berupa dataran, dan sisanya terletak pada lereng yang menjadi bagian geografisnya berupa dengan desa di Kecamatan Karangploso yang tergolong datar dan perbukitan jika dilihat secara topografisnya.

Batasan wilayah Kecamatan Karangploso ialah:

- Dibagian Utara : Kota Batu , dan Kecamatan Singosari
- Dibagian Timur : Kecamatan Singosari
- Dibagian Selatan : Kota Malang , dan Kecamatan Dau
- Dibagian Barat : Kota Batu

Kecamatan Karangploso memiliki pemandangan alam yang indah karena sebagian wilayahnya berada di perbukitan dan sebagian wilayahnya berupa dataran, akan tetapi dalam penanganan terkait dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki Kecamatan Karangploso terkesan kurang memnafaatkan secara optimal. Apabila sumber daya alam mampu dimaksimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di kecamatan Karangploso bisa memiliki peluang untuk meningkat.

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Karangploso

Visi Kecamatan Karangploso :

Terwujudnya pelayanan prima dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Misi Kecamatan Karangploso :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan-urusan dikepemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan;
3. Meningkatkan kinerja dan SDM Perangkat Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Meningkatkan fasilitas upaya-upaya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonimi kreatif untuk menurunkan angka kemiskinan;
5. Mengembangkan fasilitas partisipasi warga terhadap upaya pengadaan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air, permukiman dan sarana kemasyarakatan;
6. Memperluas informasi dan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan prima.

4.1.3 Profil Desa

Kecamatan Karangploso terdiri dari atas 9 desa, yaitu :

1. Desa Tawangargo

Nama Kepala Desa : H. Sukar

Sebelum bernama Tawangargo, desa ini bernama Desa Sumbersari. Desa Tangargo sendiri ada enam dusun, yaitu Dusun Leban, Dusun Lasah, Dusun Ngudi, Dusun Kalimalang, Dusun

Suwaluhan, serta Dusun Boro. Desa Tawangargo memiliki luas wilayah sebesar 652,614 Ha. Desa Tawangargo memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 1 Kantor Desa Tawangargo

Gambar 4. 2 Lokasi Kantor Desa Tawangargo

2. Desa Donowarih

Nama Kepala Desa : Sujoko Donoprasetyo

Sebelum berganti nama menjadi Desa Donowarih, desa ini dikenal Desa Karangan. Desa Donowarih ada empat dusun, yaitu Dusun Karangan, Dusun Jaraan, Dusun Karang Juwet, serta Dusun Borogragal. Desa Donowarih memiliki besar wilayah sebesar 1.305,261 Ha. Desa Donowarih memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris

Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 3 Kantor Desa Donowarih

Gambar 4. 4 Lokasi Desa Donowarih

3. Desa Bocek

Nama Kepala Desa : Abdul Kodim

Desa Bocek merupakan sebuah singkatan dari bahasa jawa yang memiliki kepanjangan “Ombo tapi Nlecek” (luas tetapi berceceran). Desa Bocek terdiri dari tiga dusun, ialah Dusun Bocek Krajan, Dusun Manggisari, serta Dusun Supiturang. Desa Bocek memiliki luas wilayah sebesar 1.511,871 Ha. Desa Bocek memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 5 Kantor Desa Bocek

Gambar 4. 6 Lokasi Kantor Desa Bocek

4. Desa Girimoyo

   Nama Kepala Desa : H. Rony Wibowo

   Desa Girimoyo menjadi sentral pemerintahan dari Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Desa ini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Girimoyo, Dusun Ngambon dan Desa Genengan. Desa Girimoyo memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 353,464 Ha, desa ini merupakan pusat dari Kecamatan Karangposo dan di desa ini ada salah satu ikon yang sangat terkenal di kalangan masyarakat yaitu Pasar Sayur.. Desa Girimoyo memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 8 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 7 Kantor Desa Girimoyo

Gambar 4. 8 Lokasi Kantor Desa Girimoyo

5. Desa Ngijo

   Nama Kepala Desa : H. Mahdi Maulana

   Desa Ngijo ada 8 dusun, ialah Dusun Kagrengan, Dusun Kedawung, Dusun Ngijo Krajan, Dusun Ngepeh, Dusun Takeran, Dusun Kendalsari, Dusun Leses serta Dusun GPA (Griya Permata Alam). Desa Ngijo memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 434,062 Ha. Desa Ngijo memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 6 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 9 Kantor Desa Ngijo

Gambar 4. 10 Lokasi Kantor Desa Ngijo

6. Desa Ngenep

   Nama Kepala Desa : Suwardi

   Desa Ngenep terdiri dari sembilan dusun yang terdiri dari Dusun Ngenep Krajan, Dusun Lowoksari, Dusun Kubung, Dusun Baba'an, Dusun Curah Kembang, Dusun Genitri, Dusun Mojosari, Dusun Tumpangrejo serta Dusun Tirtasani. Desa Ngenep memiliki luas wilayah sebesar 1.130,311 Ha, salah satu wisata yang terkenal di desa ini adalah pemandian Sumber Nyolo. Desa Ngenep memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 9 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 11 Kantor Desa Ngenep

Gambar 4. 12 Lokasi Kantor Desa Ngenep

7. Desa Kepuharjo

   Nama Kepala Desa : Khamim

   Desa Kepuharjo memiliki 6 dusun, ialah Dusun Wringin Anom (Langgat), Dusun Kepuh Utara, Dusun Kepuh Selatan, Dusun Karangploso Wetan, Dusun Turi, serta Dusun Tlasih. Desa Kepuharjo memiliki luas wilayah sebanyak 204,971 Ha. Desa Kepuharjo memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 12 Kantor Desa Kepuharjo

Gambar 4. 13 Lokasi Kantor Desa Kepuharjo

8. Desa Ampeldento

   Nama Kepala Desa : Suhariyanto

   Desa Ampeldento dibagi jadi empat dusun, ialah Dusun Jumput, Dusun Bunder, Dusun Kasin dan Dusun Kasin Putuk. Desa Ampeldento memiliki luas wilayah sebesar 153,196 Ha, salah satu unggulan di desa ini adalah desa wisata yang masih dalam proses pembangunan akan tetapi sudah terwujud dengan tebentuknya NK Cafe. Desa Ampeldento memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Gambar 4. 14 Lokasi Kantor Desa Ampeldento

Gambar 4. 15 Lokasi Kantor Desa Ampeldento

9. Desa Tegalgondo

   Nama Kepala Desa : Nur Mahmud

   Desa Tegalgondo memiliki lima dusun, ialah Dusun Gondang, Dusun Wunutsari, Dusun Dawuhan, Dusun Ketangi serta Dusun Babatan. Desa tegalgondo memiliki luas wilayah sebesar 220,235 Ha. Desa Tegalgondo memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, dan 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 4. 16 Kantor Desa Tegalgondo

Gambar 4. 17 Lokasi Kantor Desa Tegalgondo

4.1.4 Penelitian Kuantitatif

4.1.4.1 Gambaran Umum Responden

Untuk tahapan ini peneliti telah menjelaskan terkait data- data deskriptif yang didapatkan melalu responden dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibagikan secara langsung ke setiap perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdapat dikantor desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Data deskriptif merupakan kondisi atau gambaran suatu keadaan dari responden yang wajib diperhatikan guna menjadi informasi tambahan untuk menganalisis hasil yang didaptakna pada penelitian ini. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat membuktikan, mengungkapkan, maupun mengumpulkan jawaban atas

permasalahan yang sedang diteliti tanpa mengabaikan aturan yang telah ditetapkan secara sistematis.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 135 perangkat pengelola dana desa dan BPD akan tetapi kuesioner yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti sebanyak 111 responden yaitu 61 orang sebagai perangkat desa serta 50 orang lainnya yang mengemban amanah menjadi BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sebanyak 24 responden tidak berkenan untuk mengisi kuesioner ini beberapa diantaranya karena sudah meninggal, sudah keluar (bukan bagian dari anggota kepengurusan dana desa), masalah pribadi sehingga tidak mau mengisi, serta pengisian yang tidak valid karena responden malah menyerahkan hasil kuesionernya pada orang lain untuk dibantu mengisikan jadi bukan dari anggota sampel yang terpilih menjadi responden melainkan orang lain. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner dengan memperhatikan aturan kelolosan sampel terhadap penelitian, kuesioner yang lolos sejumlah 82 kuesioner dari 82 responden. Responden berasal dari perangkat desa yang mengelola dana desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai perwakilan masyarakat yang berada di kantor desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

1. Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

Supaya dapat melihat ciri khas responden menurut jenis kelaminnya, bisa diketahui di tabel 4.1 ini :

Tabel 4. 1
Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase %

Pria	74	90%
Wanita	8	10%
Jumlah	82	100%

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2021

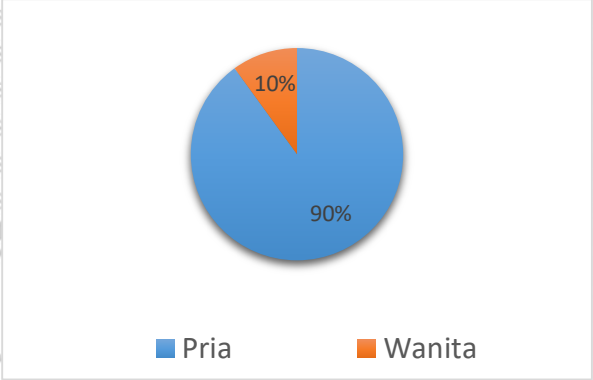

Gambar 4. 18

Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

menurut Tabel 4.1 dan Gambar 4.19, bisa dilihat bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa di kantor desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang mengisi kuesioner menunjukan bahwa jenis kelamin pria sejumlah 74 orang/sebanyak 90% dan responden yang mengisi kuesioner yang berjenis kelamin wanita sejumlah 8 orang/sebanyak 10%.

2. Profil Responden Menurut Usia.

Karakteristik responden menurut usianya, bisa diketahui di tabel 4.2 ini:

Tabel 4. 2

Profil Responden Menurut Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase

< 21 tahun	-	-
22 – 28 tahun	7	9%
29 - 35 tahun	11	13%
36 - 42 tahun	21	27%
>43 tahun	42	51%
Jumlah	82	100%

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2021

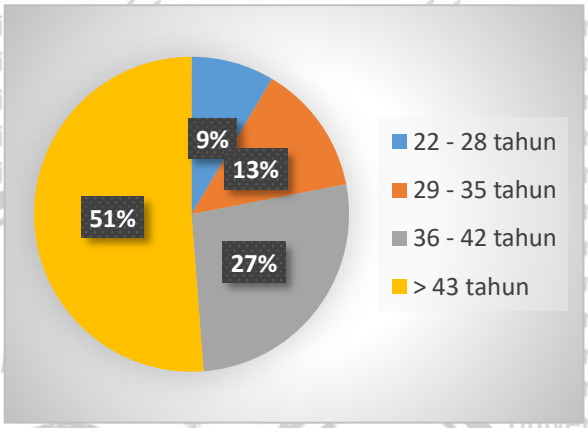

Gambar 4. 19

Profil Responden Menurut Usia

Menurut tabel 4.2 serta gambar 4.20 berikut, bisa dilihat bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa dikantor desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang mengisi kuesioner yang berusia 22 tahun hingga 28 tahun sejumlah 7 orang/sebanyak 9%, yang berusia 29 tahun hingga 35 tahun sejumlah 11 orang/sebanyak 13%, yang berusia 36 tahun hingga 42 tahun sejumlah 22 orang/sebanyak 27%, yang berusia diatas 43 tahun sejumlah 42 orang/sebanyak 51% dan yang berusia lebih dari 43 tahun adalah anggota BPD karena menurut UU No. 7 Tahun 2018 batas usia seorang anggota BPD tidak dicantumkan hanya minimalnya saja yaitu 20 tahun.

3. Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Beradasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh data responden bisa ditampilkan pada tabel 4.3 yaitu:

Tabel 4. 3

Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
SMA	63	77%
D3	1	1%
S1	17	21%
S2	1	1%
S3	-	-
Lainnya	-	-
Jumlah	82	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2021

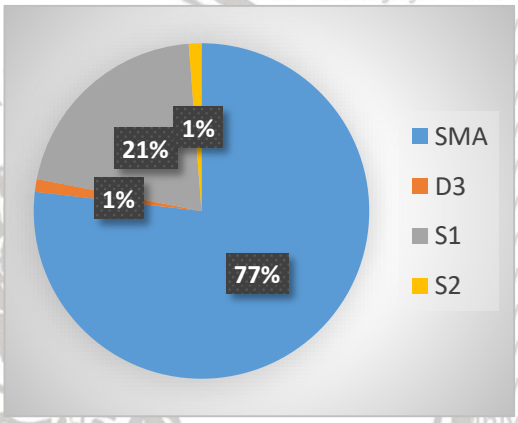

Gambar 4. 20

Profil Responden Menurut Pendidikan

Menurut tabel 4.3 dan gambar 4.21 berikut, bisa dilihat bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa dikantor desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang mengisi kuesioner menunjukan bahwa yang berpendidikan SMA sebanyak 63 orang/sebanyak 77%, D3 sejumlah 1 orang/sebanyak 1%, S1 sejumlah 17 orang/sebanyak 21% dan S2 sejumlah 1 orang/sebanyak 1%.

4. Profil Responden Menurut Jabatan

Karakteristik responden menurut jabatan bisa diketahui pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4. 4
Profil Responden Menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Presentase
Kepala Desa	1	1%
Sekretaris Desa	5	6%
Kepala Seksi Kesejahteraan	5	6%
Kepala Seksi Pembangunan	2	3%
Kepala Seksi Pelayanan	2	3%
Kepala Urusan Umum	6	7%
Kepala Urusan Keuangan	6	7%
Kepala Urusan Perencanaan	5	6%
BPD	50	61%
Jumlah	82	100%

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2021

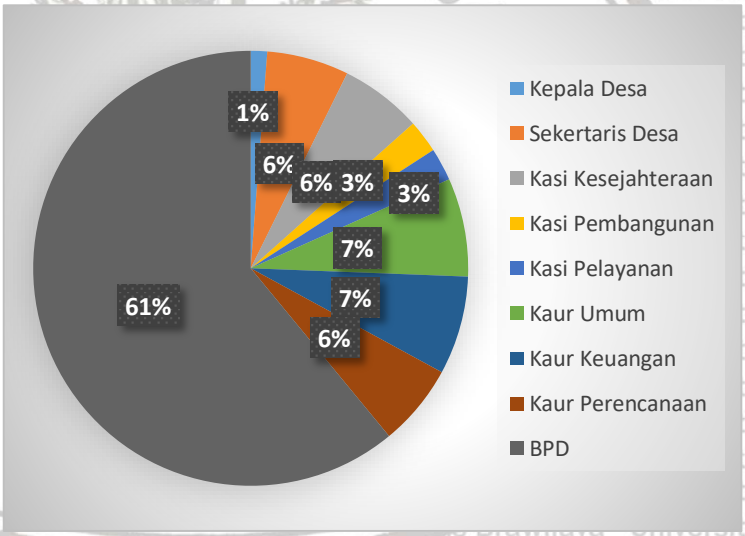

Gambar 4. 21
Profil Responden Menurut Jabatan

Menurut tabel 4.4 dan gambar 4.22 berikut, bisa dilihat bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa dikantor desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang mengisi kuesioner menunjukan bahwa yang menjabat

sebagai Kepala Desa sejumlah 1 orang/sebanyak 1%, Sekretaris Desa sejumlah 5 orang/sebanyak 6%, Kepala Seksi Pemerintahan sejumlah 5 orang/sebanyak 6%, Kepala Seksi Kesejateraan sejumlah 2 orang/sebanyak 2%, Kepala Seksi Pelayanan sejumlah 2 orang/sebanyak 2%, Kepala Urusan Umum sejumlah 6 orang/sebanyak 7%, Kepala Urusan Keuangan sejumlah 6 orang/sebanyak 7%, Kepala Urusan Perencanaan sejumlah 5 orang/sebanyak 6% dan BPD sejumlah 50 orang/sebanyak 61 %.

4.1.4.1 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi perangkat pengelola dana desa merupakan kemampuan menyelesaikan pekerjaannya dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap kerja yang menjadi karakteristik perindividu. Kompetensi perangkat desa merupakan faktor yang berpengaruh pada pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang kompeten dapat menghasilkan pengelolaan dana desa yang mencerminkan asas keuangan desa (Transparan, Akuntabel, Partisipastif, Tertib dan Disiplin Anggaran) (Mada, dkk 2017).

Tabel 4. 5 item Pertanyaan 1

Saya mengetahui dan memahami peraturan yang ada di Desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	40	200
Setuju (S)	4	42	168
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	368
Jawaban Kriteria			410
Presentase			90%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 1 "Saya mengetahui dan memahami peraturan yang ada di Desa" adalah 368 dengan presentase 90%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa yang mengelola dana desa telah mengetahui, memahami dan melaksanakan kegiatan sejalan dengan aturan yang ada di desa. Hal ini bukan hanya nilai yang diberikan oleh sesama perangkat namun juga diperhatikan oleh BPD di desa setempat selaku partisipasi dari masyarakat.

Tabel 4. 6 item Pertanyaan 2

Sebagai perangkat pengelola Dana Desa saya sangat mengetahui dan memahami bagaimana arah Dana Desa akan direalisasikan.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	37	185
Setuju (S)	4	38	152
Kurang Setuju (KS)	3	7	21
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	358
Jawaban Kriteria			410
Presentase			87%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 2 "Sebagai perangkat pengelola Dana Desa saya sangat mengetahui dan memahami bagaimana arah Dana Desa akan direalisasikan." adalah 358 dengan presentase sebesar 87%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa yang mengelola dana desa sangat mengetahui dan memahami bagaimana arah dana desa akan direalisasikan. Namun 7 orang yang termasuk

BPD dan perangkat desa memilih kurang setuju karena mereka belum memahami secara keseluruhan arah tujuan perealisasian dana desa yang telah diberikan.

Tabel 4. 7 item Pertanyaan 3

Sebagai perangkat pengelola dana desa saya perlu mengikuti pelatihan untuk mengelola dana desa dengan baik.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	49	245
Setuju (S)	4	33	132
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	377
Jawaban Kriteria			410
Presentase			92%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.7 di atas diatas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 3 “Sebagai perangkat pengelola dana desa saya perlu mengikuti pelatihan untuk mengelola dana desa dengan baik.” adalah 377 dengan presentase sebesar 92%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mewakili masyarakat untuk mengelola dana desa perlu mengikuti pelatihan agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Tabel 4. 8 item Pertanyaan 4

Saya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	21	105
Setuju (S)	4	51	204

Kurang Setuju (KS)	3	10	30
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	339
Jawaban Kriteria			410
Presentase			83%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 4 “Saya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani” adalah 339 dengan presentase sebesar 82%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa telah mampu menidentifikasi masalah yang terjadi pada pekerjaannya.

Ada 10 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara pada pihak yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa mereka kesulitan mengindentifikasi masalah yang kurang bisa mereka tangani karena berada diluar konteks pekerjaan seperti perihal masalah teknis dalam Siskeudeus yang mana mereka harus bertanya dahulu untuk memastikan masalahnya kepada yang ahli dibidangnya.

Tabel 4. 9 item Pertanyaan 5

Saya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	21	105
Setuju (S)	4	55	220
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	1	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	342
Jawaban Kriteria			410
Presentase			83%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.9 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 5 "Saya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani" adalah 342 dengan presentase sebesar 83%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa telah mampu mengatasi masalah yang terjadi pada pekerjaannya.

Ada 6 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mereka kesulitan mengatasi masalah yang mereka tangani dalam pekerjaannya adalah perihal masalah teknis seperti dalam Siskeudeus yang mana harus bertanya dahulu untuk memastikan masalahnya kepada perangkat desa atau Ketua BPD yang lebih ahli dan lebih mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya.

Tabel 4. 10 item Pertanyaan 6

Pendidikan terakhir yang saya tempuh membantu saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	30	150
Setuju (S)	4	48	192
Kurang Setuju (KS)	3	4	12
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	354
Jawaban Kriteria			410
Presentase			86%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.10 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 6 "Pendidikan terakhir yang saya tempuh membantu saya dalam

melaksanakan tugas sehari-hari" adalah 354 dengan presentase sebesar 86%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan menunjukan pendidikan terakhir perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa membantu melaksanakan pekerjaannya.

Ada 4 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir mereka tidak banyak membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari sehingga mereka harus belajar kembali agar dapat menyelesaikan tugas sehari-hari mereka. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa kualitas perangkat yang lebih muda dibanding lebih tua memang lebih bagus mesikupun pendidikan terakhir yang ditempuh sama jadi perangkat yang lebih tua harus belajar lebih banyak agar tidak tertinggal.

Tabel 4. 11 item Pertanyaan 7

Saya berlaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ditempat saya bekerja.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	48	240
Setuju (S)	4	34	136
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	376
Jawaban Kriteria			410
Presentase			92%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.11 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 7 "Saya berlaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ditempat saya bekerja" adalah 376 dengan presentase sebesar

92%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa telah bekerja sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Tabel 4. 12 item Pertanyaan 8

Saya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat dan perangkat desa yang lainnya..

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	45	225
Setuju (S)	4	37	148
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	373
Jawaban Kriteria			410
Presentase			91%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.12 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 7 "Saya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat dan perangkat desa yang lainnya" adalah 373 dengan presentase sebesar 91%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat dan perangkat desa yang lainnya.

Tabel 4. 13 item Pertanyaan 9

Saya tidak senang menerima kritik saran dari masyakarat.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	1	-	-
Setuju (S)	2	-	-
Kurang Setuju (KS)	3	4	12
Tidak Setuju (TS)	4	31	124

Sangat Tidak Setuju (STS)	5	47	235
Jumlah Jawaban		82	371
Jawaban Kriteria			410
Presentase			90%

Sumber : Pengolahan Data

Item pertanyaan 9 merupakan pertanyaan negatif, sehingga skor untuk setiap jawaban sebaliknya dari pertanyaan positif. Dari tabel 4.13 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 9 “Saya tidak senang menerima kritik saran dari masyakarat” adalah 371 dengan presentase sebesar 90%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa dapat menerima kritikan dari siapapun.

Ada 4 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak senang menerima kritikan yang mana masyarakat tidak mengetahui secara langsung bagaimana kondisi dana desa hanya berdasarkan kabar burung mereka mengutarakan kata-kata yang kurang pantas pada perangkat desa dan BPD.

Tabel 4. 14 item Pertanyaan 10

Kompetensi yang saya miliki sebagai perangkat pengelola Dana Desa dapat meningkatkan efektivitas saya dalam menyelesaikan tugas.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	28	140
Setuju (S)	4	49	196
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-

Jumlah Jawaban	82	351
Jawaban Kriteria		410
Presentase		86%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.14 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 10 "Kompetensi yang saya miliki sebagai perangkat pengelola Dana Desa dapat meningkatkan efektivitas saya dalam menyelesaikan tugas" adalah 351 dengan presentase sebesar 86%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa setuju bahwa kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan tugas.

Sedangkan 5 responden yang yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa mereka merasa kurang dengan kompetensi yang mereka miliki dan masih ingin belajar agar kompetensi yang mereka miliki mampu meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

Tabel 4. 15 item Pertanyaan 11

Kompetensi yang saya miliki dapat meningkatkan kualitas saya sebagai perangkat desa yang mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	26	130
Setuju (S)	4	51	204
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	349
Jawaban Kriteria			410

Presentase	85%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.15 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 11 "Kompetensi yang saya miliki dapat meningkatkan kualitas saya sebagai perangkat desa yang mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu" adalah 349 dengan presentase sebesar 85%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa BPD dan perangkat desa memiliki kompetensi yang baik yang berguna untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu.

Sedangkan 5 responden yang yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa mereka merasa kurang dengan kompetensi dan kualitas yang mereka miliki karena beberapa dari mereka beranggapan bahwa mereka yang lebih tua harus bisa bekerja layaknya perangkat desa yang lebih muda sehinggga tugas sama-sama bisa diselesaikan tepat waktu.

Tabel 4. 16 item Pertanyaan 12

Secara keseluruhan, kompetensi yang saya miliki berguna untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada saya.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	35	175
Setuju (S)	4	47	188
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	363
Jawaban Kriteria			410
Presentase			89%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.16 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 12 “Kompetensi yang saya miliki dapat meningkatkan kualitas saya sebagai perangkat desa yang mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu. ” adalah 363 dengan presentase sebesar 89%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan BPD dan perangkat desa memiliki kompetensi yang berguna untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan.

Dari 12 item pertanyaan untuk megetahui tanggapan responden tentang variabel X1 yang telah diajukan kepada responden hasil akumulasi persentase pertanyaan didapatkan bahwa nilai persentase tertinggi didapatkan oleh item pertanyaan ke 3 “Sebagai perangkat pengelola dana desa saya perlu mengikuti pelatihan untuk mengelola dana desa dengan baik” dengan indikator pengetahuan dan item pertanyaan ke 7 “Saya berlaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ditempat saya bekerja” dengan indikator sikap dan total persentase keduanya sebanyak persentase 92%, hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa dan BPD setuju bahwa penting dilakukan pelatihan untuk menunjang kompetensi atau kemampuan karena kompetensi merupakan kemapuan tiap individu dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk tugas yang diberikan yaitu pengelolaan dana desa. Salah satu unsur penting dari kompetensi adalah perilaku yang di jelaskan untuk item pertanyaan ke 7 bahwa penting bagi perangkat desa maupun BPD untuk bekerja sesuai nilai dan norma untuk menunjukkan seberapa baik kompetensi mereka ditempat mereka bekerja. Sedangkan nilai persentase terendah didapatkan oleh item pertanyaan ke 4 “Saya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang timbul dalam

pekerjaan yang saya tangani" dan ke 5 "Saya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani" yang mana keduanya sama-sama masuk kedalam indikator keterampilan dengan persentase 83%, hal ini menunjukkan bahwa baik perangkat desa maupun BPD mempunyai kekurangan pada salah satu faktor penunjang kompetensi yaitu keterampilan yang mana keterampilan ini harus dilatih agar menjadi mahir, seperti apabila ada masalah teknis dalam Siskeudeus yang mengharuskan mereka bertanya dahulu untuk memastikan masalahnya kepada yang ahli dibidangnya seharusnya pihak perangkat desa tetap disana sembari melihat bagaimana pemecahan solusi atas masalah tersebut apabila terjadi kasus serupa pihak perangkat desa bisa mengatasi masalah tersebut tanpa harus menunggu dari seseorang yang ahli dibidangnya. Selain itu untuk anggota BPD yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah seharusnya tidak perlu segan untuk berdiskusi pada sesama anggota lainnya diluar rapat atau pertemuan, karena dengan berdiskusi masalah yang semula sulit menemukan jalan keluar dengan mendengar saran atau masukan dari orang lain mampu menjadi pertimbangan untuk memilih mana solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4.1.4.2 Tanggapan Responden mengenai Partisipasi Masyarakat.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat pada pembangunan dan pemberdayaan warga desa agar aparat desa yang bekerja tidak menyalahgunakan dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan. Putusan yang nantinya akan dipilih oleh perangkat desa harus mengikutsertakan unsur masyarakat salah satunya bisa diwakilkan dngan BPD, agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana

desa tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan serta warga desa juga menegetahui terdapat keterbukaan yang terjalin di sini sehubungan pada pertanggungjawaban atas keseluruhan aktivitas di desa. (Mada, et all., 2017).

Tabel 4. 17 item Pertanyaan 13

Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	53	265
Setuju (S)	4	29	116
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	381
Jawaban Kriteria			410
Presentase			93%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.17 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 13 "Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa" adalah 381 dengan presentase sebesar 93%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perwakilan masyarakat (BPD) memang perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program pembangunan atau pemerdayaan di Desa.

Tabel 4. 18 item Pertanyaan 14

Setiap keputusan yang akan dilakukan selalu dirundingkan dahulu dengan perwakilan masyarakat.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	43	215
Setuju (S)	4	38	152

Kurang Setuju (KS)	3	1	3
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	370
Jawaban Kriteria			410
Presentase			90%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.18 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 14 “Setiap keputusan yang akan dilakukan selalu dirundingkan dahulu dengan perwakilan masyarakat” adalah 370 dengan presentase sebesar 90%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan perwakilan masyarakat selalu membicarakan setiap keputusan yang akan diambil.

Ada 1 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju jika keputusan yang diambil harus melibatkan masyarakat karena tidak sedikit masyarakat ingin mengambil keputusan yang seharusnya bukan menjadi program priotas di desa tersebut.

Tabel 4. 19 item Pertanyaan 15

Selama pengambilan keputusan suasana berlangsung tenang.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	31	155
Setuju (S)	4	49	196
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	355
Jawaban Kriteria			410
Presentase			87%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.19 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 15 “Selama pengambilan keputusan suasana berlangsung tenang.” adalah 355 dengan presentase sebesar 87%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan saat pengambilan keputusan antara perangkat desa dan BPD sebagai perwakilan masyarakat suasana berlangsung tenang.

Ada 2 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju karena terkadang saat rapat terdapat beberapa perdebatan namun setelah melakukan musyawarah dan mencapai mufakat kegiatan selanjutnya akan berlangsung tenang kembali.

Tabel 4. 20 item Pertanyaan 16

Saya selalu menghargai perwakilan masyarakat (BPD) yang mengusulkan rencana anggaran.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	31	155
Setuju (S)	4	51	204
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	359
Jawaban Kriteria			410
Presentase			88%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.20 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 16 “Saya selalu menghargai perwakilan masyarakat (BPD) yang mengusulkan rencana anggaran” adalah 359 dengan presentase sebesar 88%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat

baik. Hal ini menunjukan perangkat desa selalu menghargai perwakilan masyarakat (BPD) yang mengusulkan rencana anggaran.

Tabel 4. 21 item Pertanyaan 17

Saya merasa perlu adanya perwakilan masyarakat (BPD) dalam rapat penyusunan anggaran.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	30	150
Setuju (S)	4	47	188
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	353
Jawaban Kriteria			410
Presentase			86%

Sumber :Pengolahan Data

Tabel 4.21 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 17 “Saya merasa perlu adanya perwakilan masyarakat (BPD) dalam rapat penyusunan anggaran.” adalah 353 dengan presentase sebesar 86%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa memerlukan kontribusi dari masyarakat yang diwakilkan oleh BPD dalam rapat penyusunan anggaran, agar perwakilan dari masyarakat mengetahui pemakaian anggarannya.

Ada 5 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju jika dalam rapat tersebut masyarakat mengusulkan rencana anggaran diluar program yang sedang diprioritas desa.

Tabel 4. 22 item Pertanyaan 18

Tanpa adanya campur tangan perwakilan masyarakat (BPD) di dalam rapat kita akan kesusahan dalam melihat apa yang sedang dibutuhkan untuk pembangunan program desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	37	185
Setuju (S)	4	38	152
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	356
Jawaban Kriteria			410
Presentase			87%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.22 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 18 “Tanpa adanya campur tangan perwakilan masyarakat (BPD) di dalam rapat kita akan kesusahan dalam melihat apa yang sedang dibutuhkan untuk pembangunan program desa” adalah 356 dengan presentase sebesar 87%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa setuju dengan adanya campur tangan perwakilan masyarakat (BPD) dalam rapat untuk melihat apa yang sedang dibutuhkan dalam pembangunan program desa.

Ada 7 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju dan tidak setuju karena tidak semua perwakilan masyarakat mengerti program pembangunan mana yang lebih mendesak dan harus diprioritasan terlebih dahulu, terkadang di dalam rapat terdapat beberapa usulan yang ingin segera didahulukan padahal usulan tersebut bukan tergolong urusan yang mendesak.

Tabel 4. 23 item Pertanyaan 19

Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam mengawasi dana desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	42	210
Setuju (S)	4	40	160
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	370
Jawaban Kriteria			410
Presentase			90%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.23 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 19 “Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam mengawasi dana desa.” adalah 370 dengan presentase sebesar 90%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa setuju dan sangat mengharapkan bahwa masyarakat yang diwakilkan oleh BPD terlibat dalam mengawasi dana desa.

Tabel 4. 24 item Pertanyaan 20

Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam melaporkan dana desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	31	155
Setuju (S)	4	43	172
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	1	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2	2
Jumlah Jawaban		82	344
Jawaban Kriteria			410
Presentase			84%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.24 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 20 “Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam melaporkan dana desa.” adalah 344 dengan presentase sebesar 84%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa setuju perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam pelaporan dana desa, agar laporannya lebih akuntabel.

Ada 8 responden yang menjawab Kurang Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju . Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju karena tidak semua masyarakat paham mengenai alur dari pelaporan dana desa itu, ditakutkan saat perwakilan masyarakat terlibat dalam pelaporan dana desa maka akan laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan realisasinya.

Tabel 4. 25 item Pertanyaan 21

Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) sangat diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	34	170
Setuju (S)	4	48	192
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	362
Jawaban Kriteria			410
Presentase			88%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.25 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 21 “Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) sangat diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.” adalah 362 dengan presentase sebesar 88%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa setuju perwakilan masyarakat (BPD) memberikan penilaian berupa saran dan kritikan yang memabngun setelah pelaksanaan anggaran agar bisa memperbaiki program desa apabila ada yang dirasakan kurang memuaskan.

Tabel 4. 26 item Pertanyaan 22

Saya percaya tentang segala informasi terkait anggaran Dana Desa, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	22	110
Setuju (S)	4	57	228
Kurang Setuju (KS)	3	2	6
Tidak Setuju (TS)	2	1	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	346
Jawaban Kriteria			410
Presentase			84%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.26 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 22 “Saya percaya tentang segala informasi terkait anggaran Dana Desa, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.” adalah 346 dengan presentase sebesar 84%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa setuju dan BPD sama-sama saling mempercayai bahwa

informasi terkait anggaran dana reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ada 3 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju, tidak setuju karena pada awalnya tidak semua perwakilan masyarakat (BPD) dan perangkat desa memahami rencana anggaran terkadang mereka masih ada yang belum memahami secara detail bagaimana arah dan tujuan rencana anggaran tersebut. Namun setelah bertanya dan diberikan pemahaman mereka akan memahaminya dan apabila ada yang kurang setuju atau kurang jelas anggota BPD atau perangkat lain meresponnya dengan baik.

Tabel 4. 27 item Pertanyaan 23

Saya percaya bahwa pengalokasian Dana Desa dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang baik.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	27	135
Setuju (S)	4	51	204
Kurang Setuju (KS)	3	2	6
Tidak Setuju (TS)	2	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	349
Jawaban Kriteria			410
Presentase			85%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.27 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 23 “Saya percaya bahwa pengalokasian Dana Desa

dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang baik." adalah 349 dengan presentase sebesar 85%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD setuju bahwa pengalokasian dana desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat karena di dukung oleh teknolgi dan infrastruktur yang baik.

Ada 4 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju dan tidak setuju karena memang benar alkasi dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi infrastuktur dan teknologi yang baik itu kurang benar terkadang infrastukturnya yang rusak dan perlu dibenahi kembali selain itu teknologi juga dirasa memang baik namun terkadang terdapat masalah.

Tabel 4. 28 item Pertanyaan 24

Saya percaya pengalokasian Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, karena pihak yang menanganinya kompeten, terpercaya, dan berintegritas.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	23	115
Setuju (S)	4	57	228
Kurang Setuju (KS)	3	2	6
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	349
Jawaban Kriteria			410
Presentase			85%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.28 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 24 “Saya percaya pengalokasian Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, karena pihak yang menanganinya kompeten, terpercaya, dan berintegritas.” adalah 370 dengan presentase sebesar 90%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa setuju dan sangat mengharapkan bahwa masyarakat yang diwakilkan oleh BPD terlibat dalam mengawasi dana desa.

Dari 12 item pertanyaan untuk megetahui tanggapan responden tentang variabel X2 yang telah diajukan kepada responden hasil akumulasi persentase pertanyaan didapatkan bahwa nilai persentase tertinggi didapatkan oleh item pertanyaan ke 13 “Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa.” Dengan indikator pengambilan keputusan dan persentase sebesar 93%, hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa dan BPD setuju penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Peran BPD disini sangat dibutuhkan, karena mereka berkewajiban menjadi pihak ketiga bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan, keluh kesah dan aspirasi yang dapat berupa kritik maupun saran membangun dan nantinya keseluruhan dari ungkapan yang telah disampaikan oleh masyarakat dipertimbangkan mana kepentingan yang lebih penting/mendesak yang harus didahulukan untuk segera dibenahi atau dilaksanakan. Sedangkan nilai persentase terendah didapatkan oleh item pertanyaan ke 20 “Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam melaporkan dana desa” dengan indikator pelaksanaan anggaran dan ke 22 “Saya percaya tentang segala informasi terkait anggaran Dana Desa, reliabel

dan dapat dipertanggungjawabkan." Dengan indikator kepercayaan yang mana masing-masing item pertanyaan tersebut memiliki persentase sebesar 83%, hal ini menunjukkan bahwa baik perangkat desa maupun BPD terkait masalah pelaksanaan anggaran khususnya dalam pelaporan dana desa memiliki pendapat berbeda, karena perangkat desa beranggapan bahwa BPD hanya bertugas mengawasi jalannya pengalokasian dana desa dan mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan desa akan tetapi untuk masalah pelaporan dana desa tidak semua masyarakat memahami mengenai alur dari pelaporan dana desa itu, ditakutkan saat perwakilan masyarakat terlibat dalam pelaporan dana desa maka laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan realisasinya karena pelaporan anggaran ini berubungan dengan kemajuan desa. Akan tetapi perangkat desa menerima apabila ada kritik ataupun masukan dan pengawasan dalam jalannya pelaporan dana desa. Untuk indikator kepercayaan yang sehubungan dengan anggaran dana desa reliable dan dapat dipertanggungjawabkan menyumbang nilai persentase terkecil, karena tidak semua perwakilan masyarakat (BPD) dan perangkat desa memahami rencana anggaran terkadang mereka masih ada yang kurang jelas sehingga perlu pemahaman lebih lanjut dengan diskusi secara mendalam karena apabila terdapat kesalahan tentu akan merugikan banyak pihak oleh karenanya perlu kesiapan yang matang dalam memahami bagaiamana arah penganggaran dana desa dan juga peminimalisasian tingkat kegagalan dalam perencanaan juga harus dipersiapkan sebagai pencegahan apabila dalam pelaksanaannya rencana tersebut mengalami kendala.

4.1.4.3 Tanggapan Responden mengenai Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Financial distress merupakan sebuah istilah yang sangat dihindari oleh suatu oraganisasi baik itu dilingkup publik maupun swasta. Kebangkrutan tidak hanya melulu terjadi di perusahaan namun juga terjadi dalam sektor publik milik pemerintah. Penyebabnya tidak hanya bisa dilihat dari kinerja laporan keuangan tetapi juga dapat dinalai dari karakteristik pegawai dan kualitas layanan yang diberikan. Oleh karenya penting dilakukan antisipasi terjadinya *financial distress* pada pengelolaan dana desa, sebab tujuan dari dana desa itu sendiri menyangkut kesejahteraan banyak orang khususnya masyarakat di desa tersebut. Jadi pencegahan *financial distress* dalam melakukan pengelolaan dana desa penting dilakukan.

Tabel 4. 29 item Pertanyaan 25

Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	1	-	-
Setuju (S)	2	-	-
Kurang Setuju (KS)	3	9	27
Tidak Setuju (TS)	4	48	192
Sangat Tidak Setuju (STS)	5	25	125
Jumlah Jawaban		82	344
Jawaban Kriteria			410
Presentase			84%

Sumber : Pengolahan Data

Item pertanyaan 25 merupakan pertanyaan negatif, sehingga skor untuk setiap jawaban sebaliknya dari pertanyaan positif. Dari tabel 4.29 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 25

"Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat" adalah 344 dengan presentase sebesar 84%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang bertanggung jawab melapokan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Ada 9 responden yang menjawab Kurang Setuju bahwa mereka harus melaporkan hasil pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dan BPD tidak berkewajiban melaporkan dana desa kepada masyarakat karena tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli atau acuh terhadap setiap penggunaan dana desa dalam tiap tahapnya.

Tabel 4. 30 item Pertanyaan 26

Saya melakukan pelaporan relaisasi penggunaan dana desa sesuai dengan PP No 60 Tahun 2014

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	23	115
Setuju (S)	4	52	208
Kurang Setuju (KS)	3	7	21
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	344
Jawaban Kriteria			410
Presentase			84%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.30 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 26 "Saya melakukan pelaporan relaisasi penggunaan dana desa sesuai dengan PP No 60 Tahun 2014" adalah 295 dengan

presentase sebesar 84%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa telah melaporkan realisasi penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Ada 7 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka memang tidak mengetahui semua isi dalam PP No 60 Tahun 2014.

Tabel 4. 31 item Pertanyaan 27

Laporan realisasi penggunaaan dana desa disampaikan tepat waktu.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	22	110
Setuju (S)	4	55	220
Kurang Setuju (KS)	3	5	15
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	345
Jawaban Kriteria			410
Presentase			84%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.31 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 27 “Laporan realisasi penggunaaan dana desa disampaikan tepat waktu” adalah 345 dengan presentase sebesar 84%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat desa dan BPD yang

mengelola dana desa telah melaporkan realisasi penggunaan dana desa tepat waktu.

Ada 5 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju karena laporan realisasi penggunaan dana desa tidak selalu disampaikan tepat waktu, karena ada beberapa alasan yang menjadi pengambat dalam pelaporan realisasinya. Misalnya, tiba-tiba Siskeudes mengalami *error*.

Tabel 4. 32 item Pertanyaan 28

Berdasarkan PP No 60 tahun 2014, saya harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	20	100
Setuju (S)	4	55	220
Kurang Setuju (KS)	3	7	21
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	341
Jawaban Kriteria			410
Presentase			83%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.32 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 28 “Berdasarkan PP No 60 tahun 2014, saya harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota” adalah 341 dengan presentase sebesar 83%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa

mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Bupati/Walikota.

Ada 7 responden yang menjawab Kurang Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka menjawab kurang setuju karena tidak mengetahui seluruh PP No 40 tahun 2014.

Tabel 4. 33 item Pertanyaan 29

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, laporan realisasi dana desa dilaporankan dua (2) kali dalam satu tahun.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	14	70
Setuju (S)	4	57	228
Kurang Setuju (KS)	3	10	30
Tidak Setuju (TS)	2	1	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	330
Jawaban Kriteria			410
Presentase			80%

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.33 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 29 “Berdasarkan PP NO 60 tahun 2014, laporan realisasi dana desa dilaporankan dua (2) kali dalam satu tahun.” adalah 330 dengan presentase sebesar 80%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Bupati/Walikota.

Ada 11 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang

bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui isi PP No 60 tahun 2014 dan mengetahui bahwa pelaporan dana desa harus dilakukan dalam 3 tahap untuk melakukan pencairan dana desa tersebut.

Tabel 4. 34 item Pertanyaan 30

Laporan realisasi dana desa yang saya berikan telah sesuai dengan realisasinya.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	22	110
Setuju (S)	4	55	220
Kurang Setuju (KS)	3	4	12
Tidak Setuju (TS)	2	1	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	344
Jawaban Kriteria			410
Presentase			84%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.34 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 30 “Laporan realisasi dana desa yang saya berikan telah sesuai dengan realisasinya.” adalah 344 dengan presentase sebesar 84%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa melaporkan laporan realisasi dana desa sesuai dengan realisasinya.

Ada 5 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka merasa terkadang target realisasi tidak sesuai perencanaan sehingga menimbulkan keterlambatan, satu diantaranya berkata bahwa

saat melakukakan perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan matang dan dalam kondisi siap. Apabila tidak, nanti perencanaan anggaran dianggap terburu-terburu dan belum matang sehingga berdampak pada realisasinya.

Tabel 4. 35 item Pertanyaan 31

Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat telah dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	29	145
Setuju (S)	4	53	212
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	357
Jawaban Kriteria			410
Presentase			87%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.35 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 31 “Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat telah dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.” adalah 357 dengan presentase sebesar 87%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat desa dan BPD setuju bahwa dana desa yang diberikan telah dikelola sesuai kebutugan masyarakat setempat.

Tabel 4. 36 item Pertanyaan 32

Dana desa telah dimanfaatkan secara optimal dan tidak pernah terjadi *financial distress* (kesulitan keuangan).

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	20	100
Setuju (S)	4	57	228
Kurang Setuju (KS)	3	4	12
Tidak Setuju (TS)	2	1	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	342
Jawaban Kriteria			410
Presentase			83%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.36 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 32 “Dana desa telah dimanfaatkan secara optimal dan tidak pernah terjadi *financial distress* (kesulitan keuangan).” adalah 342 dengan presentase sebesar 83%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa telah memanfaatkan dana desa secara optimal dan tidak pernah terjadi *financial distress* (kesulitan keuangan).

Ada 5 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju dan tidak setuju karena terkadang penyerapan dana desa kurang optimal dan pernah hampir mengalami *financial distress* karena perhitungan perencanaan anggaran yang kurang matang.

Tabel 4. 37 item Pertanyaan 33

Masyarakat setempat sangat puas dengan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat pengelola Dana Desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	21	105
Setuju (S)	4	53	212

Kurang Setuju (KS)	3	6	18
Tidak Setuju (TS)	2	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	339
Jawaban Kriteria			410
Presentase			83%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.37 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 33 “Masyarakat setempat sangat puas dengan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat pengelola Dana Desa.” adalah 339 dengan presentase sebesar 83%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa setuju bahwa masyarakat setempat sangat puas dengan hasil pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan.

Ada 8 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju dan tidak setuju karena mendengar secara tidak langsung bahwa terdapat masyarakat yang kurang puas karena aspirasi dari mereka masih belum didengar. Padahal dugaan dari masyarakat tersebut salah, aspirasi tersebut didengar namun ada beberapa perencanaan pembangunan desa yang harus lebih diutamakan.

Tabel 4. 38 item Pertanyaan 34

Selama pelaksanaan program Dana Desa tidak pernah terjadi masalah selama pengerjaannya.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor

Sangat Setuju (SS)	5	29	145
Setuju (S)	4	46	184
Kurang Setuju (KS)	3	4	12
Tidak Setuju (TS)	2	3	6
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	347
Jawaban Kriteria			410
Presentase			85%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.38 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 34 “Selama pelaksanaan program Dana Desa tidak pernah terjadi masalah selama pengerjaannya.” adalah 347 dengan presentase sebesar 85%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat desa dan BPD yang mengelola dana desa setuju dalam pelaksanaan program dana desa tidak pernah terjadi masalah selama pengerjaannya.

Ada 7 responden yang menjawab Kurang Setuju dan Tidak Setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa mereka kurang setuju dan tidak setuju karena karena pernah terjadi masalah saat pengerjaan dana desa seperti berselisih pendapat dan terjadi salah sambung sehingga informasi kurang akurat, tetapi semuanya telah terselesaikan.

Tabel 4. 39 item Pertanyaan 35

Masalah dalam pengelolaan keuangan Desa perlu didiskusikan dengan perwakilan masyarakat (transparansi).

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	34	170
Setuju (S)	4	48	192

Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	362
Jawaban Kriteria			410
Presentase			88%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.39 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 35 "Masalah dalam pengelolaan keuangan Desa perlu didiskusikan dengan perwakilan masyarakat (transparansi)." adalah 362 dengan presentase sebesar 88%, nilai tersebut berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa perangkat desa memerlukan pendapat dari perwakilan masyarakat yang diwakili oleh BPD (transparansi).

Tabel 4. 40 item Pertanyaan 36

Perwakilan masyarakat dan perangkat desa adalah satu kesatuan yang penting dalam kemajuan sebuah desa.

Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor
Sangat Setuju (SS)	5	40	200
Setuju (S)	4	42	168
Kurang Setuju (KS)	3	-	-
Tidak Setuju (TS)	2	-	-
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	-	-
Jumlah Jawaban		82	368
Jawaban Kriteria			410
Presentase			90%

Sumber : Pengolahan Data

Tabel 4.42 di atas terlihat bahwa skor pada item pertanyaan 36 "Perwakilan masyarakat dan perangkat desa adalah satu kesatuan yang penting dalam kemajuan sebuah desa." adalah 368 dengan presentase sebesar 90%, nilai tersebut

berada pada urutan presentase sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat desa dan BPD setuju bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang penting dalam kemajuan sebuah desa.

Dari 12 item pertanyaan untuk megetahui tanggapan responden tentang variabel Y yang telah diajukan kepada responden hasil akumulasi persentase pertanyaan didapatkan bahwa nilai persentase tertinggi didapatkan oleh item pertanyaan ke 36 “Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa.” dengan indikator penyelesaian masalah dan nilai persentase sebesar 90%, hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perangkat desa dan BPD untuk mencapai tujuan bersama dari dana desa yaitu kemajuan dan pemberdayaan masyarakat desa sudah sangat baik ada kalanya dalam proses pelaksanaan alokasi menemukan masalah akan tetapi pihak perangkat desa dan BPD tidak hanya akan diam saja, mereka akan berupaya untuk melakukan rapat atau musyawarah agar penyelesaian masalah dapat diselesaikan tanpa memberatkan satu sisi harus adil dan merata. Sedangkan nilai persentase terendah didapatkan oleh item pertanyaan ke 29 “Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, laporan realisasi dana desa dilaporankan dua (2) kali dalam satu tahun.” dengan indikator proses pelaksanaan dan persentase sebesar 80%, hal ini menunjukkan bahwa baik perangkat desa maupun BPD yang bersangkutan dalam proses pelaksanaan aturan yang berkenaan dengan dana desa banyak yang mengetahui dan memahami isi dari PP No 60 tahun 2014 yang mana pelaporan dana desa harus dilakukan dalam 3 tahap untuk melakukan pencairan dana desa

tersebut. Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa perangkat desa dan BPD masih memiliki kekurangan pada literasi perlu adanya kesadaran atas diri sendiri bahwa untuk menciptakan pribadi yang unggul dan kompeten harus diiringi dengan unsur pendukungnya salah satunya literasi/pengetahuan yang mumpuni sehubungan dengan bidang yang ditekuni.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan dengan cara analisis korelasi pearson dan pengolahan datanya menggunakan *software SPSS, Statistics v.25.0 for Windows*. Syarat yang diperlukan untuk menilai apakah pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner itu valid adalah r hitung > r tabeI. Ditaraf signiflkan a= 0, 05 dengan jumlah responden sebanyak 80 (82-2) atau df = N-2 dalam penelitian ini diperoleh r tabeI sebesar 0,2172. Ini ialah hasil perhitungan uji validitas:

Tabel 4. 41

HasiI Uji VaIiditas Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa (X1)

Item Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	0,217	0,698	Valid
2	0,217	0,744	Valid
3	0,217	0,549	Valid
4	0,217	0,694	Valid

5	0,217	0,535	Valid
6	0,217	0,641	Valid
7	0,217	0,733	Valid
8	0,217	0,681	Valid
9	0,217	0,663	Valid
10	0,217	0,681	Valid
11	0,217	0,779	Valid
12	0,217	0,713	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25

Untuk variabel Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1), dari 12 pertanyaan yang diuji terdapat 12 poin pertanyaan yang valid. Maka tidak perlu melakukan proses *trimming* atau menghilangkan instrumen yang tidak valid.

Tabel 4. 42

Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X2)

Hasil Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	0,217	0,328	Valid
2	0,217	0,441	Valid
3	0,217	0,509	Valid
4	0,217	0,541	Valid
5	0,217	0,491	Valid
6	0,217	0,167	Tidak Valid
7	0,217	0,512	Valid
8	0,217	0,473	Valid

9	0,217	0,583	Valid
10	0,217	0,393	Valid
11	0,217	0,549	Valid
12	0,217	0,607	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25

Untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2), dari 12 pertanyaan yang diuji terdapat 11 pertanyaan yang valid dan 1 dinyatakan tidak valid yaitu pada pertanyaan keenam. Sehingga harus dilakukan proses *trimming* atau menghilangkan instrumen yang tidak valid.

Tabel 4. 43

Hasil Uji Validitas Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	0,217	0,836	Valid
2	0,217	0,896	Valid
3	0,217	0,709	Valid
4	0,217	0,847	Valid
5	0,217	0,698	Valid
6	0,217	0,768	Valid
7	0,217	0,701	Valid
8	0,217	0,741	Valid
9	0,217	0,664	Valid
10	0,217	0,672	Valid
11	0,217	0,711	Valid

12	0, 217	0,610	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25

Untuk variabel Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), dari 12 pertanyaan yang diuji terdapat 12 pertanyaan yang valid. Sehingga tidak harus dilakukan proses *trimming* atau menghilangkan instrumen yang tidak valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Sesudah menjalankan Uji Validitas, proses berikutnya yaitu melaksanakan Uji Reliabilitas atau keandalan pada tiap pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Berdasarkan pengujian validitas, uji reliabilitas diuji menggunakan *software SPSS, Statistics v.25.0 for Windows*. Pada penelitian, uji reliabilitas menggunkan *internal consistency*, yang mana instrumen hanya satu kali dicoba. Data didapat selanjutnya dianalisa, perihal ini dipergunakan metode bagi dua dengan *Spearman Brown* (*Split Half*), dengan hasil pengujian :

Tabel 4. 44

Hasil Uji Reliabilitas

Variable	r tabel	r hitung	Keterangan
Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa(X1)	0,217	0,891	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,217	0,881	Reliabel
Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,217	0,922	Reliabel

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Statistics 25

Dari hasil pengujian reliabilitas seluruh variabel memiliki reliabilitas yang baik dengan taraf signifikan 5%. Pada tabel 4.44 apabila dilihat lagi nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel. Hasil reliabilitas yang diperoleh untuk Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) yaitu 0,891 > 0,217; untuk Partisipasi Masyarakat (X2) yaitu 0,881 > 0,217; untuk Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) yaitu 0,922 > 0,217.

4.2.2 Uji PCA (Principal Component Analysis)

Metode *Principal Component Analysis* (PCA) digunakan untuk membuat beberapa variabel baru yang intensitasnya lebih kecil dari variabel pembentuknya tanpa mengurangi nilai dari variabel asli pembentuknya.

Tabel 4. 45
Hasil Uji PCA *(Principal Component Analysis)*

KOMPETENSI	PARTISIPASI	FINANCIAL DISTRESS
X1	X2	Y
-1.30144	0.43819	-1.35517
1.64756	1.6555	1.81979
-1.08761	-1.20241	-0.55372
0.11331	-2.1045	-1.83536
0.11331	-2.1045	-1.83536
0.00291	-0.02937	-0.15508
-0.5671	0.4021	0.1624
-0.26518	1.17931	-0.55372
0.89097	-0.35177	-0.70203
-0.31614	-0.51984	-0.37136
-0.85245	-0.52421	-0.55372
-1.08761	-0.99922	-0.55372
-1.78496	-0.99922	-1.81162
-0.80562	-0.30924	-0.55372
-1.37672	0.87324	-1.60813
1.64756	1.6555	1.81979
-1.04454	-0.99922	-0.55372
-0.84416	-0.99922	-1.81162
1.44978	1.6555	1.81979

-0.68614	-0.99922	-0.55372
0.53717	1.01725	0.78243
-0.69443	-0.99922	-0.32064
-0.88724	-0.99922	-0.55372
-0.27674	0.16967	-0.3415
-0.27674	0.16967	-0.3415
-0.27674	0.16967	-0.3415
-0.27674	0.16967	-0.3415
1.44978	1.45231	1.64047
1.44978	1.45231	1.66641
0.03218	0.90281	-0.13017
1.44978	1.6555	1.66641
1.64756	1.37011	1.81979
1.64756	1.6555	1.81979
-0.83667	-0.99922	-1.81162
1.64756	1.6555	1.81979
0.6914	1.44052	1.81979
1.64756	1.44052	1.81979
1.15808	1.6555	1.81979
1.64756	1.6555	1.81979
-1.08761	-0.78424	-0.55372
1.11954	-0.30002	0.41401
-0.35921	0.16719	-0.36928
-0.01901	0.58784	0.47266
1.44799	0.16967	0.47816
1.43141	0.67005	0.60519
-1.08761	-0.99922	0.78755
-0.4352	-0.52421	-0.69583
1.04979	0.09126	0.41918
-1.2948	-1.25221	-0.73304
-1.09442	-1.12571	-0.55372
-0.69363	-0.99922	-0.55372
-1.2948	-0.73482	-0.73304
-1.09442	-0.99922	-0.73304
-0.69363	-1.12571	-0.55372
-1.2948	-1.12571	-0.55372
-1.09442	-0.79603	-0.55372
-0.69363	-0.99922	-0.73304
0.30978	-0.40513	0.1867
1.24936	-0.40513	1.27962
1.03321	-0.40513	0.85133
-0.09265	-0.1463	0.98592
-0.10675	0.96433	0.22153

0.97604	0.35398	-0.01296
0.75988	-0.06219	0.23722
-0.36598	0.56896	-0.61787
0.85022	0.56896	-0.01296
1.24936	0.56896	-0.01296
1.03321	1.27017	-0.12397
0.05059	1.15092	0.62438
-1.08761	-0.49884	-0.32064
0.29916	0.11672	0.94692
-0.87975	-0.99922	-0.55372
-1.08761	-0.52421	-0.55372
-0.88804	-0.52421	-0.55372
-0.88804	-0.72741	-0.55372
-0.2798	-0.02083	-0.94678
-0.08461	-0.23581	-0.5453
-1.08761	-1.14039	-0.15508
0.59695	0.26053	-0.37136
-0.63639	-0.79603	-0.15508
1.10712	1.41532	-0.11797
-0.16806	-1.02025	-0.15508

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel 4.45 tersebut merupakan jumlah faktor variabel yang terbentuk dari uji PCA *(Principal Component Analysis).* Semula pada variabel dependen Y (Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolahan Dana Desa) Maupun variabel independen X1 (Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa) memiliki faktor variabel sebanyak 12, namun untuk variabel independen X2 (Partisipasi Masyarakat) hanya memiliki 11 faktor variabel karena item pertanyaan pada X2 pada item pertanyaan ke 6 tidak lolos uji validitas. Setelah melakukan uji PCA terbentuklah faktor variabel baru untuk variabel X1, X2 dan Y yang mana variabel PCA yang terbentuk tersebut mampu menjelaskan variabel asli pembentuknya

4.2.2.1 Uji Validitas PCA

Dalam PCA (Principal Component Analysis) terdapat berbagai tahap yang perlu ditempuh oleh peneliti agar mampu melakukan analisis PCA dengan sempurna salah satunya dengan melihat nilai terhadap uji *Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO-MSA) yang mana nilainya harus lebih besar 0.5.

Tabel 4. 46

Hasil Uji *KMO and Barlett's Test* (X1)

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.816
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	530.672
	df	66
	Sig.	0.000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25

Pada tabel 4.46 tabel hasil uji *KMO and Bartlett'sTest* untuk variabel X1 (Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa) membuktikan kalau nilai KMO = 0,816, yaitu terletak di antara 0, 5 serta 1, jadi analisis faktor dapat digunakan. Sebaliknya uji *Barlett Test* dilakukan guna melihat apakah betul variabel bebas yang digunakan berkorelasi atau tidak. Hipotesisnya adalah :

H_0= tidak ada korelasi antar variable bebas

H_1= ada korelasi antar variable bebas

Hasil pada pengujian ini dengan melihat nilai ρ-value (signifikansi). Peneliti menerima H_0, apabila Sig. >0 ,05. Tabel 4.46 hasil uji *KMO and Bartlett's Test* menjelaskan kalau nilai chi-square = 530.672 dan derajat kebebasan (df) 66. Dengan melihat tabel tersebut, nilai ρ-value(0,000) <0, 05, maka H_0 tidak diterima, berarti antar indikator variable X1 terdapat korelasi (hubungan).

Tabel 4. 47

Hasil Uji *KMO and Barlett's Test* (X2)

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.809
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	465.481
	df	55
	Sig.	0.000

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 25

Pada tabel 4.47 tabel hasil uji *KMO and Bartlett'sTest* untuk variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) membuktikan kalau nilai KMO = 0,809, yaitu terletak di antara 0, 5 serta 1, jadi analisa faktor dapat digunakan. Sebaliknya uji *Barlett Test* dilakukan guna melihat apakah betul variabel bebas yang digunakan berkorelasi atau tidak. Hipotesisnya adalah :

H_0= tidak ada korelasi antar variable bebas

H_1= ada korelasi antar variable bebas

hasil pada pengujian ini melihat nilai ρ-value(signifikansi). Peneliti menerima H_0, apabila Sig. >0 ,05. Tabel 4.47 hasil uji *KMO and Bartlett's Test* menjelaskan kalau nilai chi-square = 465.481 dan derajat kebebasan 55. Dengan melihat tabel tersebut, nilai ρ-value(0,000) <0, 05, maka H_0 tidak diterima, berarti antar indikator variable X2 terdapat korelasi (hubungan).

Tabel 4. 48

Hasil Uji *KMO and Barlett's Test* (Y)

KMO and Bartlett's Test	
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	0. 827

Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	713.795
	Df	66
	Sig.	0. 000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25

Tabel 4.48 tabel hasil uji *KMO and Bartlett'sTest* untuk variabel Y (Pencegahan Financial Distress Dalam Pengelolaan Dana Desa) membuktikan kalau nilai KMO= 0, 827, yaitu terletak di antara 0, 5 serta 1, jadi analisisi faktor dapat dilakukan. Sebaliknya uji *Barlett Test* dilakukan guna melihat apakah betul variabel bebas yang digunakan berkorelasi atau tidak. Hipotesisnya adalah :

H_0= tidak ada korelasi antar variable bebas

H_1= ada korelasi antar variable bebas

Hasil pada pengujian ini melihat nilai ρ-value (signifikansi). Peneliti menerima H_0, apabila Sig. >0 ,05. Tabel 4.47 hasil uji *KMO and Bartlett's Test* memperlihatkan jika nilai chi-square = 713.795 dan derajat kebebasan 66. Dengan melihat tabel tersebut, nilai ρ-value (0, 000) <0,05, maka H_0 tidak diterima, artinya antar indikator variable Y terdapat korelasi (hubungan).

Tabel 4. 49

Hasil Component Matrix (X1,X2 dan Y)

COMPONENT MATRIX					
X1		X2		Y	
KMP1	0.701	PRT1	0.676	FDS1	0.843
KMP2	0.737	PRT2	0.59	FDS2	0.899
KMP3	0.530	PRT3	0.697	FDS3	0.713
KMP4	0.672	PRT4	0.740	FDS4	0.856
KMP5	0.512	PRT5	0.58	FDS5	0.697
KMP6	0.625	PRT7	0.692	FDS6	0.776
KMP7	0.756	PRT8	0.549	FDS7	0.712

KMP8	0.704	PRT9	0.813	FDS8	0.737
KMP9	0.659	PRT10	0.695	FDS9	0.653
KMP10	0.687	PRT11	0.758	FDS10	0.650
KMP11	0.784	PRT12	0.801	FDS11	0.710
KMP12	0.738			FDS12	0.607

Sumber: Data diolah peneliti

Pada tabel 4. 49 dapat dilihat faktor tersebut terbentuk dari komponen matriks tiap indikator variabel X1 (Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa), X2 (Partisipasi Masyarakat) dan Y (Pencegahan Financial Distress Dalam Pengelolaan Dana Desa) memiliki jumlah lebih dari 0. 500 yang mana menandakan bahwa indikator variabel yang membentuk variable X1, X2, serta Y merupakan valid. Pada variabel X2 terdapat perbedaan jumlah sampel (n), karena pada uji keabsahaan data untuk indikator variabel X2 yang diwakili oleh item pertanyaan 6 dinyatakan tidak valid, karena nilainya lebih kecil dari r tabel.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas PCA

Selain melihat kevalidan nilai dari indikator variabel yag membentuk variabel, penelit juga harus mengetahui seberapa reliable atau konsisten indikator variabelnya.

Tabel 4. 50

Hasil Uji Realibilitas (X1, X2 dan Y)

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	0.891	12
X2	0.881	11
Y	0.922	12

Sumber: Data diolah peneliti

Pada tabel uji reliabilitas untuk X1, X2, serta Y nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0. 700 terbukti dengan jumlah *Cronbach's Alpha* pada X1 sebanyak 0.891, pada X2 sebanyak 0.881 dan Y sebanyak 0.922. Pada variabel X2 terdapat perbedaan jumlah sampel (n), karena pada uji keabsahaan data untuk indikator variabel X2 yang diwakili oleh item pertanyaan 6 dinyatakan tidak valid, karena nilainya lebih kecil dari r tabel.

4.2.3 Regresi PCA

Setelah melakukan pengujian analisis komponen utama terbentuklah faktor yang mewakili nilai X1, X2 dan Y, dari hasil faktor tersebut akan diregresikan. Analisis regresi merupakan teknik analisis statistik yang dapat membuat model serta menjelaskan pengaruh yang terjadi pada dua ataupun lebih variabel, salah satu yang sering digunakan adalah model regresi linier berganda. Hubungan dalam model tersebut bisa disimpulkan pada bentuk persamaan yang mengaitkan antara variabel dependen (Y) terhadap variabel independennya (X). Analisisi regresi pada penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda. Umumnya regresi ini dilakukan untuk melihat kaitan pada dua atau lebih variable bebas pada variable terikatnya. Pada regresi PCA prosesnya sama seperti regresi linier berganda akan tetapi variabel yang digunakan merupakan hasil dari metode PCA, sehingga dinamakan regresi PCA. Persamaan regresi yang terbentuk, yaitu :

Tabel 4. 51

Hasil Analisis Regresi PCA

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.139E-07	0.065		0.000	1.000
	KOMPETENSI	0.503	0.095	0.503	5.317	0.000
	PARTISIPASI	0.371	0.095	0.371	3.927	0.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN FINANCIAL DISTRESS

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 25

Persamaan ini diperolah dengan proses analisa berikut:

Y= 4.139E-07 + 0.503 X1+ 0. 371 X2

Pada model persamaan diatas bisa diuraikan :

1. Tanpa adanya pengaruh, nilai X rata-rata Y adalah 4.139E-07 dan anggapan variable lainnya dianggap konstan.
2. Koefisien regresi dari X1 (Komponen Perangkat Pengelola Dana Desa) sebesar 0,503 dan bernilai positif, hal ini menunjukan bahwa korelasi antar variabel tersebut sejalan. Artinya, apabila X1 meningkat variabel Y pula akan meningkat. Bisa diartikan bahwa bahwa setiap terjadi peningkatan kompetensi pada perangkat pengelola dana desa akan meningkatkan pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa dengan anggapan variabel lain selain X1 adalah konstan (tetap)
3. Koefisien regresi pada X2 (Partisipasi Masyarakat) sebesar 0,371 dan bernilai positif, hal ini menunjukan bahwa korelasi antar variabel tersebut sejalan. Artinya, apabila X2 meningkat variabel Y pula akan meningkat. Dapat diartikan bahwa bahwa setiap terjadi peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa dengan anggapan variabel lain selain X2 adalah konstan (tetap).

4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Analisa koefisien determinasi dlakukan untuk melihat sejauh mana variable independen mempengaruhi variable dependennya.

Tabel 4. 52

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812[a]	0.659	0.651	0.59102409
a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, KOMPETENSI				

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 25

Menurut tabel tersebut, bisa dilihat besarnya koefisien determinasi yaitu :

$$Kd = r^2 \text{ x } 100\%$$

$$= (0{,}812)^2 \, x \, 100\%$$

$$= 65{,}93\ \%$$

Menurut tabel dan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien determinasi adalah sebanyak 0,659 yang mana pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa (Y) dipengaruhi oleh kompetensi perangkat pengelola dana desa (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) sebesar 65,93% sedangkan sisanya 0,3407 atau 34,07% dijelaskan oleh variabel lain selain pada penelitian. Sedangkan nilai R (koefisien korelasi berganda) menjelaskan hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependennya. Pada penelitian ini nilai R sebesar 0.812 yang menujukkan bahwa hubungan kompetensi perangkat pengelola dana desa (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) terhadap pencegahan

financial distress dalam pengelolaan dana desa (Y) sangat kuat sebesar 81,2%

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terhadap penelitian terdiri atas Uji Normalitas, Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah pada model regresi, variable penganggu atau residualnya berdistribusi normal/tidak. Uji normalitas yang dipakai oleh peneliti menggunakan uji *Jarque Bera* dengan dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* dan nilai *chi square* tabel.

Tabel 4. 53

Hasil Uji *Skewness-Kurtosis*

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Standardized Residual	82	-0. 294	0. 266	0. 098	0. 526
Valid N (listwise)	82				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dalam tabel 4.53 bisa dirumuskan nilai JB, sebanyak

$$JB = n\left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24}\right]$$

$$JB = 82\left[\frac{(-0.294)^2}{6} + \frac{(0.098-3)^2}{24}\right]$$

$$JB = 82\left[\frac{(-0.086436)}{6} + \frac{(-2.902)^2}{24}\right]$$

$$JB = 82\,[0.014406 + (-0.350900]$$

$JB = 29.95511$

Sedangkan nilai chi square pada tabel dengan df 81 (82-1) sebesar 1003.0095, maka keputusan yang dilakukan oleh peneliti adalah menyatakan kalau data berdistribusi normal sebab nilai JB *test* lebih kecil dibanding nilai *chi square* tabel atau 29.95511 < 1003.0095.

4.2.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ada pertidaksamaan *variance* dan residual pada pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dan residual dari pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya memiliki kesamaan atau konstan, disebut homoskedastisitas. Namun, apabila terdapat perbedaan/ketidaksamaan disebut heterokedastisitas. Untuk penelitian ini digunakan uji glejser untuk uji heterokedastisitasnya.

Tabel 4. 54

Hasil Uji *Glejser*

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.286	0.026		10.892	0.000
	KOMPETENSI	0.053	0.063	0.138	0.852	0.397
	PARTISIPASI	0.018	0.051	0.056	0.346	0.731
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel 4.54 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel X1 yaitu Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa sebanyak 0.604 dimana lebih besar dibanding nilai kesalahan (α) sebesar 0. 05 sedangkan variabel X2 yaitu Partisipasi Masyarakat memiliki jumlah signiflkansi 0.

827 yang juga lebih banyak dibanding nilai kesalahan (α). Jadi dari data tersebut dapat kita asumsikan bahwa tidak ada permasalahan heterokedastisitas.

4.2.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah situasi dimana pada model regresi ada korelasi pada residual periode t dan residual (t-1) sebelumnya, dan diharapkan pada mpenelitian tidak terdapat masalah tersebut. Uji Durbin- Watson dipergunakan pada penelitian ini untuk uji autokorelasi.

Tabel 4. 55

Hasil Uji *Durbin-Watson*

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812[a]	0.659	0.651	0.59102409	1.817
a.Predictors: (Constant), PARTISIPASI, KOMPETENSI					
b.Dependent Variable: PENCEGAHAN FINANCIAL DISTRESS					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dari tabel 4. 55, bisa dikatakan, bahwa (dw) atau hasil tes Durbin-Watson sebesar 1.817, sedangkan (dL) atau batas bawah ditabel Durbin-Watson dan n (sampel) sebanyak 82 serta k (jumlah variable) sebanyak 2 nilainya sebesar 1.5915 sedangkan untuk (dU) atau batas atas ditabel Durbin-Watson nilainya sebesar 1.6913. Sedangkan nilai 4-dU (4-1.6913) sebesar 2.3087 lalu untuk nilai 4-dL (4-1.5915) sebesar 2.4085

Tabel 4. 56

Pedoman Klasifikasi Nilai *d*

Range	Keputusan
0<dw<dL	Terdapat auto korelasi yang butuh penyempurnaan.

dL<dw<dU	Terdapat auto korelasi positif tapi lemah, bila diperbaiki akan semakin bagus.
dU<dw<4-dU	Tak terdapat auto korelasi.
4-dU<dw<4-dL	Terdapat auto korelasi lemah, bila diperbai akan semakin bagus.
4-dL<dw	Terdapat autokorelasi serius

Sumber : Ghozali (2016:108)

Dengan melihat pedoman tabel uji auto korelasi di atas, apabila peneliti menginginkan bahwa data yang diteliti terbebas dari masalah autokorelasi dU < dw < 4-dU sehingga persamaan yang terbentuk adalah 1.6913 < 1.817 < 2.3087. Dari persamaan tersebut dapat dkatakan bahwa data tidak terkena masalah autokorelasi.

4.2.6 Uji Penarikan Kesimpulan

4.2.6.1 Hasil Uji Signiflkansi Secara Parsial (Uji t)

Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari varlabel independen secara individu pada variabel dependen dapat digunakan uji T. Variabel independen dikatakan mempunyai pengaruh pada variabel dependen bila variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi(sig) dibawah 0,05, selain itu untuk melihatnya juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung serta T tabel dengan keputusan menerima atau menolak hipotesis.

Untuk melihat pengaruh kompetensi perangkat pengelolah dana desa serta partisipasi masyarakat pada pencegahan *financial distress* dalam pengelolahan dana desa, hipotesis yang digunakan yaitu :

Secara Parsial :

H_1 :	Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa berpengaruh terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolahan Dana Desa.
H_2 :	Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolahan Dana Desa.

Dengan dasar keputusan yang akan diambil ialah :

a. Apabila probabilitas(signifikansi) >0.05 (α) atau Thitung ≤Ttabel maka hipotesis tidak teruji artinya keputusan yang diambil oleh penulis menyatakan bahwa H_a ditolak dan menerima H_0. Bila melakukan uji parsial.

b. Apabila probabilitas(signiflkansi) <0.05 (α)atau Thitung ≥Ttabel maka hipotesis teruji artinya keputusan yang diambil oleh penulis menyatakan bahwa H_a diterima dan menolak H_0. Bila melakukan uji parsial

Tabel 4. 58

Hasil Analisis Uji Statistik Parsial (Uji T)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.139E-07	0.065		0.000	1.000
	KOMPETENSI	0.503	0.095	0.503	5.317	0.000
	PARTISIPASI	0.371	0.095	0.371	3.927	0.000
a. Dependent Variable: PENCEGAHAN FINANCIAL DISTRESS						

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25

Tabel hasil analisis statistik diperoleh dengan df = n-k yaitu 79 (82-3) dimana n ialah jumlah sampel/data serta k ialah jumlah variable

independen dan dependennya, pada penelitian ini nilai t tabel sebesar 1,99045. Hasil interpretasi uji T terhadap regresi, yaitu:

1. Variabel X1 (Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa) signifikan terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa, karena :
   a. Nilai probabilitas dari X1 sebanyak 0. 000 <0. 05, jadi penulis akan menerima H_a serta menolak H_0. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel independen X1 signifikan terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa.
   b. Variabel independen X1 memiliki T hitung sebanyak 5. 317 serta T tabel sebanyak 1. 990 jadi T hitung >T tabel sehingga keputusan penulis adalah menerima H_a dan menolak H_0. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen X1 signifikan terhadap variabel dependen Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) signifikan terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa, karena :
   c. Nilai probabilitas dari X2 sebanyak 0. 000 <0. 05, jadi penulis akan menerima H_a serta menolak H_0. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel independen X2 signifikan terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa.
   d. Variabel independen X2 memiliki T hitung sejumlah 3 .927 serta T tabel sejumlah 1,990 jadi T hitung >T tabel sehingga keputusan penulis adalah menerima H_a dan menolak H_0.

Sehingga dapat dikatakan jika variabel independen X2 signifikan terhadap variabel dependen Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Variabel X1 (Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa) setelah diuji dengan Uji T terlihat bahwa varlabel independen tersebut berpengaruh signifikan pada pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa. Maka bisa dikatakan bahwa H_1 diterima. Hasil penelitian tersebut searah dengan penelitian Mada, dkk(2017) serta Ekasari(2017) dalam penelitiannya mengatakan jika kompetensi perangkat pengelolah dana desa memiliki pengaruh yang besar pada akuntabilitas pengelolahan dana desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi yang dimiliki oleh perangkat pengelola dana desa, pencegahan terjadinya *financial distress* dalam pengelolahan dana desa akan meningkat pula. Perangkat pengelola dana desa dengan kompetensi yang baik dapat diketahui berdasarkan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan juga pelatihan yang diikuti. Selain itu variabel akuntabilitas dalam penelitian sebelumnya mewakili asas dalam pengelolahan dana desa(transparan, akuntable, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran).

Variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) setelah diuji menggunakan Uji T terlihat bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan pada pencegahan *financial distress*. Sehingga bisa dikatakan bahwa H_2 diterima, artinya partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan pada pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mirna, dkk (2019) yang menjelaskan tingginya tingkat pasrtisipasi masyarakat mempengaruhi tingkat pengelolaan anggaran desa. Hal

ini mengindikasikan bahwa semakin besar masyarakat yang berpartisipasi dalam proses perencanaan hingga pengawasan pada dana desa, maka pencegahan terjadinya *financial distress* dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud.

4.2.6.2 Hasil Uji Siginikansi Simultan (Uji F)

Uji secara serentak atau bersama-sama untuk melihat pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Bentuk hipotesisnya ialah :

H_3 :	Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat mempengaruhi pada Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa.

Dengan dasar keputusan yang akan diambil adalah :

a. Apabila probabilitas(F *statistic*) <0. 05 (α)atau F hitung ≥F tabel sehingga hipotesis teruji dengan keputusan yang diambil oleh penulis menyatakan bahwa H_3 diterima dan menolak H_0 bila melakukan uji simultan. Perihal tersebut berarti ada pengaruh yang signifikan pada Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat mempengaruhi terhadap Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa.
b. Jika probabilitas (F *statistic*) >0. 05(α) atau F hitung ≤F tabel sehingga hipotesis tidak terbukti dengan keputusan diambil oleh penulis menyatakan bahwa H_3 ditolak dan menerima H_0 bila

melakukan uji simultan. Perihal itu berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pada Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil pengujian Nilai *R-Square* pada *Model Summary* didapat nilai koefisien determinasi (R^2) pada persamaan regresi sebanyak 0, 6593. Artinya setiap terjadi perubahan dalam desa untuk menangani pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa sebesar 65.93%%, hal tersebut dipengaruhi oleh kompetensi perangkat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat. Namun, sebesar 34,07% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari kompetensi perangkat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat yang tidak ada pada penelitian.

Tabel 4. 59

Model *Summary*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.812[a]	0. 659	0. 651	0.59102409
a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, KOMPETENSI				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) pada Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan dilakukan uji F untuk menguji keterkaitan antara dua variabel independen dengan variabel dependennya dengan tingkat kesalahan pada taraf 5% (0,05). Hasil ujinya yaitu:

Tabel 4.60

Hasil Anova

ANOVAa						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53.405	2	26.702	76.443	.000b
	Residual	27.595	79	0.349		
	Total	81.000	81			
a. Dependent Variable: PENCEGAHAN FINANCIAL DISTRESS						
b. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, KOMPETENSI						

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 25

Nilai F hitung di atas dibanding dengan F tabel pada distribusi F, dimana nilai F tabel pada taraf 5 % dan df (n-k-1) 82 - 3 - 1= 78. Dari perhitungan df di atas bisa dilihat bahwa nilai F tabel sebesar 3,11. Berdasarkan hasil pengujian, Nilai F hitung sebesar 76.443 yang mana F hitung > F tabel. Selain itu nilai probabilitas (F-Statistic) sebanyak 0, 000 (F-Statistic) <0. 05 (α) yang berarti hipotesis terbukti dan keputusan peneliti adalah menerima H_3.

Tabel 4. 61

Kesimpulan Hasil Secara Menyeluruh

Nilai F hitung	Nilai F tabel	Kesimpulan
76.443	3. 11	Signifikan

Sumber : Data diolah peneliti

Tabel tersebut menunjukkan jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka hasil pengujiannya signifikan. Maka bisa disimpulkan jika variabel independen Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) serta Partisipasi Masyarakat (X2) secara bersamaan mampu mempengaruhi dengan signifikan pada variable dependen Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y).

4.2.6.3 Implikasi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh yang terjadi antara Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Pencegahan Financial Distress dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada responden di dapattkan hasil bahwa Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa pada Kantor Desa di wilayah Kecamatan Karangploso sudah cukup baik hal ini didukung dengan tingginya persentasi dari jawaban yang telah dijawab oleh responden berkenaan dengan indikator yang mendukung kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan efektivitas. Dalam upaya untuk pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa, seluruh perangkat pengelola dana desa dan BPD berusaha menjadi pribadi yang unggul dan kompeten dengan selalu berusaha mengikuti pelatihan atau rapat sehubungan dengan dana desa dan selalu berusaha untuk memperbaiki *soft skill* maupun *hard skill* pada diri mereka agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) yang diwakili oleh BPD di 9 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Karangploso dengan indikator pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kepercayaan menunjukkan hasil bahwa, keterlibatan masyarakat secara aktif tentang upaya pencegahan *financial distress* sudah cukup baik. Penjelasan tersebut didukung dengan fakta bahwa masyarakat selalu ingin tahu bagaimana arah pengalokasian dana desa itu dilaksanakan sejauh mana dana desa tersebut sudah disalurkan, untuk kepentingan apa saja dana desa

tersebut disalurkan. Terkadang tidak hanya melibatkan BPD namun beberapa masyarakat ikut mengambil peran di dalamnya seperti, apabila ada rapat yang tidak hanya mengundang BPD tetapi juga kepala dusun dan perwakilan dari tiap RW/RT, masyarakat yang ikuet serta selalu antusias untuk memberikan kritik atau masukan yang membangun dalam alokasi dana desa dan juga dari pihak perangkat desa tidak menolak apabila masyarakat menuntut adanya transparansi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa sangat tinggi.

Untuk variabel Pencegahan *Financial Distress* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y) pada Kantor Desa di wilayah Kecamatan Karangploso sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh fakta terkait kompetensi perangkat pengelola dana desa dan pastisipasi masyarakat yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Sehubungan dengan pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa jika dilihat dari sisi perangkat desa maupun BPD siapa yang berperan lebih baik dalam mencegah terjadinya *financial distress* sebagai peneliti saya akan menjawab keduanya sangat berperan baik. Dalam kantor desa tentu yang paling berperan besar adalah kepala desa karena sebagai seorang pemimpin, kepala desa harus memberikan contoh yang baik agar menjadi panutan bagi rekan kerjanya selain itu kepala desa juga dituntut bertindak adil dalam menangani segala permasalahan baik yang berhubungan dengan dana desa maupun tidak. Selain itu BPD juga berperan sangat besar apabila dalam pemerintah desa telah terjadi permasalahan yang belum mampu terselesaikan. Seperti yang terjadi di Desa Ngenep, BPD yang mengindikasi adanya kesalahan dalam anggaran dana

desa terdapat penyelewangan dana untuk hal yang bersifat pribadi karena di luar kepentingan dana desa, dari fakta tersebut bisa dikatakan bahwa BPD menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan desa.

BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kompetensi perangkat pengelola dana desa serta partisipasi masyarakat terhadap pencegahan *financial distress* dalam pengelolaan dana desa di kantor desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dapat bisa ditarik kesimpulan selaku berikut :

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Kompetensi Perangkat Pengelolah Dana Desa pada Kantor Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang perangkat desanya telah mempunyai kompetensi yang baik.
2. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawratan Desa (BPD) pada Kantor Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten MaIang partispasi masyarakatnya telah berjalan baik.
3. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolahan Dana Desa di Kantor Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sudah terwujud.
4. Berdasarkan hasil dan pengujian penelitian secara parsial, Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) berpengaruh secara positif signifikan pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa (Y) yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso,

Kabupaten Malang. Dan Partisipasi Masyarakat (X2) juga berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa (Y) yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

5. Berdasarkan hasil dan pengujian penelitian secara simultan, Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1) serta Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh secara positif signifikan pada Pencegahan *Financial Distress* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa (Y) yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

5. 2 Saran

Berdasarkan observasi penelitian, pengumpulan serta pengolahan data, juga berdasarkan pada kesimpulan serta keterbatasan pada penelitian ini, ada pula saran- saran yang bisa diberikan lewat hasil penelitian ini supaya memperoleh perihal yang lebih baik, penulis berupaya membagikan anjuran sebagai berikut :

1. Bagi perangkat desa yang mengelola dana desa di Kantor Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang untuk senantiasa bersedia melakukan evaluasi diri dengan mencoba meningkatkan berbagai kompetensi dalam mengelola dana desa yang dapat membentuk kepribadian mereka yang lebih unggul seperti dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai pengelolaan dana desa, memperbaiki *soft skill* dan *hard skill* yang mampu mereka latih dengan berdiskusi dengan sesama rekan perangkat desa. Selain itu, juga diharapkan perangkat desa yang berada di Kantor Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang melakukan evaluasi sehubungan dengan peraturan

yang termuat dalam Undang-Undang Desa, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang tenaga kerja yang kurang efektif dan efisien karena usia yang sudah tidak lagi produktif. Karena saat pemilihan sampling banyak perangkat desa yang gugur pada penelitian ini karena dalam UU Desa sudah dijelaskan untuk usia perangkat desa antar 20-40 tahun, akan tetapi pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang masih menggunakan perangkat desa di usia lanjut dengan usia lanjut dengan alasan bahwa tenaga merka masih dibutuhkan disini, namun seharusnya ada regenerasi di dalamnya.

2. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dijaga interaksi dua arah antara perangkat desa dengan masyarakat terlebih dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena, BPD merupakan sebuah jembatan paling utama untuk penyampaian aspirasi masyarakat sehingga perangkat desa dapat mendengar apa keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat dan kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ampeldento. (2021). *Profil Desa*.,(http://desa-ampeldentokarangploso.malang kab .go.id/, diakses pada18 Maret 2021)

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan ke-15,*. Jakarta:: Rineka Cipta.

Arza, M. S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi, Vol. 7, No 1, April 2019,*, Hal 1425-1436.

Bayu, D. (2020). Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semesteri22020, diakses pada 27 Oktober 2020)

Bocek. (2021). *Profil Desa (Kondisi Desa)*. (http://bocek.sideka.id/profil-desa/ diakses pada 18 Maret 2021)

BPKP, P. P. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa.* Bogor: Pundiklaswat BPKP.

BPS, K. M. (2020). Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Tahun 2015 - 2020, (https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/14/403/penduduk-luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-tahun-2015-2020.html, diakses pada 26 Oktober 2020)

Dewi, I. P. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Desa terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.4,No.1*, Hal 24-42.

Donowarih. (2021). *Profil Desa (Sejarah Desa)*.(http://donowarih.sideka.id/profil/sejarah/, diakeses pada 18 Maret 2021)

DPR, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* Jakarta: Sekretariat.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Girimoyo. (2021). *Profil Desa Girimoyo*. (http://desa-girimoyo.malangkab.go.id/, diakses pada 18 Maret 2021)

Hermita, U. b. (2009). Principal Component Analysis (PCA) Dan Aplikasinya Dengan SPSS. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 03, No. 2* , Hal. 97-101.

Ihsanuddin. (2018). *Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp.40,6 Miliar.*(https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all, diakese pada 25 Oktober 2020)

Indrianty, N. (2018). Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Di Indonesia, . *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper 3*, Hal 319-337.

Jensen&Meckling. (1976). *The Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics,*, 3:3015-360.

Karangploso. (2020). *Profil Kecamatan (Gambaran Umum)*. (http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title=Karangploso-gambaran-umum-2, diakses pada 17 Maret 2021)

Karangploso, Kecamatan. (2020). *Jumlah Penduduk Tahun 2020*.(http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title=karangploso-opd-jumlah-penduduk-tahun-2020, diakses pada 26 Oktober 2020)

Kepuharjo. (2020). *Profil (Gambaran Umum)*. (http://desa-kepuharjo.malangkab.go.id/desa/default/slug?title=karangploso-kepuharjo-gambaran-umum-desa-kepuharjo, diakses pada 18 Maret 2021)

Keuangan, Kementrian. (2020). *Anggaran Dana Desa 2015-2020*.(https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501, diakses pada 26 Oktober 2020)

Keuangan, Kementrian. (2020). *Target Realisasi Dana Desa 2015-2020*. (https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-dana-desa-2015-2020-1584416608, diakses pada 26 Oktober 2020)

Klimoski, D. D. (n.d.). *Advancing Accountability Theory dan Practice: Introduction to The Human Resource Management Review Special Edition*, . *Human Resource Management Review, Vol.14, Hal. 1-17*.

Komariyah, E. E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: CV. Alfabeta.

Kustono, A. P. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokomno Kabupaten Jember Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Vol. IV (2)*, Hal.141-147.

Mada, S. K. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, Vol.02*, Hal.106-115.

Mirna Indriani, N. H. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.7*, Hal.111-130.

Morissan. (2008). *Manajemen Public Relation : Strategi Menjadi Humas Profesional,*. Jakarta: Kencana.

Nana, D. (2017). *Karangploso: Segitiga Emas yang Secepatnya Harus Terlegalisasi*.(https://jatimtimes.com/baca/163993/20171222/211819/karangploso-segitiga-emas-yang-secepatnya-harus-terlegalisasi, diakses pada 15 Januari 2021)

Nana, D. (2018). *Ini Arahan Program Kawasan Pertumbuhan Cepat Karangploso*. https://jatimtimes.com/baca/169977/20180403/094721/ini-arahan-progra-m -kawasan-pertumbuhan-cepat-karangploso, diakses pada 15 Januari 2021)

Negeri, Kementrian Dalam. (2018). Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pegelolaan Keuangan Desa.

Ngenep. (2021). *Pofil Desa*. (http://desa-ngenep.malangkab.go.id, diakses pada 18 Maret 2021)

Ngijo. (2021). *Profil Desa*. (http://desa-ngijo.malangkab.go.id, diakses pada 18 Maret 2021)

Plat., H. D. (2002). *Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias*. *Journal of Economics and Finance., Vol.26 No. 2* , Hal. 184-199.

Priyanto. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Sidoarjo: Zifatama.

Rakasiwi, G. (2021). *Polisi Tetapkan Kades di Malang ini Jadi Tersangka Perzinahan,*. Retrieved Januari 20, 2021, from https://jatimnow.com/baca-32611-polisi-tetapkan-kades-di-malang-ini-jadi-tersangka-perzinahan

Ramadhan, A. (2020). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*. (https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019, diakses pada 31 Oktober 2020

RI, Kementrian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa.*

Sugiarti, E. d. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan. *Conference: Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, Hal. 580-590.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan kedelapaan.* Bandung: Alfabeta.

Taufiq, M. (2020). *Kades di Malang Korupsi Dana Desa Buat Bebaskan Anak yang Ditangkap Polisi*. (https://jatim.suara.com/read/2020/09/22/144921/kades-di-malang-korupsi-dana-desa-buat-bebaskan-anak-yang-ditangkap-polisi, diakses pada 31 Oktober 2020)

Tawangargo. (2021). *Profil Desa (Sejarah dan Demografi Tawangargo)*. (http://tawangargo.sideka.id/, diakses pada 18 Maret 2021)

Tegalgondo. (2021). *Profil Desa*. (http://desa-tegalgondo.malangkab.go.id/, diakses pada 18 Maret 2021)

Umami, R. &. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi,, Vol. 6 No.11* , Hal. 74-80. doi:https://doi.org/10.1063/1.481887.

Walker, S. J. (2007). *Explanators of Local Government Distress*. *ABACUS, Vol. 43, No. 3* , Hal 396-417.

Wibowo. (Manajemen Kinerja, Edisi Lima). *2017.* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Widyatama, A. &. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal tehradap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalan Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02*.

Yunianto, T. (2019). *Dana Desa Dinilai Tak Berhasil Kurangi Kemiskinan*. (https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a4c3dbafd3/dana-desa-dinilai-tak-berhasil-kurangi-kemiskinan, diakses pada 26 Oktober 2020)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Perizinan Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Webside: http://www.maiangkab.go.id
M A L A N G - 6 5 1 1 9

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/ 410 /35.07.207/2021
Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
Nomor : 976/UN10.F02.12/PN/2021 Tanggal : 3 Maret 2021
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi	:	Sherly Anggiya Pratiwi
Alamat	:	Jalan MT Haryono 165, Malang
Thema/Judul/Survey/Research	:	**Pengaruh Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Financial Distress dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang)**
Daerah/Tempat	:	9 Desa Wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Lamanya	:	8 – 19 Maret 2021
Pengikut	:	-

Dengan Ketentuan :
1. Mentaati Ketentuan – Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 4 Maret 2021
an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
Sekretaris

AGUS WIDODO, SE
Pembina
NIP. 19720124 199901 1001

(Bakesbangpol)

Lampiran 2 Lembar Perizinan Dari Desa Kepuharjo

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA KEPUHARJO
Jalan Pertamanan VI Nomor 18 Kepuharjo 65152 Tlp.0341532021

Kepuharjo, 02 Maret 2021

Nomor : 005/46 /35.07.23.2002/2021
Sifat : Penting
Lamp. : 1 lembar
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian Skripsi**

Kepada
Yth. Kepala BAKESBANGPOL
Kab. Malang
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohona izin tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 842/UN10.F02.12/PN/2021 dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai berikut :

Nama : Sherly Anggiya Pratiwi
NIM : 175020401111031
Semester : 8
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

Yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi di Kantor Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan **Mempersilahkan Kegiatan tersebut dilaksakan** di Desa kami sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kepala Desa Kepuharjo

KHAMIM

Lampiran 3 Lembar Perizinan Dari Desa Donowarih

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA DONOWARIH

Alamat Jl. Raya Donowarih No. 1 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
Email : donowarihkarangploso45@gmail.com

Donowarih, 02 Maret 2021

Nomor : 470/44//35.07.23.2008/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemberian ijin Penelitian Skripsi

Kepada Yth :
Kepala BAKESBANGPOL
Kabupaten Malang
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor 842/UN10.F02.12/PN/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, tentang Permohonan ijin Penelitian Skripsi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SHERLY ANGGIYA PRATIWI
NIM :175020401111031
Semester : 8
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

Yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi, Kepala Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang,memberikan kesempatan untuk terlaksananya kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa kami sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Donowarih

SUJOKO

Tembusan :
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

Lampiran 4 Lembar Perizinan Dari Desa Bocek

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA BOCEK

Alamat Jl. Raya Desa Bocek No. 43 telp.0341.467347

Bocek , 02 Maret 2021

No	: 005/031/35.07.23.2007/2021	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala BAKESBANGPOL
Lampiran	: -	Kab.Malang
Perihal	: Undangan	Di
		Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan izin Nomor : 842/UN10.F02.12/PN/2021 Tanggal 25 Pebruari 2021 dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagi berikut :

Nama	: Sherly Anggiya Pratiwi
NIM	: 175020401111031
Semester	: 8
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan
Alamat	: Jl.Atletik No. 118 RT : 04 RW : 03 Kel.Tasikmadu , Kota Malang

Yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi , Kepala Desa BocekKecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur , Mengizinkan Kegiatan Keuangan dan Perbankan yang berjudul PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN FINANCIAL DISTTRESS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA , dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa kami sesuai jadwal yang telah ditentukan .

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kepentinganya .

Bocek, 02 – 03 - 2021
Kepala Desa Bocek

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DESA BOCEK KECAMATAN KARANGPLOSO

ABDUL KODIM

Lampiran 5 Lembar Perizinan Dari Desa Ngijo

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA NGIJO

Jl. Raya Ngijo No I Tlp. (0341) 467 066 Kode Pos 65152

Ngijo, 02 Maret 2021

Nomor : 145/ 97/35.07.23.2004/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Skripsi

Kepada :
Yth. Kepala BAKESBANGPOL
Kab Malang

Di Tempat

Menindlk lanjuti surat No: 842/UN10.F02/PN/2021tanggal 25 februari 2021 yang ditujukan kepada Desa Ngijo dari Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan bisnis Brawijaya :

Nama : HERLY ANGGIYA PRATIWI
NIM : 175020401111031
Semester : 8
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

Yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian Skripsi, Kepala Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang mempersilahkan kegiatan tersebut dilaksanakan si Desa kami sesuai jadwal yang ditentukan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

An Kepala Desa Ngijo
Sekretaris Desa

DESA NGIJO

MUHAMMAD SHOFI

Lampiran 6 Lembar Perizinan Dari Desa Ngenep

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA NGENEP
Alamat : Jalan Singojoyo Nomor 86 Ngenep Krajan Kode Pos 65152

SURAT IZIN

Nomor : 470/253 /35.07.23.2003/2021

Berdasarkan surat Nomor : 842/UIN/10F02.12/PN/2021 hal ijin penelitian Skripsi bahwa Kepala Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan ini memberikan izin kepada saudara :

Nama	: **SHERLY ANGGIYA PRATIWI**
NIM	: 175020401111031
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan
Universitas	: Universitas Brawijaya Malang
Alamat	: Jl. Aktlik No. 118 RT.04 RW.03 Kel Tasikmadu, Kota Malang

Untuk melakukan Penelitia Skripsi " PENGURUS KOMPETENSI PERANGKAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PECEGAHAN FINANCIAL DISTRESS DALAM PENGOLAAN DANA DESA"

Demikian Surat Izin ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ngenep, 3 Maret 2021
KEPALA DESA NGENEP

SUWARDI

Lampiran 7 Lembar Perizinan Dari Desa Tawagargo

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA TAWANGARGO
Jl. Raya Tawangargo
Email : Tawangargo@gmail.com. - Website Http://Tawangargosideka.com
MALANG 65152

Tawangargo, 02 Maret 2021

Nomor : 005/008/35.07.23.2009/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian izin Penelitian Skripsi

Kepada
Yth. Kepala BAKESBANGPOL
Kab. Malang
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan izin Nomor : 842/UN10.F02.12/PN/2021 Tanggal 25 Februari 2021 dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai berikut :

Nama : Sherly Anggiya Pratiwi
NIM : 175020401111031
Semester : 8
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

Yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi, Kepala Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan **Mempersilahkan Kegiatan tersebut dilaksanakan** di Desa kami sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

An. Kepala Desa Tawangargo
Sekretaris Desa

NURYASIN

Lampiran 8 Lembar Perizinan Dari Desa Ampeldento

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA AMPELDENTO

Jl. Rogoboyo No. 1 Ampeldento Karangploso No. Telp. (0341)5052226 Malang 65152

Nomor : 005/010/35.07.23.2005/2021
Sifat : Penting
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian Skripsi**

Kepada
Yth. Bapak/ibu/sdr
Kepala BAKESBANGPOL
KAB. MALANG
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan izin tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 842/UN10.F02.12/PN/2021 dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai berikut :

Nama	:	SHERLY ANGGIYA PRATIWI
NIM	:	175020401111031
Semester	:	8 (Delapan)
Konsentrasi	:	Keuangan dan Perbankan

Yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi di Kantor Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan **Mempersilahkan Kegiatan tersebut dilaksanakan** di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ampeldento, 04 Maret 2021
Kepala Desa Ampeldento

SUHARIYANTO

Lampiran 9 Lembar Perizinan Dari Desa Tegalgondo

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA TEGALGONDO
Jl Notojoyo NO.167 Tegalgondo Kec.Karangploso Telp 469817

Nomor : 414/03/350.723.2001
Sifat : Penting/segera
Lampiran : -
Perihal : ***Pemberian Ijin***

Tegalgondo, 04 Maret 2021

Kepada Yth:**BAKESBANGPOL**
Kabupaten Malang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti Surat Nomor:842/UN10.F02.12/PN/2021 Yang di tanda tangani Oleh Ketua jururan Ilmu Ekonomi,tentang Permohonan Ijin Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan Identitas Sebagai Berikut :

Nama : SHERLY ANGGIYA PRATIWI

NIM : 175020401111031

Semester : 8

Kosentrasi : Keuangan dan Perbankan

Yang akan melaksakan Penelitian Skripsi ,Kepala Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,Memberikan Kesempatan Untuk terlaksananya Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Kami sesuei dengan Jadwal yang telah di tentukan.

Demikian atas Perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Desa Tegalgondo,

NUR MAHMUD

Tembusan

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

Lampiran 10 Lembar Perizinan Dari Desa Girimoyo

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
DESA GIRIMOYO
Jl. Diponegoro 04 Karangploso Telp. 0341-460738
MALANG 65152

Girimoyo, 03 Maret 2021

Nomor	: 005 / 006 / 35.07.23.2006 / 2021	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala BAKESBANGPOL
Lampiran	: -	Kabupaten Malang
Perihal	: **Pemberian Izin Penelitia Skripsi**	Di
		MALANG

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Nomor : 842/UN10.F02.12/PN/2021 Tanggal 25 Februari 2021 dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai berikut :

Nama	: Sherly Anggiya Pratiwi
NIM	: 175020401111031
Semester	: 8
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan

Yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi Kepala Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan **mempersilahkan kegiatan tersebut dilaksanakan** di desa kami sesuai jadwal yang ditentukan.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n KEPALA DESA GIRIMOYO
Sekretaris Desa

LIANA DESY SUSANTI

Lampiran 11 Kuesioner Penelitian

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yang Terhormat
Bapak/Ibu Pegawai Kantor Desa
Wilayah Kecamatan Karangploso
Di Tempat

Dengan Hormat,

Pertama-tama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian dengan judul **"PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN *FINANCIAL DISTRESS* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)"**

Subjek Penelitian ini adalah Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dimana Bapak/Ibu termasuk di dalamnya. Untuk itu, kami memohon partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi Kuesioner Penelitian ini dengan variabel penelitiannya yaitu Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat (yang diwakili oleh BPD) dan Pencegahan Financial Distress dalam Pengelolaan Dana Desa.

Kesediaan Bapak/Ibu untuk menyelesaikan pengisian kuesioner dalam waktu 2 minggu sejak Bapak/Ibu menerima kuesioner ini sangat kami hargai. Jika membutuhkan informasi, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami di nomor : 085755023686 (WA) atau email Sherlyanggiya12@gmail.com

Atas Partispasi Bapak/Ibu kami Ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Sherly Anggiya Pratiwi

Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu yang Terhormat

Bacalah dengan teliti dan seksama setiap pertanyaan sebelum memilih isian yang tepat. Bapak/ibu cukup memilih satu dari 5 pilihan yang disediakan dengan cara memberikan tanda Checklist (✓) pada kolom yang disediakan, sesuai dengan tingkat implementasi yang dilakukan di Kantor Desa Bapak/Ibu. Dengan klasifikasi isian sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju
S = Setuju
KS = Kurang Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Identitas Responden

Untuk Keperluan keabsahan data penelitian ini, Saya megharapkan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi data-data berikut dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom jawaban yang telah disediakan.

Nama : .....

Jenis Kelamin : ( ) Pria ( ) Wanita

Usia : ( ) < 21tahun
( ) 22-28 tahun
( ) 35-29 tahun
( ) 36-42 tahun
( ) > 43 tahun

Tingkat Pendidikan : ( ) SMA
( ) D3
( ) S1
( ) S2
( ) S3
( ) Lainnya .....

Jabatan : .....

Posisi dalam mengelola DD : .....

1. Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	I. Pengetahuan *(Knowledge)*					
1.	Saya mengetahui dan memahami peraturan yang ada di Desa.					
2.	Sebagai perangkat pengelola Dana Desa saya sangat mengetahui dan memahami bagaimana arah Dana Desa akan direalisasikan.					
3.	Sebagai perangkat pengelola dana desa saya perlu mengikuti pelatihan untuk mengelola dana desa dengan baik.					
	II. Kemampuan *(Skill)*					
4.	Saya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani					
5.	Saya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan yang saya tangani					
6.	Pendidikan terakhir yang saya tempuh membantu saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari					
	III. Sikap *(attitude)*					
7.	Saya berlaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ditempat saya bekerja.					
8.	Saya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat dan aparat desa yang lainnya.					
9.	Saya tidak senang menerima kritik saran dari masyakarat.					
	IV. Efektivitas *(effectiveness)*					
10.	Kompetensi yang saya miliki sebagai perangkata pengelola Dana Desa dapat meningkatkan efektivitas saya dalam menyelesaikan tugas.					
11.	Kompetensi yang saya miliki dapat meningkatkan kualitas saya sebagai perangkat desa yang mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu.					
12.	Secara keseluruhan, kompetensi yang saya miliki berguna untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada saya.					

2. Partisipasi Masyarakat (yang diwakili oleh BPD)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
	I. Pengambilan Keputusan					
13.	Perwakilan masyarakat (BPD) sangat perlu terlibat dalam pengambilan keputusan program desa.					
14.	Setiap keputusan yang akan dilakukan selalu dirundingkan dahulu dengan perwakilan masyarakat.					
15.	Selama pengambilan keputusan suasana berlangsung tenang.					
	II. Penyusunan Anggaran					

16.	Saya selalu menghargai perwakilan masyarakat (BPD) yang mengusulkan rencana anggaran.					
17.	Saya merasa perlu adanya perwakilan masyarakat (BPD) dalam rapat penyusunan anggaran.					
18.	Tanpa adanya campur tangan perwakilan masyarakat (BPD) di dalam rapat kita akan kesusahan dalam melihat apa yang sedang dibutuhkan untuk pembangunan program desa.					
	III. Pelaksanaan Anggaran					
19.	Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam mengawasi dana desa.					
20.	Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) terlibat dalam melaporkan dana desa.					
21.	Saya setuju bahwa perwakilan masyarakat (BPD) sangat diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.					
	IV. Kepercayaan (*trust)*					
22.	Saya percaya tentang segala informasi terkait anggaran Dana Desa, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.					
23.	Saya percaya bahwa pengalokasian Dana Desa dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang baik.					
24.	Saya percaya pengalokasian Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, karena pihak yang menanganinya kompeten, terpercaya, dan berintegritas..					

3. Pencegahan Financial Distress dalam Pengelolaan Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
	I. Kejujuran dan Hukum					
25.	Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat					
26.	Saya melakukan pelaporan relaisasi penggunaan dana desa sesuai dengan PP No 60 Tahun 2014					
27.	Laporan Realisasi penggunaaan dana desa disampaikan tepat waktu					
	II. Proses Pelaksanaan					
28.	Berdasarkan PP No 60 tahun 2014, saya harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.					
29.	Berdasarkan PP NO 60 tahun 2014, laporan realisasi dana desa dilaporankan dua (2) kali dalam satu tahun.					
30.	Laporan realisasi dana desa yang saya berikan telah sesuai dengan realisasinya.					
	III. Kondisi Keuangan					

31.	Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat telah dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.					
32.	Dana desa telah dimanfaatkan secara optimal dan tidak pernah terjadi *financial distress* (kesulitan keuangan).					
33.	Masyarakat setempat sangat puas dengan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat pengelola Dana Desa.					
	IV. Penyelesaian Masalah					
34.	Selama pelaksanaan program Dana Desa tidak pernah terjadi masalah selama pengerjaannya.					
35.	Masalah dalam pengelolaan keuangan Desa perlu didiskusikan dengan perwakilan masyarakat (transparansi).					
36.	Perwakilan masyarakat dan perangkat desa adalah satu kesatuan yang penting dalam kemajuan sebuah desa.					

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

Lampiran 12 Data Responden

No	Nama Responden	Jabatan
1	H. Sukar	Kepala Desa Tawangargo
2	Nuryasih	Sekertaris Desa
3	Abdul Wahab	Kaur Umum
4	Tawardani	Kaur Keuangan
5	Lolat	Kaur Perencanaan
6	Slarto	Kasi Kesejahteraan
7	Aminullah	Kasi Pelayanan
8	Masrukuri	Kasi Pemerintahan
9	Mustaji	BPD Tawangargo
10	Mujib	BPD Tawangargo
11	Miseno	BPD Tawangargo
12	Sujoko Donoprasetyo	Kepala Desa Donowarih
13	Ary Widy Hartono	Sekertaris Desa
14	Ahmad Khoirus Salim	Kaur Umum
15	Eristanto Ananta	Kaur Perencanaan
16	Sutikno	Kaur Keuangan
17	Karianto	Kasi Pemerintahan
18	Sugeng Nuryadi	Kasi Kesejahteraan
19	Mashudi	Kasi Pelayanan
20	Drs. Abdul Qohar	BPD Donowarih
21	Slamet Ihwan. S,Pd	BPD Donowarih
22	Malkan Kabibana	BPD Donowarih
23	M. Syafi'i	BPD Donowarih
24	Gatot	BPD Donowarih
25	Rojikin	BPD Donowarih
26	Wiennoto	BPD Donowarih
27	Abdul Khodim	Kepala Desa Bocek
28	Muhammad Kholip	Sekertaris Desa
29	Ardiguno	Kaur Keuangan
30	Muhammad Ali Wafa	Kaur Perencanaan dan Pelaporan
31	Muhammad Khoiruddin Zuhri	Kasi Pembangunan
32	Titis Rahmad Ismuhaji	Kasi Kesejahteraan
33	Supriyono	BPD Bocek
34	Dedik Herwanto	BPD Bocek
35	Asmadi	BPD Bocek
36	Tohari	BPD Bocek
37	Abdul Adhim	BPD Bocek
38	H. Rony Widono	Kepala Desa Girimoyo
39	Liana Desy Susanti	Sekretaris Desa

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

No	Nama Responden	Jabatan
40	Armanda Sindu Murdani	Kasi Pembangunan
41	Yatinah Binti S.	Kaur Keuangan
42	Indah Indriyanti D.P	Kaur Umum
43	M. Supi'i	Kasi Pemerintahan
44	Fauzan	Kasi Pelayanan
45	Fauzi	Kasi Perencanaan
46	H. Ismail	BPD Girimoyo
47	Yusuf	BPD Girimoyo
48	Endah	BPD Girimoyo
49	Kustiwan	BPD Girimoyo
50	Ariyono	BPD Girimoyo
51	M. Rifkan	BPD Girimoyo
52	Agus Said	BPD Girimoyo
53	Hariyanto	BPD Girimoyo
54	H. Mahdi Maulana	Kepala Desa Ngijo
55	Muhammad Shofi	Sekertaris Desa
56	M. Anshori	Kaur Umum
57	Subandi	Kasi Pemerintahan
58	Gatot A.	BPD Ngijo
59	Agustiyono	BPD Ngijo
60	Ahmad Syaifudin	BPD Ngijo
61	H. Sumarto	BPD Ngijo
62	Andi Suprapto	BPD Ngijo
63	Samsul Arif	BPD Ngijo
64	Suwardi	Kepala Desa Ngenep
65	Subaedi	Sekertaris Desa
66	Sanudi	Kasi Pemerintah
67	Khusna	Kasi Kesejahteraan
68	Mustofa	Kasi Pelayanan
69	Putri Sulistyoningrum	Kaur Keuangan
70	Suprihana	BPD Ngenep
71	Suwardi	BPD Ngenep
72	Muhajirin	BPD Ngenep
73	Samuji	BPD Ngenep
74	Ta'i	BPD Ngenep
75	Sumarto	BPD Ngenep
76	Anjar	BPD Ngenep
77	Eni	BPD Ngenep
78	So'im	BPD Ngenep
79	Khamim	Kepala Desa Kepuharjo
80	Ika Adi Saputra	Sekertaris Desa
81	Dhimas Fajar Amalia	Kaur Umum

No	Nama Responden	Jabatan
82	Ismail Adani	Kaur Perencanaan
83	Budi Waluyo	Kaur Keuangan
84	Enggar Waluyo	Kasi Kesejahteraan
85	Sujiono	Kasi Pemerintahan
86	Kusman	BPD Kepuharjo
87	Senardi	BPD Kepuharjo
88	Kurniawan Eko S.	BPD Kepuharjo
89	Ananto	BPD Kepuharjo
90	Arifin	BPD Kepuharjo
91	Much. Bagus	BPD Kepuharjo
92	H. Sudarmaji	BPD Kepuharjo
93	Suhariyanto	Kepala Desa Ampeldento
94	Iksan	Sekertaris Desa
95	Varra Choirun Nisa	Kaur Umum
96	Agus Hariyanto	Kaur Keuangan
97	Sukari	Kasi Pelayanan
98	M. Syaifuddin Rosyidi	Kasi Kesejahteraan
99	Slamet Bagiyo	BPD Ampeldento
100	Idham Syah Choir	BPD Ampeldento
101	Yahya	BPD Ampeldento
102	Nur Mahmud	Kepala Desa Tegalgondo
103	Sanik Darmawati	Sekertaris Desa
104	Wawan Tri Wahyuno	Kaur Keuangan
105	Joyo Warsito	Kaur Perencanaan
106	Tarmudi	Kasi Pelayanan
107	Ninik Indahwati	Kasi Pemerintahan
108	Erik Irwanto	Kasi Kesejahteraan
109	Muhammad Efendi	BPD Tegalgondo
110	Hermastur	BPD Tegalgondo
111	M. Samsul A.	BPD Tegalgondo

Lampiran 13 Tabulasi Data

Tabulasi data untuk variabel Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1)

NO/Q	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	TOTAL
1	4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	53
5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	53
6	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	53
7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	50
8	5	3	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	51
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57
10	5	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	51
11	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	49
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	45
14	5	3	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	49
15	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	47
16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
17	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
18	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
19	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	53
20	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
21	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	55
22	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	50
23	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
24	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	51
25	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	51
26	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	51
27	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	51
28	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
29	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
30	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
31	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

36	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	56
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	58
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
41	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	58
42	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	51
43	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	53
44	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	59
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
47	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
48	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	57
49	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	47
50	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	48
51	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
52	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	47
53	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	48
54	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
55	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	47
56	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	48
57	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	50
58	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5	4	4	54
59	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	58
60	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	57
61	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	52
62	5	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	52
63	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	57
64	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	56
65	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	51
66	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	56
67	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	58
68	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	57
69	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	53
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
71	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
72	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
74	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
75	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
76	4	5	4	4	2	4	5	5	5	4	4	5	51
77	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	52
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

79	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
80	4	4	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	50
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
82	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	52

Tabulasi data untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

NO/Q	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	55
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
4	4	5	2	4	4	3	5	3	4	3	2	3	42
5	4	5	2	4	4	3	5	3	4	3	2	3	42
6	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	53
7	5	5	5	4	4	4	4	1	5	5	5	5	52
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	58
9	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	5	50
10	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
11	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
19	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	57
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
21	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	56
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
24	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
25	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
26	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
27	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
28	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
29	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
32	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	59
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

36	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
37	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
40	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
41	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	52
42	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	54
43	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	55
44	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
45	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	55
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
47	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
48	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	53
49	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	44
50	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	46
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
52	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
54	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
55	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
56	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
58	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	52
59	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	52
60	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	52
61	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	53
62	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	57
63	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	53
64	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	53
65	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	54
66	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	54
67	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	54
68	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	58
69	4	5	5	5	5	2	5	5	5	4	5	5	105
70	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	50
71	5	5	4	5	4	5	5	1	4	5	5	4	52
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
73	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
74	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
75	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	49
76	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	53
77	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	52
78	5	3	4	5	4	4	4	4	4	2	4	4	47

79	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	53
80	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
82	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	47

Tabulasi data untuk variabel Pencegahan Financial Distress Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO/Q	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	TOTAL Y
1	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	44
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	4	5	41
5	3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	4	5	41
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
7	5	5	5	4	2	4	5	5	5	3	4	4	51
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
9	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	42
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
15	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	43
16	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	42
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
18	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	42
19	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	50
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
21	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	55
22	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	49
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
24	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	49
25	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	49
26	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	49
27	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	49
28	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
29	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
41	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	53
42	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	49
43	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	53
44	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	53
45	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54
46	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	55
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
48	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	53
49	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
52	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
53	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
57	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
58	5	4	3	5	4	5	5	4	4	3	5	4	4	51
59	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	57
60	4	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	55
61	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	56
62	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	52
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	51
64	4	4	5	4	4	5	4	4	3	5	5	5	5	52
65	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	48
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	51
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	51
68	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	50
69	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	54
70	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
71	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	55
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

76	4	4	4	4	4	2	4	2	5	3	5	5	46
77	4	4	4	4	4	3	4	3	5	3	5	5	48
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
81	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

Lampiran 14 Hasil Pengolahan SPSS

Validitas untuk Variabel Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1)

Correlations

		KMP1	KMP2	KMP3	KMP4	KMP5	KMP6	KMP7	KMP8	KMP9	KMP10	KMP11	KMP12	TO
KMP1	Pearson Correlation	1	.475**	.303**	.514**	.378**	.319**	.524**	.444**	.622**	.248*	.416**	.440**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.006	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000		
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
KMP2	Pearson Correlation	.475**	1	.473**	.448**	.285**	.428**	.446**	.407**	.368**	.526**	.573**	.513**	
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
KMP3	Pearson Correlation	.303**	.473**	1	.308**	.356**	.287**	.268*	0.205	.224*	.405**	.506**	0.155	
	Sig. (2-tailed)	0.006	0.000		0.005	0.001	0.009	0.015	0.064	0.043	0.000	0.000	0.164	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
KMP4	Pearson Correlation	.514**	.448**	.308**	1	.575**	.490**	.353**	.366**	.526**	.283*	.443**	.259*	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.005		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.010	0.000	0.019	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
KMP5	Pearson Correlation	.378**	.285**	.356**	.575**	1	.355**	0.203	.281*	0.208	.281*	.329**	0.161	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.009	0.001	0.000		0.001	0.067	0.010	0.061	0.011	0.003	0.149	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
KMP6	Pearson Correlation	.319**	.428**	.287**	.490**	.355**	1	.299**	.251*	.383**	.371**	.523**	.436**	
	Sig. (2-tailed)	0.004	0.000	0.009	0.000	0.001		0.006	0.023	0.000	0.001	0.000	0.000	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
KMP7	Pearson Correlation	.524**	.446**	.268*	.353**	0.203	.299**	1	.829**	.581**	.458**	.420**	.626**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.015	0.001	0.067	0.006		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	

KMP8	Pearson Correlation	.444**	.407**	0.205	.366**	.281*	.251*	.829**	1	.391**	.447**	.405**	.584**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.064	0.001	0.010	0.023	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
KMP9	Pearson Correlation	.622**	.368**	.224*	.526**	0.208	.383**	.581**	.391**	1	0.216	.362**	.446**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.001	0.043	0.000	0.061	0.000	0.000	0.000		0.051	0.001	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
KMP10	Pearson Correlation	.248*	.526**	.405**	.283*	.281*	.371**	.458**	.447**	0.216	1	.714**	.571**
	Sig. (2-tailed)	0.025	0.000	0.000	0.010	0.011	0.001	0.000	0.000	0.051		0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
KMP11	Pearson Correlation	.416**	.573**	.506**	.443**	.329**	.523**	.420**	.405**	.362**	.714**	1	.626**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000		0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
KMP12	Pearson Correlation	.440**	.513**	0.155	.259*	0.161	.436**	.626**	.584**	.446**	.571**	.626**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.164	0.019	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
TOTAL_KMP	Pearson Correlation	.698**	.744**	.549**	.694**	.535**	.641**	.733**	.681**	.663**	.681**	.779**	.713**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas untuk Variabel Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X2)

Correlations

		PRT1	PRT2	PRT3	PRT4	PRT5	PRT6	PRT7	PRT8	PRT9	PRT10	PRT11	PRT12	TOTAL_PRT
PRT1	Pearson Correlation	1	.529**	.402**	.366**	.327**	.614**	.554**	.389**	.519**	.347**	.443**	.335**	.328**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT2	Pearson Correlation	.529**	1	0.160	.294**	.314**	.353**	.535**	.252*	.500**	.378**	.242*	.392**	.441**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.150	0.007	0.004	0.001	0.000	0.022	0.000	0.000	0.029	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT3	Pearson Correlation	.402**	0.160	1	.531**	.330**	.280*	.248*	.324**	.482**	.523**	.639**	.579**	.509**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.150		0.000	0.002	0.011	0.024	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT4	Pearson Correlation	.366**	.294**	.531**	1	.450**	.337**	.560**	.285**	.569**	.381**	.547**	.569**	.541**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.007	0.000		0.000	0.002	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT5	Pearson Correlation	.327**	.314**	.330**	.450**	1	.438**	.374**	.465**	.354**	.317**	.251*	.401**	.491**
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.004	0.002	0.000		0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.023	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT6	Pearson Correlation	.614**	.353**	.280*	.337**	.438**	1	.475**	.510**	.366**	.476**	.371**	.420**	0.167
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.001	0.011	0.002	0.000		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.134
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT7	Pearson Correlation	.554**	.535**	.248*	.560**	.374**	.475**	1	.414**	.623**	.351**	.294**	.361**	.512**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.024	0.000	0.001	0.000		0.000	0.000	0.001	0.007	0.001	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

PRT8	Pearson Correlation	.389**	.252*	.324**	.285**	.465**	.510**	.414**	1	.474**	0.168	0.210	.380**	.473**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.022	0.003	0.009	0.000	0.000	0.000		0.000	0.132	0.059	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT9	Pearson Correlation	.519**	.500**	.482**	.569**	.354**	.366**	.623**	.474**	1	.436**	.589**	.571**	.583**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT10	Pearson Correlation	.347**	.378**	.523**	.381**	.317**	.476**	.351**	0.168	.436**	1	.652**	.662**	.393**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.001	0.132	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT11	Pearson Correlation	.443**	.242*	.639**	.547**	.251*	.371**	.294**	0.210	.589**	.652**	1	.731**	.549**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.029	0.000	0.000	0.023	0.001	0.007	0.059	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
PRT12	Pearson Correlation	.335**	.392**	.579**	.569**	.401**	.420**	.361**	.380**	.571**	.662**	.731**	1	.607**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
TOTAL_PRT	Pearson Correlation	.328**	.441**	.509**	.541**	.491**	0.167	.512**	.473**	.583**	.393**	.549**	.607**	1
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas untuk Variabel Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y)

Correlations

		FDS1	FDS2	FDS3	FDS4	FDS5	FDS6	FDS7	FDS8	FDS9	FDS10	FDS11	FDS12	TOTAL_FDS
FDS1	Pearson Correlation	1	.794**	.508**	.737**	.463**	.586**	.679**	.614**	.586**	.472**	.539**	.405**	.836**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS2	Pearson Correlation	.794**	1	.704**	.790**	.533**	.628**	.594**	.658**	.728**	.537**	.491**	.434**	.896**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS3	Pearson Correlation	.508**	.704**	1	.550**	.569**	.585**	.381**	.412**	.382**	.367**	.414**	.443**	.709**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS4	Pearson Correlation	.737**	.790**	.550**	1	.632**	.636**	.574**	.585**	.562**	.483**	.566**	.383**	.847**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS5	Pearson Correlation	.463**	.533**	.569**	.632**	1	.606**	.406**	.324**	.285**	.382**	.516**	.502**	.698**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.003	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS6	Pearson Correlation	.586**	.628**	.585**	.636**	.606**	1	.550**	.620**	.262*	.444**	.491**	.434**	.768**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS7	Pearson Correlation	.679**	.594**	.381**	.574**	.406**	.550**	1	.596**	.324**	.457**	.413**	.299**	.701**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.003	0.000	0.000	0.006	0.000

	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS 8	Pearson Correlation	.614**	.658**	.412**	.585**	.324**	.620**	.596**	1	.516**	.628**	.319**	.226*	.741**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000		0.000	0.000	0.004	0.041	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS 9	Pearson Correlation	.586**	.728**	.382**	.562**	.285**	.262*	.324**	.516**	1	.374**	.443**	.329**	.664**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.018	0.003	0.000		0.001	0.000	0.003	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS 10	Pearson Correlation	.472**	.537**	.367**	.483**	.382**	.444**	.457**	.628**	.374**	1	.401**	.275*	.672**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001		0.000	0.012	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS 11	Pearson Correlation	.539**	.491**	.414**	.566**	.516**	.491**	.413**	.319**	.443**	.401**	1	.813**	.711**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
FDS 12	Pearson Correlation	.405**	.434**	.443**	.383**	.502**	.434**	.299**	.226*	.329**	.275*	.813**	1	.610**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.041	0.003	0.012	0.000		0.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
TOTAL_FDS	Pearson Correlation	.836**	.896**	.709**	.847**	.698**	.768**	.701**	.741**	.664**	.672**	.711**	.610**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas untuk Variabel Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X1)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.891	0.892	12

Reliabilitas untuk Variabel Kompetensi Perangkat Pengelola Dana Desa (X2)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.880	0.881	11

Reliabilitas untuk Variabel Pencegahan *Financial Distress* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.922	0.924	12

Lampiran 15 r tabel

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

Lampiran 16 DW tabel

	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
n	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	**1.6131**	**1.7364**	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

Lampiran 17 *Chi-Square* tabel

Titik Persentase Distribusi Chi-Square untuk d.f. = 51 - 100

Pr / df	0.25	0.10	0.05	0.010	0.005	0.001
51	57.40118	64.29540	68.66929	77.38596	80.74666	87.96798
52	58.46809	65.42241	69.83216	78.61576	82.00083	89.27215
53	59.53435	66.54820	70.99345	79.84334	83.25255	90.57341
54	60.59998	67.67279	72.15322	81.06877	84.50190	91.87185
55	61.66500	68.79621	73.31149	82.29212	85.74895	93.16753
56	62.72942	69.91851	74.46832	83.51343	86.99376	94.46054
57	63.79326	71.03971	75.62375	84.73277	88.23638	95.75095
58	64.85654	72.15984	76.77780	85.95018	89.47687	97.03883
59	65.91927	73.27893	77.93052	87.16571	90.71529	98.32423
60	66.98146	74.39701	79.08194	88.37942	91.95170	99.60723
61	68.04313	75.51409	80.23210	89.59134	93.18614	100.88789
62	69.10429	76.63021	81.38102	90.80153	94.41865	102.16625
63	70.16496	77.74538	82.52873	92.01002	95.64930	103.44238
64	71.22514	78.85964	83.67526	93.21686	96.87811	104.71633
65	72.28485	79.97300	84.82065	94.42208	98.10514	105.98814
66	73.34409	81.08549	85.96491	95.62572	99.33043	107.25788
67	74.40289	82.19711	87.10807	96.82782	100.55401	108.52558
68	75.46124	83.30790	88.25016	98.02840	101.77592	109.79130
69	76.51916	84.41787	89.39121	99.22752	102.99621	111.05507
70	77.57666	85.52704	90.53123	100.42518	104.21490	112.31693
71	78.63374	86.63543	91.67024	101.62144	105.43203	113.57694
72	79.69042	87.74305	92.80827	102.81631	106.64763	114.83512
73	80.74670	88.84992	93.94534	104.00983	107.86174	116.09151
74	81.80260	89.95605	95.08147	105.20203	109.07438	117.34616
75	82.85812	91.06146	96.21667	106.39292	110.28558	118.59909
76	83.91326	92.16617	97.35097	107.58254	111.49538	119.85035
77	84.96804	93.27018	98.48438	108.77092	112.70380	121.09996
78	86.02246	94.37352	99.61693	109.95807	113.91087	122.34795
79	87.07653	95.47619	100.74862	111.14402	115.11661	123.59437
80	88.13026	96.57820	101.87947	112.32879	116.32106	124.83922
81	89.18365	97.67958	103.00951	113.51241	117.52422	126.08256
82	90.23670	98.78033	104.13874	114.69489	118.72613	127.32440
83	91.28944	99.88046	105.26718	115.87627	119.92682	128.56477
84	92.34185	100.97999	106.39484	117.05654	121.12629	129.80369
85	93.39395	102.07892	107.52174	118.23575	122.32458	131.04120
86	94.44574	103.17726	108.64789	119.41390	123.52170	132.27732
87	95.49723	104.27504	109.77331	120.59101	124.71768	133.51207
88	96.54842	105.37225	110.89800	121.76711	125.91254	134.74548
89	97.59932	106.46890	112.02199	122.94221	127.10628	135.97757
90	98.64993	107.56501	113.14527	124.11632	128.29894	137.20835
91	99.70026	108.66058	114.26787	125.28946	129.49053	138.43786
92	100.75031	109.75563	115.38979	126.46166	130.68107	139.66612
93	101.80009	110.85015	116.51105	127.63291	131.87058	140.89313
94	102.84960	111.94417	117.63165	128.80325	133.05906	142.11894
95	103.89884	113.03769	118.75161	129.97268	134.24655	143.34354
96	104.94783	114.13071	119.87094	131.14122	135.43305	144.56697
97	105.99656	115.22324	120.98964	132.30888	136.61858	145.78923
98	107.04503	116.31530	122.10773	133.47567	137.80315	147.01036
99	108.09326	117.40688	123.22522	134.64162	138.98678	148.23036
100	109.14124	118.49800	124.34211	135.80672	140.16949	149.44925

Lampiran 18 t tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr / df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya

Lampiran 9 F tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Universitas Brawijaya